

SEJARAH PENDIDIKAN

DAERAH MALUKU



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PEKERJAAN INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI KEBUDAYAAN DAERAH
1980 / 1981

SEJARAH PENDIDIKAN

DAERAH MALUKU



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI KEBUDAYAAN DAERAH
1980 / 1981

**Milik Departemen P dan K
Tidak diperdagangkan**

SEJARAH PENDIDIKAN DAERAH MALUKU

**Editor : Drs. Sunyata Kartadamadja
Sutrisno Kutoyo**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI
KEBUDAYAAN DAERAH
1980/1981**

PENYUNTING

1. **Drs. M. Soenjata Kartadarmadja**
2. **Muchtaruddin Ibrahim B.A.**
3. **Sutrisno Kutojo**

TIM PENELITIAN / PENULIS

- 1. Drs. John A. Pattikayhatu**
- 2. Drs. H.B. Tetelepta**
- 3. F. Nendissa B.A.**

PRAKATA

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Maluku (IDKD) Maluku tahun anggaran 1981/1982 dipercayakan mencetak dua buah naskah di daerah. Kedua naskah ini ialah adat dan Upacara Perkawinan Daerah Maluku dan Sejarah Pendidikan daerah Maluku.

Naskah Sejarah Pendidikan di Daerah Maluku ialah naskah yang di garap oleh Drs. John Pattikayhatu dan kawan-kawan dalam tahun anggaran 1980/1981. Proses yang di tempuh sampai memperoleh naskah yang siap di cetak telah melibatkan berbagai pihak. Banyak pihak yang telah membantu, mulai dari tahap pengumpulan dan pengolahan data, editing sampai akhirnya siap cetak.

Melalui kesempatan ini kamu mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku yang telah melimpahkan kepercayaan kepada kami memimpin Proyek IDKD Maluku.
2. Staf Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku.
Sdr.Drs.John Pattikayhatu dan kawan-kawan yang telah bersusah payah menggarap naskah ini.
4. Para Bupati dan Camat se-Maluku yang telah memberikan bantuan dalam pengumpulan data lapangan.
5. Tim Pusat yang meneliti dan mengedit naskah ini.
6. Rekan-rekan staf proyek yang dengan ikhlas ikut mengelola proyek.
7. Semua pihak yang tak dapat disebutkan namanya satu demi satu dalam memberi bantuan.

Semoga karya ini ada manfaatnya bagi nusa dan bangsa khususnya rakyat daerah maluku.

Ambon, Mei 1982.
Pemimpin Proyek IDKD - Maluku

drs.Eddy Marantika.
Nip. 130163204

PENGANTAR.

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan telah menghasilkan beberapa macam naskah Kebudayaan daerah diantaranya ialah naskah : Sejarah Pendidikan Daerah Maluku Tahun 1980 / 1981.

Kami menyadari bahwa naskah ini belumlah merupakan suatu hasil penelitian yang mendalam, tetapi baru pada tahap pencatatan, yang diharapkan dapat disempurnakan pada waktu-waktu selanjutnya.

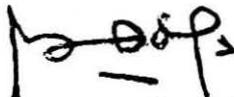
Berhasilnya usaha ini berkat kerja sama yang baik antara Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional dengan Pimpinan dan Staf Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Pemerintah Daerah, Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Perguruan Tinggi, Leknas/LIPI dan tenaga ahli perorangan di daerah.

Oleh karena itu dengan selesainya naskah ini, maka kepada semua pihak yang teresbut di atas kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih.

Demikian pula kepada tim penulis naskah ini di daerah yang terdiri dari: Drs. John. A.Pattikayhatu dan kawan-kawan .
dan tim penyempurnaan naskah di pusat yang terdiri dari: Drs.Abdurachman, Suryomihardjo, Drs.A.B.Lapian, Drs.Bambang Sumadio, Sutrisno Kutoyo, Drs.Sunyata Kartadarmadja.

Harapan kami, terbitan ini ada manfaatnya.-

Jakarta, 28 - 1 - 1982
Pemimpin Proyek


(Dr. Bambang Suwondo)
NIP. 130117589

SAMBUTAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN P DAN K
PROPINSI MALUKU

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, kami menyambut dengan rasa gembira kegiatan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Maluku untuk mencetak naskah Sejarah Pendidikan Daerah Maluku.

Terbitnya naskah ini menjadi buku akan menambah khasanah warisan budaya bangsa Indonesia sekaligus memupuk semangat wawasan nusantara bagi generasi muda dan generasi mendatang.

Usaha penulisan buku-buku mengenai kebudayaan daerah patut kita kembangkan terus sehingga senantiasa memperkaya kebudayaan nasional.

Saya percaya bahwa buku ini akan memperluas sarana perpustakaan di bidang kebudayaan khususnya kebudayaan daerah Maluku.

Kepada semua pihak yang telah membantu hingga terbitnya buku ini saya ucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Wilayah
Departemen P dan K
Propinsi Maluku.,



Piet M. SYAUTA
NIP. 130058777

DAFTAR ISI

	Halaman.
Prakata	
Pengantar	
Kata Sambutan	
Daftar isi	
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang Budaya Masyarakat	1
B. Perkembangan Pendidikan secara Garis Besar . . .	5
Bab II Pendidikan Tradisional	9
A. Kebudayaan Neolitik :	9
B. Pengaruh Agama Islam	10
Bab III Pendidikan Barat	13
A. Pengaruh Portugis	13
B. Pendidikan Zaman V O C	16
C. Pendidikan Zaman Hindia Belanda (Abad ke-19) . .	19
Bab IV Pendidikan Pada Abad ke-20	25
A. Pendidikan Pemerintah Hindia Belanda	25
B. Pendidikan Pergerakan Nasional	34
Bab V Pendidikan Zaman Jepang	40
A. Pendahuluan	40
B. Perkembangan Pendidikan dan Pengajaran	41
Bab VI Pendidikan Zaman Indonesia Merdeka	43
A. Pendahuluan	43
B. Usaha Pengembangan Pendidikan dan Pengajaran	44
Bab VII. Penutup	80
Daftar catatan	82
Daftar Buku	86
Daftar Informan	88
Lampiran-lampiran	91
Peta Propinsi Maluku	93

Halaman

Struktur Organisasi Dep. P dan K di Daerah	95
Statistik Keadaan Tm/SD/Pend.Kejuruan/Pendidikan Umum/ Pendidikan Tehnik	97
Statistik Tm/SD/SLTP/SLTA/AAN	99
Statistik Persekolahan Nasional Katholik	101
Statistik keadaan S.TK & SD/Madrasah/Pesantren	102
Statistik keadaan Mahasiswa APDN	103
Statistik Keadaan Alumni APDN	104
Statistik Keadaan S.TK & SD Sekolah Kristen	105
Statistik Sekolah-sekolah di Maluku	106
Statistik Keadaan Sekolah Muhammadiyah	107

B A B I

P E N D A H U L U A N

A. LATAR BELAKANG BUDAYA MASYARAKAT.

Kepulauan Maluku dengan penduduknya, sepanjang sejarahnya pernah mengalami pengaruh berbagai aliran atau arus budaya, agama dan kepercayaan. Berbagai latar belakang budaya pernah hidup di daerah ini. Kehidupan budaya masyarakat dapat dilihat sejak zaman prasejarah hingga zaman dewasa ini. Bahkan daerah ini pernah mengalami puncak-puncak budaya yang pernah terjadi pada masa lampau.

Pertumbuhan dan perkembangan budaya tertua telah dimulai pada zaman prasejarah dan zaman kuno. Pada zaman ini telah diletakan dasar-dasar kehidupan kemasyarakatan dan pemerintahan yang teratur yang kemudian berkembang menjadi kesatuan-kesatuan) kenegaraan yang berpengaruh sebelum kedatangan bangsa-bangsa Eropa pada abad ke-16. 1)

Kedatangan bangsa Eropa dengan peradaban Baratnya kemudian mempengaruhi kebudayaan tradisional tersebut dan membawa perubahan-perubahan pula. Bahkan pola kebudayaan lama atau tradisional itu didesak dan dicoba diganti dengan pola kebudayaan mereka. Pengaruh-pengaruh asing yang masuk dan mempengaruhi kehidupan kemasyarakatan antara lain pengaruh dari orang-orang Portugis, Belanda, Inggris dan terakhir ialah bangsa Jepang.

Pada zaman prasejarah di daerah Maluku telah ada betuk-betuk kehidupan budaya. Kehidupan Mesolitik dijumpai orang berupa kehidupan di gua-gua yang bekas-bekasnya terdapat di pulau Seram dan pulau Kei. Pada zaman Neolitik kehidupan mengembara serta berburu telah berubah menjadi kehidupan bercocok tanam. Masyarakat sudah mengenal pertanian yang sederhana dalam bentuk pengerjaan tanah tegalan atau huma. Dan erat sekali hubungannya dengan mata pencaharian bercocok tanam ini ialah usaha peternakan. Pada waktu itu masyarakat sudah mulai membangun rumah dalam betuk rumah gantung. Dari penemuan jenis-jenis kapak dan bahan tembikar diduga masyarakat sudah mengenal perdagangan meskipun dengan cara tukar menukar. Masyarakat juga sudah mengenal pakaian yang dibuat dari kulit kayu. Mereka juga sudah mengenal alat-alat rumah tangga seperti periuk belanga dan alat-alat dari tembikar.

Kepercayaan terhadap kekuatan-kekuatan gaib seperti pada batu-batuan, pohon-pohon dan terutama terhadap roh-roh nenek moyang yang sudah pula dikenal. Dalam hubungan dengan kehidupan bercocok tanam, maka pengetahuan tentang waktu dan musim yang lazim termasuk pengetahuan perbintangan atau astronomi juga telah dikenal masyarakat.

Baik kehidupan bertempat tinggal tetap maupun bercocok tanam memerlukan suatu pemerintahan yang teratur. Seorang pemimpin dengan sifat-sifat kepemimpinan harus sudah ada dan berlandaskan peraturan-peraturan yang telah dibuat. Semuanya ini sudah dimiliki masyarakat pada waktu itu.

Selanjutnya kebudayaan mengenai logam dan akibat-akibatnya bagi perkembangan kebudayaan sudah pula dimiliki oleh masyarakat. Peninggalan-peninggalan kebudayaan perunggu besi berupa kapak-kapak corong (sepatu), nekara atau genderang, ala-alat perhiasan yang berupa gelang-gelang, kalung dan arca dijumpai orang di mana-mana, antara lain di kepulauan Maluku Tenggara, Seram dan Halmahera.

Mengenai peninggalan-peninggalan Megalitik dijumpai pula di seluruh Maluku. Umumnya yang dijumpai di sini memperlihatkan corak yang sama dengan daerah-daerah lain di Indonesia, yaitu suatu tradisi membangun tempat-tempat pemujaan dari batu berbentuk meja batu, batu berdiri dan bangunan berundak. Tradisi membangun tempat-tempat pemujaan ini biasanya ditujukan untuk menghormati arwah-arwah nenek moyang atau orang yang telah meninggal. Biasanya ditempatkan pada tempat-tempat bersejarah dan dianggap keramat. Penduduk menganggap meja batu itu sebagai "batu pamali" yang menjadi lambang pertalian antara masyarakat dengan datuk-datuknya. Selain meja batu, terdapat pula bangunan-bangunan berupa "kuburan batu" yaitu tempat pemakaman para pemimpin dan keluarganya.

Kehidupan seni budaya sudah nampak dengan jelas dan bentuk-bentuknya dapat dilihat berupa lukisan-lukisan pada dinding gua dengan ciri-ciri khusus seperti gambar telapak tangan dan gambar berbagai jenis binatang. Semuanya menyangkut alam kepercayaan. Alat-alat kerja seperti kapak kapak lonjong dan persegi dan

kapak sepatu telah dibuat dalam bentuk yang hujus dan licin dan berukiran. Masyarakat juga telah mengenal berbagai perhiasan tubuh seperti gelang-gelang dan kalung dari batu indah, kerang dan bahan perunggu atau kuningan. Kepandaian mematum juga sudah menjadi milik mereka. Masyarakat sudah berpakaian dengan bahannya dari kulit kayu atau tenunan yang juga diberi lukisan-lukisan dan motif-motif bergambar.

Mengenai alam pikiran dan kepercayaan semuanya berkisar pada alam atau kekuatan gaib dan dunia kematian. Pemujaan roh nenek moyang mengambil peranan penting dalam kehidupan ke rohanian.

Penurunan jiwa seni dan ketrampilan membuat barang-barang keperluan hidup di atas serta alam pikiran dan kepercayaan tersebut tentu melalui suatu pendidikan tradisional yang diturunkan dari orang tua kepada anak-anak dan seterusnya.

Pada Zaman Kuno kira-kira abad ke-V- 1500 Masehi dasar-dasar kehidupan budaya pada zaman prasejarah terus sehingga akhirnya mengambil suatu pola kehidupan masyarakat yang lebih mantap seperti nyata terlihat dalam segi-segi kehidupan pemerintahan dan kenegaraan (politik), penyelenggaraan hidup dalam masyarakat, kehidupan seni budaya dan kepercayaan. pada zaman kuno sebelum datangnya bangsa-bangsa Barat ke daerah Maluku pada umumnya penduduk berdiam di daerah-daerah pedalaman dan di gunung-gunung dalam bentuk kesatuan-kesatuan masyarakat hukum genealogis yang patrilineal. Kelompok-kelompok sosial yang genealogis itu bertumbuh makin lama makin maju dan akhirnya berkembang menjadi bentuk struktur politik yang nyata. Di daerah Maluku Tengah dan Maluku Tenggara bentuk ini dikenal sebagai **Patrician Republics** atau **Dorps Republieken** yaitu republik-republik desa yang dikuasai satu kuasa rejim artistokrasi. Di Maluku Utara bentuk pemerintahan adalah monarkhi. 2) Monarkhi ini berkembang dari kesatuan-kesatuan politik dan masyarakat yang lebih kecil yaitu masyarakat **Dukuh** dan **Boedan** yang dikepalai oleh **Tomanjira** dan **Kolano**. Pada abad ke-14 muncul empat kerajaan dengan kepala pemerintahan seorang sultan, yaitu Kerajaan Ternate, Tidore, Bacan dan Jailolo. Karena perdagangan rempah-rempah keempat kerajaan tersebut menjadi makmur dan mencapai puncak kemegahan. Kerajaan Ternate dan Tidore kemudian menjadi lebih terkenal dengan wilayah-wilayah pengaruh yang luas di Indonesia Timur. Di Maluku Tenggara dan Tengah, kesatuan masyarakat yang kecil yaitu **Negeri** atau kampung berkembang menjadi semacam republik-republik desa yang otonom dengan kepala pemerintahan ialah seorang raja yang digelar **Upu Latu** atau **Patti**. Beberapa negeri kemudian bergabung dan berkembang menjadi kesatuan politis yang lebih besar yang terkenal sebagai **Uli** atau suatu perserikatan. Ada dua yang terkenal yaitu **Uli Siwa** dan **Uli Lima**, yaitu perserikatan sembilan dan perserikatan lima. 3)

Disamping kepala-kepala pemerintahan tersebut terdapat pula lembaga-lembaga demokrasi seperti di Maluku Utara ialah dewan **Sowa-Siwa** dan di Maluku Tengah dan Tenggara ialah dewan **Santri**. Masyarakat pada umumnya bersifat

feodal. Setelah masuknya agama Islam pada abad ke-15, maka dalam struktur pemerintahan lama ini terjadilah beberapa perubahan.

Kehidupan perekonomian pada umumnya masih bergantung pada pemberian alam sekitar. Pertanian yang diusahakan adalah semata-mata untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari. Tanaman perdagangan belum diusahakan. Namun suatu pengawasan dan pengaturan tertib ekonomi sudah dikenal oleh masyarakat seperti terbukti dari adanya **Dewan kewano** yang berfungsi mengatur hal itu,. Dewan Kewano yaitu aparat pengawas dalam bidang ekonomi yang terdiri dari **Kewang**. Perdagangan pada masa itu masih dalam tingkat tukar-menukar keperluan hidup (**barter**).

Kehidupan seni budaya bertambah maju setelah mendapat pengaruh-pengaruh dari luar (pengaruh asing). Kemajuan nampak dalam berbagai bidang kesenian antara lain seni suara, seni tari, seni rupadan seni menghias. Dalam seni bangunan orang sudah membuat bangunan besar dan bersifat umum seperti **Rumah Balleu** dan **Rumah Raja** serta rumah rumah adat lainnya. Alam pikiran dan kepercayaan tetap bersifat animisme dan dinamisme.

Pada abad ke-15 agama Islam dan pengaruhnya masuk ke daerah Maluku. 4)

Masuknya agama Islam itu jelas melalui pedagang-pedagang dan mubalig-mubalig Islam yang ikut bersama-sama mereka. Mereka datang dari Jawa, Sumatra dan Maluku. Agama Islam ini mula-mula dianut oleh pejabat-pejabat di istana bersama keluarga mereka. Kemudian diikuti oleh lapisan-lapisan masyarakat lainnya, mulai dari para bangsawan dan keluarga mereka.

Diperkenalkannya agama Islam kepada penduduk di pelabuhan Hitu, Ternate dan tempat-tempat lainnya di kepulauan Maluku, mengakibatkan timbulnya proses Islamisasi. Proses religius kultural tersebut juga berpengaruh kepada bidang politik, sehingga terbentuklah kerajaan-kerajaan bercorak Islam di Maluku Utara dan sangat berpengaruh di bidang politik, pelayaran dan perdagangan. Proses Islamisasi ini jelsa terlihat dalam perkembangan agama Islam itu sendiri. 5) Syariat-syariat agama Islam memperkaya hukum adat setempat. Seringkali terlihat unsur-unsur hukum Islam bergandengan dengan hukum-hukum adat. Bersamaan dengan perkembangan Islam itu sendiri, bahasa dan huruf Arab lambat laun dipakai sedikit demi sedikit oleh raja-raja, bangsawan-bangsawan dan penduduk penganut Islam hingga memperkaya bahasa-bahasa daerah. Mesjid sebagai bangunan-bangunan sakral dari agama Islam mulai dikenal Maluku. Dengan demikian dilihat dari segi kultural, maka agama Islam turut menentukan corak kebudayaan di daerah Maluku, yaitu kebudayaan yang bercorak Islam.

Pada permulaan abad ke-16 bangsa-bangsa Eropa masuk ke daerah ini. Bersama mereka masuk pula agama Kristen dan pengaruhnya. Proses penyebaran agama Kristen di Maluku dapat dibagi dalam dua tahap yaitu tahap penyebaran agama Kristen Katolik oleh orang Portugis dan tahap penyebaran agama Kristen Protestan oleh orang Belanda.

Kehadiran orang-orang Portugis di Maluku pada permulaan abad ke-16 merupakan pertemuan pertama antara bangsa Barat dengan orang-orang Maluku. Pertemuan ini membawa konsekuensi baru pula setelah beberapa saat sebelumnya mereka berkenalan dengan agama Islam. Kehadiran mereka turut membawa suatu kebudayaan baru, yaitu agama Kristen dan kebudayaan barat. Agama Kristen Katolik berhasil ditanamkan oleh para misionaris Portugis dan pegawai-pegawai pribumi. Agama ini kemudian berkembang dengan pesat di pulau Ambon dan daerah-daerah sekitarnya. 6)

Selain penyebaran agama, orang-orang Portugis terlibat pula dalam soal-soal politik dan perdagangan. Dualisme dalam tugas mereka ini menimbulkan banyak peperangan-peperangan dengan rakyat Maluku. 7) Namun selama hampir satu abad mereka menduduki kepulauan Maluku, pengaruh budaya mereka juga ditinggalkan dan nyata dalam kehidupan masyarakat setempat. Hal ini jelas terlihat dalam segi-segi pergaulan hidup seperti bahasa, tata cara pergaulan, peribadatan dan lain-lain. 8)

Setelah berakhirnya kekuasaan Portugis di Maluku pada tahun 1605, maka pada permulaan abad ke-17 kelanjutan pengaruh Barat berlangsung di dalam situasi politik yang baru, yaitu penguasaan oleh orang-orang Belanda. Mereka ini membawa pula perubahan dan perkembangan-perkembangan baru. Agama Roma Katolik yang telah ditanam oleh orang Portugis diganti dengan agama Kristen Protestan. Dalam bidang politik dan perekonomian, orang-orang Belanda mulai berusaha dengan keras untuk menanamkan pengaruhnya. 9) Dengan politik imperialisisme dan kolonialismenya, Belanda berhasil menduduki daerah Maluku selama tiga setengah abad dan menanam pengaruh budayanya, baik dalam bidang politik, perekonomian, kemasyarakatan dan pendidikan.

B. PERKEMBANGAN PENDIDIKAN SECARA GARIS BESAR.

Bahwa pendidikan zaman sekarang jika dibandingkan dengan zaman penjajahan ternyata terdapat perbedaan yang sangat besar, baik di dalam isi pelajaran maupun kuantitasnya. Di zaman penjajahan terdapat di Maluku sekolah-sekolah dasar yang berbahasa Melayu dan ada pula yang berbahasa Belanda yaitu **Hollands Inlandse School** (HIS). Yang berbahasa Melayu disediakan bagi anak-anak rakyat biasa, sedangkan yang berbahasa Belanda bagi anak-anak golongan atasan, orang-orang kaya dan pegawai negeri. Ada sekolah 3 tahun, 5 tahun dan 6 tahun. Tidak semua desa mempunyai sekolah. Ada sekolah-sekolah negeri, ada pula sekolah-sekolah swasta antara lain milik gereja Protestan, (misalnya Naskat, nama ini baru dipakai sekitar tahun 1960), Gereja Roma Katolik dan satu dua badan swasta lainnya (misalnya : Sekolah Balai Pendidikan).

Pendidikan bagi masyarakat Islam kurang mendapat perhatian baik dari pihak pemerintah maupun dari pihak masyarakat Islam sendiri. Anak-anak hanya me-

ngunjungi langgar-langgar. Prosentasi buta huruf Latin di kalangan golongan ini sangat besar pada waktu itu. Pada umumnya di Maluku sebelum Perang Dunia, hanya rakyat Kristenlah yang memperhatikan kemajuan-kemajuan melalui pendidikan. Akan tetapi pendidikan lanjutan sangat terbatas, sehingga rakyat hanya tamat Sekolah Dasar.

Kegiatan pendidikan dan kebudayaan nampak nyata hanya di kota-kota pusat pemerintahan setempat. Dan untuk daerah Maluku, kota Ambon dari masa penjajahan sampai sekarang, selalu menjadi pusat kegiatan pendidikan dan kebudayaan. 10) Sampai tahun 1941 terdapat di kota Ambon : dua buah Sekolah Dasar (SD) enam tahun berbahasa Melayu. Terdapat juga sekolah-sekolah dasar tujuh tahun yang berbahasa Belanda, yang diperuntukkan bagi anak-anak Indonesia yaitu **Ambonse Burgerschool**, tiga buah HIS Kristen bersubsidi, HIS Balai Pendidikan, Sekolah Alkitab bagi anak-anak turunan Arab dan satu HIS swasta lain, dan sebuah **Schakelschool**, yaitu Sekolah Dasar peralihan bagi murid-murid yang berbahasa Melayu yang hendak melanjutkan pengetahuannya ke sekolah yang berbahasa Belanda.

Bagi anak-anak Belanda, peranakan Belanda, **gelijkgestelde Ambonnezen** (orang Ambon yang berkedudukan hukumnya disamakan dengan orang Belanda) dan anak-anak Indonesia dari golongan inteligensia, disediakan tiga buah **Europese Lagere School**. Di samping itu ada beberapa sekolah lanjutan misalnya **Kopschool** yaitu sekolah untuk kerajinan kewanitaan, sebuah sekolah pertukangan dua tahun yaitu : **Ambonsche School** dan sebuah **Normaal School**, yaitu Sekolah guru untuk calon-calon guru S.D. Melayu. Di luar kota Ambon tidak ada sekolah-sekolah lanjutan.

Satu-satunya sekolah yang tertinggi di seluruh Maluku yaitu di Ambon adalah sebuah MULO (**Meer Uitgebreid Lager Onderwijs**), yang menerima murid-murid lulusan HIS. Lamanya bersekolah ialah 3 tahun, ditambah satu kelas persiapan (**Voorklas**) menjadi 4 tahun. Sebuah sekolah guru negeri (**Kweekschool**) di Ambon diperuntukkan bagi pemuda-pemuda dari Indonesia Timur seperti dari Makassar, Timor, Menado, Gorontalo dan Maluku untuk menjadi guru HIS. Sejak tahun 1934 sekolah itu ditutup karena penghematan. Tokoh-tokoh pemuda yang pernah belajar di **Kweekschool** Ambon misalnya: J.A.Dias, H.A.Risakotta, C.Pieter, dan Arie Frederik Lasut yang kemudian diangkat oleh Pemerintah R.I. sebagai Pahlawan Nasional, karena jasanya pada bidang geologi. Murid-muridnya dipindahkan ke **Kweekschool** Yogyakarta dan Bandung. Selain dari pada itu Gereja Protestan mempunyai dua buah sekolah pendeta yaitu **STOVIL** dan sekolah Guru Djemat. Sesudah Perang Dunia II dibuka sekolah dasar-sekolah dasar berbahasa Indonesia dan Belanda lebih banyak. Di kota Ambon dibuka **Herstel MULO** yang kemudian diintegrasikan ke dalam **Middelbare School** (MS) pada tahun 1947. Pada tahun 1946 dibuka sebuah **Algemene Middelbare School** (AMS) dan sebuah Sekolah Menengah (SM 4 tahun berbahasa Indonesia). Juga sebuah sekolah **Normaal**, sebuah Sekolah Pertukangan dua tahun dan sebuah Sekolah Kepandaian Puteri. Pada tahun 1947 sebuah sekolah guru **Kweekschool Nieuwe Stijl**. Pada tahun 1948 sebuah

Hoofd Acte Cursus yaitu kursus bagi guru-guru untuk menjadi kepala sekolah di HIS. di luar kota Ambon ada S.M. di Saparua, Ternate dan Tual. Juga kemudian dibuka *Normaalschool* di Saparua yang merupakan kota pendidikan.

Demikianlah hasil usaha kaum kolonial Belanda selama 350 tahun di bidang pendidikan di Maluku. Sebelumnya yaitu sejak permulaan abad ke-17, mereka sudah memberi pelajaran kepada anak-anak rakyat secara Barat, walaupun masih terbatas pada sekolah-sekolah agama. Sebenarnya hasil yang harus dicapai seharusnya yang lebih besar dari pada apa yang dicatat di atas.

Akibat dari pada politik pendidikan yang kolonialistis itu, yang tidak membuka perspektif kepada rakyat, maka setiap tahun beratus-ratus pemuda pelajar meninggalkan daerah Maluku untuk belajar ke Makassar (Sulawesi) dan kota-kota besar di pulau Jawa. Selamat mereka, tidaklah dapat mereka kembali karena pemerintahan Belanda tidak menciptakan obyek-obyek ekonomi dan obyek-obyek pekerjaan di Maluku untuk menampung mereka. Dari desa-desa para pemuda direkrut untuk menjadi serdadu, polisi dan marine. Dengan demikian setiap tahun terjadi eksodus yang cukup besar. Maluku kehilangan tenaga-tenaga pembangunan masyarakat.

Setelah bangsa Indonesia mendapat kembali kemerdekaannya dari penjajahan Belanda, maka politik pendidikan yang kolonialistis itu diubah sama sekali dan disesuaikan dengan suasana kemerdekaan. Dari kota Ambon diorganisasi suatu jaringan aktivitas pendidikan dan kebudayaan pengawasan atas mutu pendidikan dan pengajaran, pembentukan suatu watak nasional yang berdasarkan Pancasila di seluruh Propinsi Maluku. Sejak tahun 1951 kota Ambon menjadi pusat kedudukan pimpinan pendidikan, pengajaran dan kebudayaan dalam iklim kemerdekaan. Mulailah disusun organisasi pendidikan menurut tuntutan masa. Setiap kali diperluas dan disempurnakan sesuai dengan perkembangan sekolah-sekolah, kebudayaan dan usaha-usaha kemasyarakatan seperti: pemberantasan buta huruf, pendidikan orang dewasa, pembangunan desa-desa, peningkatan kegiatan olah raga, kesenian dan lain-lain. Ternyata ada pula beberapa Inspeksi/Pengawasan Pendidikan yang berpusat di Ambon yang meliputi seluruh Daerah Indonesia Timur, misalnya Pengawasan Pendidikan Menengah Ekonomi, sampai tahun 1960 masih dipegang oleh Siahailatua Oce. 11) Semua rencana pendidikan ditujukan untuk mempertinggi kecerdasan seluruh rakyat agar tercapailah kesejahteraan spiritual maupun material.

Akibat dari usaha-usaha pendidikan pada zaman kemerdekaan ini ialah bahwa kesadaran kesatuan nasional Indonesia dan kesadaran bernegara Pancasila, telah tertanam di dalam masyarakat terutama di dalam jiwa generasi muda. Sementara itu perlu dikemukakan, bahwa sebenarnya pada waktu Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 diumumkan, pengaruhnya juga sampai di Maluku. Puncak-puncak pendidikan dan kebudayaan juga mempengaruhi kehidupan masyarakat dan terutama sekolah-sekolah yang menuju rasa persatuan sebagai Bangsa Indonesia, antara lain: Lagu Indonesia Raya, Pekik Merdeka, Bendera Merah Putih, Sumpah

Pemuda dan Bahasa Indonesia. 12)

Sementara itu buta huruf telah dapat dikurangi. Perluasan sekolah-sekolah dapat dilihat pada statistik terlampir (Nomor 1,2). Namun sebagai akibat dari perkembangan pendidikan yang sangat cepat, timbul masalah-masalah baru yang perlu ditanggulangi dengan jiwa dan semangat pembangunan.

B A B II

PENDIDIKAN TRADISIONAL

A. KEBUDAYAAN NEOLITIS.

Sejarah pendidikan di tanah air kita dimulai pada zaman berkembangnya agama-agama dunia yang masuk di Indonesia. Dapat dikatakan bahwa lembaga-lembaga pendidikan dilahirkan oleh lembaga-lembaga agama dan mata pelajaran yang tertua adalah pelajaran tentang agama. 1) Dengan demikian secara historis pendidikan itu dimulai pada zaman pengaruh agama Hindu-Budha, agama Islam dan kemudian agama Kristen yang masuk bersama-sama dengan bangsa Barat ke Indonesia. Namun sebelum kedatangan dan pengaruh agama-agama tersebut, maka masyarakat di Indonesia sudah mempunyai suatu kebudayaan yang disebut kebudayaan asli. Kebudayaan ini disebut juga kebudayaan neolitik dengan ciri-cirinya :

1. Sebagai kebudayaan maritim
2. Kepercayaan masyarakatnya adalah animistik dan dinamis
3. Masyarakatnya adalah masyarakat gotong-royong.

Pada waktu itu pendidikan berlangsung dalam lingkungan keluarga sesuai dengan kebutuhan karena masyarakat masih serba sederhana dan bersahaja. Yang menjadi pendidik terutama sekali ayah dan ibu. Ayah mengajarkan pengetahuan dan kepandaian yang ada padanya kepada anak laki-laki dan ibu berbuat demikian

anak-anak perempuan. Masyarakat adalah masyarakat gotong royong. Pada waktu itu belum ada lapisan bangsawan dan masyarakat tidak berlapis. Namun dalam masyarakat sudah ada unsur kepemimpinan. Ketua adat merupakan pemimpin masyarakat. Ia dianggap tetap mempunyai kewajiban serupa dengan anggota-anggota lainnya. Tujuan pendidikan waktu itu ialah supaya anak-anak kelak dapat memegang kekuasaan dalam masyarakat sebagai manusia yang mempunyai kecakapan istimewa. 2) Manusia yang dicita-citakan adalah :

1. Manusia yang mempunyai semangat gotong royong.
2. Manusia yang menghormati pemimpinnya.
3. Manusia yang taat akan adat.

Masyarakat tradisional yang digambarkan di atas yang pada umumnya terdapat di seluruh daerah di Indonesia dijumpai pula di daerah Maluku dengan ciri-cirinya yang khusus pula. 3)

Pada zaman Hindu dan pengaruhnya, masyarakat tersebut di atas itu berubah menjadi masyarakat feodal, ialah masyarakat yang terbagi atas beberapa tingkatan. Seperti terdapat di pulau Jawa, Bali dan Sumatera. Pendidikan disesuaikan dengan keadaan agama Hindu dan Budha dan sistemnya mengikuti cara kehidupan masyarakat Hindu itu sendiri. Di daerah Maluku pengaruh agama Hindu dan Budha itu tidak nampak dengan jelas dalam kehidupan masyarakat. Bahkan dapat dikatakan bahwa kedua agama ini tidak ada pengaruhnya di Maluku jika dibandingkan dengan agama Islam dan agama Kristen.

B. PENGARUH AGAMA ISLAM.

Agama Islam yang masuk di Indonesia sekitar abad ke-14, merupakan tenaga baru yang penting sekali artinya bagi perkembangan pendidikan dan kebudayaan pada umumnya. Masuknya agama Islam di Kepulauan Maluku diperkirakan sekitar pertengahan abad ke-15 dan pengaruh agama ini sudah nyata dalam masyarakat pada permulaan abad ke-16. 4)

Agama ini dibawa melalui pedagang-pedagang Islam dari Jawa dan Malaka dan kemudian disebar-luaskan oleh para mubalig Islam yang turut serta dengan mereka. Penyiaran agama Islam ini dimulai dari pusat-pusat perdagangan di Maluku, yaitu dari bandar-bandar niaga Ternate, Hitu dan Banda. Dari pusat-pusat niaga inilah Agama Islam kemudian dibawa ke pelosok-pelosok wilayah Maluku. Pada mulanya agama ini diterima dan dipeluk oleh pimpinan masyarakat setempat, yaitu para Kulano dan keluarganya di Maluku Utara dan raja-raja beserta keluarga mereka di Maluku Tengah dan Tenggara. Masyarakat luas kemudian mengikuti jejak pemimpin mereka ini dan dengan kerja dan usaha yang keras dari para mubalig Islam akhirnya agama Islam menjadi milik budaya sebagian besar rakyat Maluku.

Kedatangan orang-orang Islam dengan memperkenalkan agamanya kepada penduduk-penduduk di pelabuhan Hitu, Ternate, Banda dan tempat-tempat lainnya di kepulauan Maluku, menyebabkan timbulnya proses Islamisasi. Proses religius kultural tersebut berpengaruh dalam bidang-bidang politik, ekonomi, seni budaya,

bahasa dan agama itu sendiri. Dalam bidang politik muncul kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam misalnya di Maluku Utara ialah kerajaan Ternate, Tidore, Bacan dan Jailolo. Dan kerajaan Hitu di pulau Ambon kerajaan Iha di Saparua, kerajaan Alaka di pulau Haruku, kerajaan Sahulau di Seram Selatan dan kerajaan Luhu di Seram Barat. Kerajaan-kerajaan Islam tersebut memegang peranan yang penting dalam dunia perdagangan dan politik di Indonesia pada waktu itu. Para Imam dan guru-guru agama Islam sekurang-kurangnya memperkaya kebudayaan dan kerohanian darimasyarakat. Syarat-syarat agama Islam dipelajari orang yang berarti pula sedikit banyak memperkaya hukum-hukum adat setempat. Unsur-unsur hukum Islam bergandengan dengan hukum adat dalam praktek-praktek hukum dalam masyarakat. Bersamaan dengan perkembangan Islam itu sendiri, bahasa dan huruf Arab dipakai sedikit demi sedikit oleh raja-raja, bangsawan-bangsawan dan penduduk penganut Islam hingga memperkaya bahasa-bahasa daerah. Mesjid sebagai bangunan-bangunan sakral Islam mulai dikenal di Maluku dan juga merupakan pusat dan tempat pengkajian agama Islam itu sendiri.

Pada mulanya pendidikan agama Islam ini diselenggarakan di rumah-rumah dari para ulama Islam. Di sini anak dididik bagaimana mengenal dan membaca kitab suci Al-Quran secara sederhana dan menulis dengan huruf Arab. Kemudian pendidikan ini mulai dilaksanakan lebih efisien di lembaga-lembaga pendidikan yaitu di **langgar** dan **pesantren**. Pendidikan di langgar ini diselenggarakan secara sederhana dan lebih mendalam diberikan di pesantren.

Pengajaran di langgar merupakan pengajaran agama permulaan. Mula-mula murid-murid mempelajari abjad Arab kemudian mengeja ayat-ayat Quran dengan irama suara tertentu. Pelajaran diberikan dengan sistem **sekepala**. Guru menyebutkan sesuatu dan muridnya menirunya. Yang dicita-ciakan ialah dapat membaca Quran sampai tamat. Yang menjadi guru adalah seseorang yang sudah memiliki pengetahuan agama yang mendalam. Guru itu dipandang sebagai seorang yang sakti. Kadang-kadang tugas guru itu dilakukan juga oleh seorang haji dari desanya. Umumnya para haji itu memberi pelajaran tidak di langgar akan tetapi di rumahnya. Sebagai seorang haji ia termasuk orang terkemuka di desa. Rumahnya cukup besar dengan serambi yang luas dan di sinilah para pelajar mendapat pelajaran agama.

Lamanya menuntut pelajaran di langgar tidak tentu. Biasanya berlangsung kurang lebih setahun, tapi kadang-kadang hanya diikuti selama beberapa bulan saja. Pelajaran diberikan pada pagi hari dan malam hari. Uang sekolah tidak dipungut. Hanya pada waktu seorang anak dibawa ke langgar biasanya orang tua membawa sesuatu hadiah, makanan atau uang. Bila seorang murid sudah menamatkan pelajarannya dalam arti sudah dapat membaca Quran sampai tamat, maka diadakanlah selamatan. Guru agama ini sering kali menerima sebagian dari zakat fitrah.

Sebagai lembaga sosial langgar itu penting artinya. Anak-anak rakyat lambat laun menyadari menjadi anggota persekutuan besar, yakni persekutuan umat Islam. Hubungan batin antara guru dan murid selama berlangsungnya pendidikan,

biasanya bertumbuh menjadi hubungan yang erat dan mesra.

Pengajaran lebih lanjut dan lebih mendalam diberikan di pesantren. Murid-muridnya dinamakan santri dan pada umumnya terdiri dari anak-anak yang telah memiliki pengetahuan dasar yang diperoleh di langgar. Pusat pendidikan ini merupakan sebuah asrama atau pondok dan menerima parasantri dari berbagai tempat atau desa. Berdekatan dengan pesantren ini ada sebuah mesjid dan rumah guru. Guru ini disebut Kiyai. Ada kalanya ia menerima sumbangan ala kadar dari murid-muridnya berupa uang atau bahan makanan. Sumbangan tersebut bersifat sukarela. Lama belajar di pesantren tidak tentu. Kadang-kadang lebih dari satu tahun bahkan ada yang sampai sepuluh tahun. Pada tingkat tertinggi, pelajaran diberikan dengan sistem klasikal. Mata pelajaran yang terpenting ialah: 5)

1. **Usuluddin** (pokok-pokok ajaran kepercayaan)
2. **Usul Fiqh** (alat penggali hukum dari Quran dan Hadits).
3. **Fiqh** (cabang dari Usuluddin)
4. **Ilmu Arabiyah** (untuk mendalami bahasa agama).

Pada umumnya pendidikan yang bercorak Islam di daerah Maluku sampai dengan pendidikan yang bercorak Barat yang diwajibkan pemerintah kolonial Belanda pada permulaan abad ke-duapuluh, ditangani dan diasuh di langgar-langgar pada desa-desa yang penduduknya beragama Islam.

B A B III

PENDIDIKAN BARAT

A. PENGARUH PORTUGIS.

1. Masuknya Portugis ke Maluku.

Pada permulaan abad ke-16 datang ke Maluku bangsa Eropa pertama yakni bangsa Portugis, yang kemudian disusul oleh bangsa Spanyol. Pada akhir abad ke-16 dan permulaan abad ke-17 menyusul pula bangsa Belanda dan Inggris. Bangsa-bangsa Barat ini datang selain untuk berdagang, juga untuk mengembangkan agama Kristen. Bangsa Portugis menduduki kepulauan Maluku hampir satu abad lamanya sedangkan bangsa Belanda mendekati tiga setengah abad. Bangsa Spanyol dan Inggris tidak berhasil menguasai kepulauan Maluku untuk waktu yang lama. Selama pendudukan bangsa-bangsa Barat ini, mereka berhasil juga menanamkan pengaruh kebudayaannya melalui pendidikan dan pengajaran.

Orang-orang Portugis yang tiba di kepulauan Maluku adalah para pedagang dan juga sekaligus sebagai penyebar-penyebar agama Kristen Roma Katolik. Melihat tujuan dari kedatangan mereka, maka jelaslah bahwa dalam pendidikan yang mereka selenggarakan faktor keagamaanlah yang juga merupakan faktor penting di samping faktor ekonomi. Bahkan pendidikan agamalah yang mereka pentingkan dan lebih diutamakan. Dapat dikatakan bahwa pendidikan yang mereka selenggarakan di Maluku sejalan dengan penginjilan atau pendidikan sebagai alat pembantu dalam penyebaran agama. Pendidikan agama Kristen pada masa Portugis senantiasa berdasar pada dogma-dogma Katolik. Gerak pendidikan pada masa ini adalah corak pendidikan keagamaan yang tidak disertai unsur-unsur pendidikan lainnya. Sampai penyerahan daerah Maluku ke tangan bangsa Belanda, pendidikan umum tidak berkembang. Namun demikian pendidikan yang diselenggarakan Portugis itu telah mempunyai pengaruh di daerah Maluku. Bahkan pendidikan yang merekaintis itu telah meletakkan dasar-dasar bagi pendidikan Barat yang lebih bersifat umum yang berkembang kemudian pada masa Belanda.

2. Usaha dan Pengaruh Pendidikan.

Pendidikan pada masa Portugis dimulai bersama-sama dengan pengkristenan orang-orang Ambon. Tapi semuanya ini di jalankan dengan motif-motif tertentu yang mempengaruhi usaha-usaha tersebut seperti motif-motif politik dan ekonomi yang bercampur baur dengan motif keagamaan. Dengan demikian usaha-usaha Portugis itu tidak terlalu berhasil dan berpengaruh besar di daerah ini oleh karena kehadiran mereka menimbulkan berbagai macam ketegangan baik ketegangan politik maupun ketegangan ekonomi. 1)

Seperti telah dikatakan di atas corak pendidikan agama Kristen pada masa Portugis senantiasa pada agama Katolik. Di dalam proses ini sendiri penetrapan ajaran-ajaran Katolik pun tidak pernah dimatangkan atau dipahami serta dapat mendewasakan orang-orang Kristen dalam tanggungjawabnya. Sebab yang menjadi tujuan utama bagi pengkristenan yang dilakukan oleh orang-orang Portugis ialah tidak pertama-tama menyiarkan firman Allah, tetapi berusaha untuk menanamkan dan mempropagandakan gereja sendiri. 2) Selain itu pendidikan ini mempunyai motif untuk menguasai bidang perdagangan dengan maksud memperoleh rempah-rempah.

Meskipun begitu tidak dapat disangkal bahwa pendidikan agama telah tertanam di dalam jiwa pemeluk-pemeluk agama yang baru ini. Pendidikan lebih banyak dilaksanakan melalui sistem penyebaran agama. Hal ini dapat dilihat pada keterangan-keterangan yang ditulis oleh Paderi Fransiscus Xaverius dalam surat-suratnya yang ditujukan kepada rekan-rekannya. Dialah yang menetapkan metode-metode misi secara baik dan mengajarkan kepada kawan-kawannya untuk mempergunakan metode pendidikannya itu tugas mereka. Beberapa peraturan yang ia buat dapat dicatat sebagai berikut :

- a. Setiap hari orang meneruskan pengajaran agama di dalam gereja.
- b. Mempelajari pengakuan-pengakuan iman yang telah disusun secara ringkas.
- c. Orang yang baru berpindah agama supaya menghafalkan doa-doa.
- d. Setiap malam di lapangan umum orang mendoakan jiwa-jiwa yang ada di api penyucian dan mereka yang hidup dalam dosa.
- e. Supaya menyesuaikan diri dengan kecakapan-kecakapan orang-orang yang baru saja bertobat kepada iman Kristen, agar mereka dapat mengerti semuanya.

Dengan sendirinya orang-orang yang hendak dibaptis itu harus mempelajari **Credo** (Pengakuan Rasuli), Pengakuan dosa yang **am**, "Bapa Kami", "Salam Maria" dan perintah-perintah. Xaverius sendiri di Malaka sebelum kedatangannya di Indonesia telah dengan susah payah berusaha menterjemahkannya kedalam bahasa Melayu. Menurut ceritera ia dengan tiada lelah-lelahnya sering melintasi kampung-kampung dengan sebuah lonceng di tangannya untuk mengumpulkan orang-orang supaya dapat diberi pengajaran. Bahkan tidak saja pengajarannya melainkan terutama perbuatan-perbuatan dan kebiasaan-kebiasaan tertentu yang mempunyai arti yang besar bagi penduduk yang baru saja memeluk agama Kristen. Arak-arakan dengan membawa salib dan patung-patung dengan serdadu-serdadu dan panji-panji, bahkan di bawah dentuman meriam upacara-upacara baptisan yang meriah, dan apabila mengenai seorang raja maka pegawai-pegawai tinggi sendiri yang bertidak sebagai saksi. Rupa-rupanya banyak juga nyanyian-nyanyian yang di nyanyikan. Ganti nyanyian-nyanyian duniawi, maka anak-anak di lapangan-lapangan umum dan anak-anak serta orang-orang perempuan siang malam di rumah-rumah, pera petani di ladang-ladang dan para nelayan di laut, menyanyikan nyanyian-nyanyian suci seperti **Credo**, Bapa Kami, Salam Maria, perintah-perintah pekerjaan belas kasihan dan pengakuan dosa yang **am** semuanya dalam bahasa mereka. sehingga semuanya mengerti.

Demikianlah usaha-usaha dan teladan dari Fransiscus Xaverius, yang dianggap sebagai peletak batu pertama dari agama Kristen Katolik di Indonesia khususnya di **Maluku**. Ia berpendapat bahwa untuk memperluas penyebaran agama Kristen itu perlu sekali didirikan sekolah-sekolah. Maka pada tahun 1536 didirikan

di Ternate sebuah **seminarie**, yang merupakan sekolah agama bagi anak-anak orang terkemuka. Selain pelajaran agama diberikan juga membaca, menulis dan berhitung. Agaknya di Ambon pada desa-desa atau kampung-kampung yang telah memeluk agama Katolik, diselenggarakan pula pengajaran untuk rakyat yang bersifat umum.

Akibat dari pada banyak pemberontakan-pemberontakan terutama dari Sultan Ternate dan kerajaan Hitu dan juga banyak peperangan yang harus dihadapi dengan orang-orang Spanyol, Inggris dan Belanda, maka pada akhir abad ke-16 tamatlah kekuasaan Portugis di Maluku. Ini berarti pula habisnya riwayat misi Katolik. Misi ini adalah misi negara, artinya para missionaris mendapat jaminan hidup dari negara. Dengan jatuhnya negara maka hilanglah tenaga misi itu, sehingga usaha-usaha pendidikan terpaksa dihentikan.

B. PENDIDIKAN ZAMAN VOC

1. Masuknya Belanda ke Maluku.

Dengan berakhirnya kekuasaan Portugis, maka timbul kekuasaan baru, yakni kekuasaan Belanda. Belandalah yang berhasil mengusir orang-orang Portugis dari Maluku. Belanda datang ke Indonesia dengan tujuan utama untuk berdagang dan agar menjadi kuat membentuk badan perdagangan VOC. Kepada badan dagang inilah pemerintah Belanda memberikan hak dan kekuasaan penuh untuk menjalankan kebijaksanaan-kebijaksanaan di tanah jajahan. Selain tujuan pokok untuk berdagang, mereka merasa bertanggungjawab pula untuk menyebarkan Injil. Namun agama Kristen Katolik yang telah ditanam dan disebarkan oleh orang-orang Portugis itu akan mereka ganti dengan agamanya yaitu agama Kristen Protestan.

Untuk suksesnya rencana pekabaran Injil dan politik mereka, maka menurut pendapat mereka pendidikan adalah cara yang terbaik. Karena itu pendidikan perlu dibina dan dikembangkan. Atas dasar itulah maka sekolah-sekolah didirikan, terutama di daerah-daerah yang dahulu telah dikristenkan oleh bangsa Portugis dan Spanyol seperti Ambon, Ternate dan lain-lain tempat. dengan demikian jelas bahwa tujuan sekolah-sekolah itu semula adalah untuk melaksanakan dan pemeliharaan penyebaran agama Protestan. Dengan kata lain ialah mendidik anak-anak dan mempersiapkan mereka untuk dapat menerima ajaran-ajaran agama yang mereka sebarkan. Jadi belum ada sama sekali rencana pendidikan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat pada waktu itu.

2. Usaha dan Pengaruh Pendidikan.

Sebagai pelaksanaan dari politik tersebut di atas maka didirikanlah sekolah-sekolah. Sekolah pertama didirikan VOC di Ambon pada tahun 1607.4) Pelajaran-pelajaran yang diberikan berupa : membaca, menulis dan sembahyang. Sebagai gurunya diangkat seorang Belanda. Di kemudian hari dikirimkan beberapa anak-anak kepala-kepala pemerintah di Ambon ke negeri Belanda. Setelah dididik mereka kembali sebagai pembantu dan diangkat sebagai guru. Sebagai bahasa pengantar mula-mula ditetapkan bahasa Belanda. Karena timbul berbagai kesulitan, maka akhirnya ditetapkan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di sekolah dan gereja. Pada masa itu bahasa Melayu sudah menjadi bahasa pergaulan di daerah-daerah. Sekolah itu mempunyai murid sekitar 30 atau 40 orang. Murid-murid tersebut

tidak tetap mempunyai sekolah, karena mereka di samping belajar di sekolah harus pula membantu orang tuanya bekerja di kebun atau di rumah. Untuk menghindari hal ini, maka diadakan peraturan bahwa tiap-tiap murid diberikan satu pon beras setiap hari. Rencana pelajaran tidak dibuat orang. Hal ini tidak mengherankan karena sekolah itu mempunyai tujuan keagamaan, bukan bertujuan intelektualistis. Lama belajar yang pasti tidak ditentukan. Murid-murid yang oleh inspeksi dianggap memiliki pengetahuan yang cukup, dikeluarkan dari sekolah. Pengawasan terhadap pengajaran terutama dilakukan oleh pendeta-pendeta. Guru-guru adalah pejabat-pejabat gereja pula. Pada tahun 1617 kepada gubernur dan **Raad van Indie** diberikan kekuasaan untuk mendirikan sekolah-sekolah dan mengembangkan agama Kristen Protestan (**Coloinist**). 5) Dengan demikian maka sekolah-sekolah yang didirikan oleh VOC termasuk dalam pola dan strategi penyebaran agama Kristen Protestan untuk menggantikan agama katolik. Sebagai lanjutan dari pada pembinaan terhadap sekolah-sekolah, maka pada tahun 1684 oleh pemerintah VOC dikeluarkan peraturan-peraturan tersebut yang isinya antara lain :

- a. Sekolah dimulai dengan sembahyang dan menyanyi, demikian pula pada waktu keluar sekolah.
- b. Anak-anak harus belajar sembahyang Bapa Kami Duabelas Kepercayaan Iman Kristen, **Katechismus Heidelberg** dan menyanyikan mazmur.
- c. Belajar membaca, menulis dan berhitung. 6)

Dengan bahan pelajaran tersebut di atas maka pada hakekatnya seluruh situasi pendidikan berlangsung dalam suasana ke agamaan. Pendeta-pendeta merangkap sebagai guru. Gedung gereja adalah juga gedung sekolah. Pendidikan semacam ini adalah pendidikan misioner. Fungsi pendidikan yang lebih luas belum merupakan suatu pemikiran di masa itu. Bagaimana gambaran kegiatan VOC dalam mendirikan sekolah-sekolah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

KEADAAN SEKOLAH-SEKOLAH KRISTEN DI INDONESIA BAGIAN TIMUR PADA ABAD KE-17

No.	DAERAH	JML SEKOLAH	JML MURID
1.	Ambon dan Sekitar	54	5190 7)
2.	Ternate	2	57
3.	Makian	1	12
4.	Bacan	1	12
5.	Sulawesi (Selebes)	6	220

6.	Tagulana	2	148
7.	Siauw	4	263
8.	Sangir	11	319
9.	Talaud (pulau cibrang)	1	29
J U M L A H		83	6247

Dalam perkembangan dan usaha pendirian sekolah yang diselenggarakan oleh VOC sesuai tabel tersebut di atas, tercatat di pulau Ambon dan sekitarnya sebanyak 54 buah sekolah dengan jumlah murid 5190 orang.⁸⁾ Jumlah ini merupakan angka yang paling tinggi dari jumlah sekolah-sekolah Kristen di seluruh daerah Indonesia timur. Semua sekolah-sekolah ini berada langsung di bawah pengawasan VOC.

Dari gambaran perkembangan pendidikan pada periode ini maka beberapa hal dapat dicatat sebagai berikut ;

- a. Sekolah Kristen adalah identik dengan sekolah pemerintah (VOC). Keadaan yang sama berlaku juga bagi gereja. VOC merasa dirinya sebagai penguasa gereja. Hal ini berarti pula bahwa sekolah-sekolah itu bukan milik gereja tetapi pemerintah VOC.
- b. Sekolah Kristen berpusat di Indonesia bagian Timur dan perkembangannya tergantung pada kuat tidaknya kekuasaan VOC di bidang politik pada suatu daerah tertentu, bahkan prinsip keuntungan dalam bidang perdagangan turut menentukan perkembangan itu artinya bahwa VOC tidak akan mendirikan sekolah-sekolah di daerah "Minus" bahan-bahan perdagangan (rempah-rempah) di zaman itu.
- c. Dipandang dari segi kehidupan gereja di Indonesia, maka sekolah-sekolah sebagai alat pekabaran Injil merupakan perwujudan dari pada **Culus rglo eivs rellgio**.⁹⁾

Dalam perkembangan selanjutnya terjadi perubahan-perubahan dalam bidang pendidikan tersebut di atas. Hal ini masalah-masalah politik dan ekonomi yang harus diprioritaskan. Yang menjadi sasaran utama sekarang ialah bagaimana dapat mengikat orang Kristen Protestan itu agar dengan mudah dapat dipergunakan sebagai alat bagi kepentingan-kepentingan ekonomi dan politik. Prinsip pokok ialah bagaimana memikirkan motif-motif dan cara yang tepat untuk bisa menguasai daerah ini, yaitu menguasai rempah-rempah. Yang penting pertama-tama bukan pendidikan dan penyebaran agama, akan tetapi politik untuk menguasai daerah rempah-rempah.

Di samping sekolah-sekolah yang didirikan untuk tujuan-tujuan perkembangan agama Kristen Protestan terdapat juga sekolah-sekolah umum untuk mendidik pegawai-pegawai dan militer bagi keperluan politik Belanda. Sekolah-sekolah yang didirikan pada waktu itu sama sekali belum mempunyai tujuan untuk peningkatkan

taraf hidup dan pembinaan bangsa, khususnya orang-orang Maluku. Dalam abad ke-17 dan 18 Pendidikan Kejuruan tidak diselenggarakan. Hal ini tidak mengherankan karena kompeni mempunyai dasar keagamaan.

Pada tahun 1779 jumlah murid pada sekolah-sekolah VOC di Maluku tercaay sebagai berikut: Di Maluku Utara 1057 dan di Ambon 3966 orang. Dari angka-angka itu dapat disimpulkan bahwa jasa VOC dalam lapangan pendidikan dan pengajaran an selama hampir 200 tahun itu sangat tipis.

C. PENDIDIKAN ZAMAN HINDIA BELANDA (ABAD KE-19)

1. Pendahuluan

Seperti diketahui semua sekolah VOC bertujuan mengisi kekosongan tenaga-tenaga pekerja, supaya dapat lebih memperkuat keuangan VOC. Sekolah-sekolah masih tetap berada dalam strategi pengembangan agama Kristen Protestan. Pengajaran rakyat umum tidak diperhatikan. Hal ini baru mendapat perhatian pada abad ke-19, setelah Indonesia kena pengaruh aliran liberal dari Eropa.

Aliran dan filsafat liberalisme itu timbul pada abad ke-17 dan mempengaruhi seluruh Eropa pada abad ke-18. Aliran ini menghendaki agar:

- a. Manusia dibebaskan dari absolutisme negara dan mengharapkan agar kebebasan terutama kebebasan ekonomi dapat menghasilkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi seluruh umat manusia. Dalam lapangan pendidikan ada kepercayaan bahwa pendidikan dan pengajaran dapat menimbulkan perbaikan-perbaikan sosial.
- b. Pendidikan hendaknya dapat membebaskan manusia. Pengajaran harus lepas dari pengaruh gereja yang telah mengikatnya berabad-abad lamanya. Hendaknya negara yang harus menyelenggarakannya. Aliran liberalisme yang memperjuangkan toleransi dan pemisahan antara gereja dan negara, sekarang menjadi pelopor pula dari bentuk pengajaran baru yakni sekolah negara.
- c. Pentingnya penerangan pengajaran bagi rakyat umum. Timbul reaksi terhadap usaha-usaha gereja yang hanya memperhatikan anggota-anggotanya saja. Diusahakan agar ilmu pengetahuan tersebar seluas-luasnya. Dorongan yang kuat didapat dari revolusi Perancis, yang di antaranya menghasilkan pengajaran cuma-cuma bagi semua warga negara.

Aliran liberalisme tersebut tidak saja berpengaruh pada penyebaran pengajaran, tetapi juga pada isi pelajaran. Beberapa pelajaran baru dimasukkan ke sekolah. Dikemukakan pentingnya ilmu pasti, ilmu bumi, sejarah, juga menggambar dan pekerjaan tangan. Sekolah-sekolah lama hanya memberikan membaca, menulis kadang-kadang berhitung, di samping pelajaran-pelajaran agama.

Pengaruh liberalisme itu masuk juga ke negeri Belanda. Maka timbullah juga pemikiran-pemikiran perihal pengajaran kolonial. Timbul masalah-masalah bagaimana usaha-usaha untuk memperbaiki keadaan pendidikan di daerah jajahan Indonesia. Sampai pada akhir abad ke-18 belum tampak hasil-hasil yang positif dari

usaha-usaha tersebut, yang masih diperhatikan adalah penyebaran agama Kristenu melalui sekolah-sekolah, bukan pengajaran netral bagi rakyat. Dengan demikian orang memasuki periode baru yakni pengaruh liberalisme di Indonesia.

2. Politik Pengajaran Kolonial

Dengan runtuhnya kekuasaan VOC sebagai suatu badan dagang yang mempunyai hak dan kuasa mewakili pemerintah Belanda di Indonesia pada tanggal 31 Desember 1799, maka berakhirilah suatu bentuk kekuasaan pemerintahan dan timbul suatu suasana baru. Pendidikan pun dengan demikian harus disesuaikan dengan suasana baru itu "**Bataafse Republiek**" yang dibentuk pada tahun 1796 menggantikan **Staten General** memerintah Indonesia.

Semangat revolusi Prancis melalui Dandels masuk ke Indonesia. Kebebasan beragama telah diumumkan. Ini berarti monopoli dari pada gereja VOC yang diteruskan oleh **Indische Kerk** telah ditiadakan. Suasana baru telah timbul dalam kehidupan pemberitaan Injil di Indonesia. Suasana baru yaitu suasana kebebasan beragama yang dimulai oleh Dandels diteruskan kemudian oleh Raffles. Dalam suasana baru inilah para pekabar Injil yaitu badan-badan **Zending** telah diperkenankan masuk di Indonesia untuk memulai ugas misioner.¹⁰⁾ Beberapa dari badan Zending itu dapat dicatat antara lain: **Baptist Missionary Society** di London (1792), **London Missionary Society** (1795), **Nederlands Zendelings Genootschap** (1779), **Church Missionary Society** (1779), **Barmer Rheinische Mission** (1828) dan lain-lain. Dari negeri Belanda sendiri yang terkenal adalah **Nederlandsche Zending Vereeniging** (N.Z.V. 1858), **Utrechtse Zending Vereeniging** (U.Z.V.), **Nederlands Gereformeerde Zending Vereeniging** dan lain-lain.

Dalam hubungan dengan perubahan politik tersebut bagi dunia pendidikan di Indonesia maka pertama-tama dapat dicatat tentang timbulnya apa yang disebut Sekolah negara (**Public School**) yang netral. Sekolah negara yang dalam corak pendidikannya membebaskan diri dari pengaruh agama khususnya agama Kristen Protestan.¹¹⁾ Ordonansi April 1874 **Staatsblad** no.99 menetapkan bahwa pengajaran dianggap menjadi tanggungjawab penuh dari pada pemerintah. Perubahan selanjutnya adalah dalam bidang administrasi pendidikan. Jika pada tahun-tahun sebelumnya administrasi khusus sekolah-sekolah Kristen masih ada sejak tahun 1865 telah dihilangkan dan sejak dari itu tak pernah lagi diadakan.

Sehubungan dengan tanggungjawab pendidikan berada di tangan pemerintah maka sesudah tahun 1816 diadakan dewan Pengawas Pendidikan dan Pengajaran, yang kemudian sebagai Inspektur Pendidikan dan berubah menjadi Komisi Tertinggi Pendidikan. Pada tahun 1848 untuk pertama kalinya pemerintah menetapkan anggaran belanja Pendidikan sebesar f 25.000 dan pada tahun 1867 berdirilah Departemen Pendidikan yang mengurus administrasi sekolah.

Berdasarkan politik netral pemerintah kolonial di bidang pendidikan dan pengajaran maka ini berarti mata-mata pelajaran umum sangat dipentingkan dalam ren-

cana pelajaran. elajaran agama khususnya agama Kristen peranannya dalam rencana pelajaran tidak ada lagi. Pendidikan dan pengajaran telah menjadi sekuler. Dasar agama Kristen telah ditinggalkan dalam dunia pendidikan. Pada zaman pemerintahan Gubernur Jenderal Dandels (1808-1811) mulai ada pengajaran bagi rakyat. Ia mengisntruksikan supaya tiap-tiap distrik mempunyai sekolah. Masa berikutnya yaitu zaman pemerintahan Raffles (Inggris) politik netral di bidang pendidikan tetap dilanjutkan, meskipun Raffles sendiri kurang memperhatikan soal pendidikan dan lebih bayak mencurahkan perhatian kepada perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan.

Setelah kembali lagi sebagai jajahan Belanda, maka bidang pendidikan mulai "dip $\frac{1}{2}$ erhatikan" lagi terutama dalam rangka mempersiapkan tenaga-tenaga pegawai sehubungan dengan politik kolonial di bidang ekonomi.12) Sejak tahun 1848 telah dibuka sekolah untuk anak-anak bumi putra, namun masih terbatas bagi anak anak bangsawan saja. Pada tahun 1892 sekolah tersebut dibagi menjadi dua macam yaitu kelas I dan sekolah kelas II. Skeolah kelas I diperuntukan bagi golongan bangsawan dan lamanya 4 sampai 5 tahun an sekolah kelas II untukr akyat biasa lamanya 3 tahun. Sekolah kelas II biasanya dikenal juga dengan nama Pengajaran Bumi Putra untuk membedakan dari pengajaran Barat yang pada mulanya hanya terbuka bagi orang-orang Belanda dan Eropa lainnya. Untuk jenis pengajaran Barat sejak 1817 telah dibuka ELS (**Europeesche Lagere School**).

Dalam perkembangan selanjutnya sekolah-sekolah untuk rakyat biasa (sekolah kelas II) dibuka tipe sekolah yang disebut sekolah desa. Pada tahun 1906 dan tahun 1915 dibuka sekolah **Vervolg** di samping apa yang disebut Sekolah **Standaard**. Sekolah **Vervolg** adalah sekolah sambungan dan merupakan lanjutan dari sekolah desa. Dengan adanya sekolah **Vervolg** maka berangsur-angur sekolah **Standaard** dihapus. Pada tahun 1911 Sekolah kelas I diubah menjadi HIS (**Hollands Inlandse School**). Pada tahun 1924 dibuka lagi suatu jenis sekolah pengajaran Barat yang disebut Sekolah **Schakel**, yaitu sekolah penghubung dari pendidikan bumiputra ke pendidikan Barat.

kalau diteliti lebih lanjut tentang politik pendidikan dan pengajaran kolonial tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan dan pengajaran yang dijalankan oleh pemerintah kolonial untuk rakyat Indoensia adalah sangat kurang. Pengajaran Bumiputra tidak lebih dari pada pemberantasan buta huruf.13)

3. Peranan Badan Zending

Telah dijelaskan di atas bahwa sebagai akibat dari pada suasana baru, para pekabar Injil yaitu badan-badan Zending telah diizinkan untuk melanjutkan tugas misioner. Salah satu di antara badan-badan Zending yang terkenal dan banyak kegiatannya di Indonesia bagian Timur ialah **Nederlands Zendelings Genootschap** 9nzg0. Perhimpunan para pekabar Injil ini telah menyebarkan orang-orangnya dan juga tenaga-tenaga keuangannya untuk bekerja di daerah-daerah Kristen yang sama sekali terlantar itu. Sebagai orang NZG yang pertama dapat disebut Yoseph

Kami yang sudah mengarungi seluruh kepulauan di bagian Indonesia Timur guna mengetahui dari dekat segala sisa dari pada gereja VOC di sana. Yoseph Kam pernah dijuluki sebagai Rasul Maluku karena ia yang merehabilitasi para jemaat yang hampir punah. Sejak ia hingga bagian kedua dari abad ke-19 dapat dilihat sejumlah besar orang-orang NZG bekerja di daerah ini.14)

Perkembangan sekolah-sekolah di daerah Maluku dan khususnya di pulau Ambon yang dijadikan pusat kegiatan pendidikan lebih mengalami kemajuan setelah tibanya Yoseph Kam di Ambon pada tahun 1816, dengan tugas dan fungsi sebagai seorang pekabar Injil. Sebagai seorang pekabar Injil yang wajib menyebarkan agama dan mengembalikan kesadaran agama bagi jemaat-jemaat yang sudah suram ini, ia menaruh perhatian yang amat besar terhadap pendidikan. Sekolah-sekolah pada zamannya menampakkan suatu karakter Kristen yang merupakan faktor yang paling penting dalam kehidupan jemaat dan pekerjaan **Zending** di Maluku.15)

Usaha pertama dari Yoseph Kam dalam bidang pendidikan agama adalah pendirian sebuah sekolah guru Injil. Pendirian didasarkan pada keperluan kader-kader pembina jemaat dan sekaligus mereka dididik sebagai pendidik-pendidik yang akan dimanfaatkan bagi pendidikan pada waktu itu. Telah dijelaskan bahwa pendeta-pendeta berfungsi juga sebagai guru sekolah. Dengan demikian di samping tugas sebagai pendeta mereka juga berfungsi sebagai guru sekolah. Sekolah guru itu didirikan pada tahun 1821. Untuk membantu pendidikan maka buku-buku katekisasi dan mazmur-mazmur didatangkan bagi jemaat-jemaat. Pemasukan buku-buku ini merupakan bantuan yang paling besar dalam peningkatan pendidikan. Walaupun semua ini bercorak pendidikan agama namun pendidikan umum pun tercakup di dalamnya seperti membaca, menulis dan sebagainya.

Selain itu sebuah percetakan didirikan oleh Kam pada tahun 1819 di Ambon untuk dapat menerbitkan buku-buku yang diperlukan untuk membantu pendidikan tersebut. Sekolah-sekolah diasuh oleh pekabar-pekabar Injil yang bertindak juga sebagai guru sekolah. Seorang pemberita Injil adalah juga seorang guru sekolah. Pengajaran membaca, menulis, menyanyi, menghafal dan sebagainya materinya diambil dari buku-buku Injil justru karena pada waktu itu belum ada buku-buku pelajaran yang diterbitkan oleh badan-badan yang berwewenang dalam urusan pendidikan, sehingga seluruhnya diurus oleh lembaga pendidikan keagamaan. Dapat dikatakan bahwa lembaga-lembaga keagamaan pada waktu itu dapat juga berfungsi sebagai lembaga-lembaga pendidikan agama, maupun pendidikan umum. Corak pendidikan pada waktu itu lebih banyak diarahkan untuk mempersiapkan anak-anak untuk menjadi anggota gereja. Menurut Kam, pendidikan gereja dan Zending tidak dapat dipisahkan yang satu dari yang lain. Sekolah dijadikan alat untuk membantu pekerjaan Zending.

Akan tetapi keadaan ini berubah setelah penyerahan kekuasaan dari pemerintah Inggris kepada pemerintah Belanda pada tahun 1816. Pemerintahan Kam pada Gubernur Middelkoop supaya pengawasan sekolah-sekolah berada dalam tangan-

nya tidak diterima. Hal ini disebabkan karena pendidikan pada waktu itu telah bercorak pendidikan negara. Pada waktu itu pemerintah melarang pendidikan agama di sekolah-sekolah/ Sistem pendidikan di sekolah diubah dari sasaran pendidikan keagamaan menjadi sekolah yang netral dari unsur-unsur keagamaan. Namun nyatanya secara praktis Zending menjalankan fungsinya terus sebagai penguasa sekolah-sekolah, sebab guru-guru dan alat pelajaran diusahakan oleh Zending. Betapa besar peranan Zending pada waktu itu dalam bidang pendidikan sehingga nampaknya pemerintah tidak berdaya dalam pelaksanaan teorinya untuk menegakkan pendidikan. Hampir seluruh sekolah-sekolah baik sekolah-sekolah agama maupun sekolah-sekolah umum diatur dan dikuasai oleh Zending.

Bahwa sekolah-sekolah pada masa ini mengalami perkembangan dan kemajuan pesat khususnya di pulau Ambon dapat dilihat pada statistik perkembangan sekolah-sekolah tahun 1821 oleh Yoseph Kam (Lampiran 3 dan 4). Di pulau Ambon sendiri terdapat 24 buah sekolah Kristen dengan jumlah murid 1421 orang.

Dengan bertambahnya jumlah sekolah yang memerlukan pembinaan, maka sangat dibutuhkan tenaga-tenaga pendidik untuk membina sekolah-sekolah tersebut. Atas kebijaksanaan Kam didirikan sekolah guru Injil pada tahun 1821. Pendidikan sekolah ini didasarkan pada kebutuhan pendidik untuk melayani sekolah-sekolah Kristen yang banyak itu yang merupakan tanggungjawab dari pada Zending. Selain itu salah satu alasan pula ialah bahwa guru-guru yang ada itu belum mempunyai dasar pendidikan guru yang baik seperti yang diinginkan. Yang ada yaitu guru-guru yang diangkat sesudah mengikuti pendidikan singkat dalam mata pelajaran yang dianggap perlu karena yang dipentingkan ialah dasar agama, sedikit membaca dan menghafal ayat-ayat Alkitab dan menyanyi Mazmur.

Lamanya pendidikan pada sekolah guru Kam ini 5 tahun. Di samping belajar para siswa bekerja pula pada percetakan yang didirikan Kam. Calon-calon guru itu harus menandatangani perjanjian bahwa setelah lulus pendidikan mereka bersedia ditempatkan di mana saja.

Setelah guru yang dirintis Kam ini kemudian dilanjutkan dan disempurnakan oleh Ds. Geriche tahun 1833, dengan izin dari Gubernur Ambon dan Komisi sekolah. Para calon yang hendak diterima ditest terlebih dahulu. Mata pelajaran ditambah dengan membaca, menulis, berhitung, ilmu bumi, bahasa Melayu, ilmu Alkitab dan ilmu iman. Sebagai lanjutan dari sekolah ini, maka di kampung Batumerah Ambon didirikan sebuah sekolah guru pada tahun 1836. Sekolah ini dipimpin oleh Ds. Roskot. Tujuan sekolah ini adalah mendidik guru-guru bagi sekolah-sekolah di samping itu juga bisa memimpin Jemaat kecil.

Sekolah ini telah berhasil menciptakan kira-kira 100 orang guru untuk melayani 80 buah sekolah di seluruh Maluku. Sekolah guru ini ditutup pada tahun 1864 karena semua sekolah Kristen diambil alih oleh pemerintah, sehingga tidak diperlukan lagi guru-guru sekolah Kristen. Semua guru yang telah dihasilkan oleh sekolah ini diambil alih oleh pemerintah.

Karena jasa yang besar dari Roskot, maka pemerintah Belanda memberikan penghargaan kepadanya di mana pada tahun 1851 ia diangkat sebagai inspektur sekolah-sekolah. Sebelum pengalihan tanggungjawab sekolah ke tangan pemerintah, maka sekolah-sekolah secara praktis adalah di bawah tanggungjawab Zending. Pada tahun 1822 telah didirikan suatu **Onderwijs Commissie** yang salah seorang anggotanya adalah Yoseph Kam dan seorang guru Ambon ialah M. Huwae.16)

Pengalihan sekolah-sekolah Kristen ke sekolah-sekolah Negeri menyebabkan pengalihan tanggungjawab pula. Segala pembiayaan guru adalah tanggungjawab pemerintah. Sekolah-sekolah pada periode ini adalah sekolah rakyat 3 tahun yang disebut **Volkschool**. Semua sekolah rakyat 3 tahun ini dikhususkan untuk pendidikan rakyat biasa.

Di samping lembaga-lembaga pendidikan tadi, maka oleh Zending pada tahun 1885 didirikan di Ambon sebuah sekolah guru Injil yang disebut **STOVIL (School tot opleiding van Inlandse Leeraren)**. Pendidikan ini dikhususkan untuk menciptakan guru-guru Injil. Dalam periode pendidikan ini, maka Zending memegang peranan yang sangat penting dan menentukan di daerah Maluku. Dan badan Zending yang merupakan satu-satunya organisasi yang berjasa di Ambon adalah NZG.

BAB IV

PENDIDIKAN PADA ABAD KE-20

A. PENDIDIKAN PEMERINTAH HINDIA BELANDA

1. Pendahuluan.

Dalam uraian sebelumnya telah dijelaskan bagaimana keadaan pendidikan diselenggarakan oleh Pemerintah Kolonial. Telah dikemukakan bagaimana pemerintah dalam mendirikan jenis sekolah, juga telah disinggung bagaimana sikap pemerintah terhadap pengajaran agama dan pengajaran ilmu-ilmu pengetahuan umum. Pada dasarnya politik pendidikan dan pengajaran itu tidak terlepas dari pada tujuan dan kepentingan-kepentingan kolonial. Politik pengajaran liberal yang dijalankan sejak tahun 1864 sampai akhir abad ke-19 itu ternyata tidak untuk mendidik rakyat dalam arti yang umum. Sistem pengajaran Bumiputra yang mereka dengungkan ternyata sama sekali tidak memenuhi kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Diferensiasi pengajaran Bumiputra malah memecah-mecahkan masyarakat dalam tingkatan-tingkatan dan kelas-kelas masyarakat, yaitu lapisan atas dan lapisan bawah. 1) Politik tersebut jelas yaitu bahwa rakyat jelata tidak perlu mendapat bimbingan untuk mencapai kemajuan, sedangkan segelintir rakyat Indonesia yang menerima pengajaran Barat yang intelektualistis itu dipakai untuk menunjang aparat pemerintah kolonial.

Pada permulaan abad ke-20, Belanda meninggalkan politik eksploitasi lama dan mulai memperkenalkan politik baru yaitu politik etika yang disebut juga politik asosiasi, yang dalam teori bertujuan memberi kebahagiaan dan kemakmuran kepada bangsa Indonesia dengan menyelenggarakan: pendidikan, pengairan (irigasi) dan perpindahan (emigrasi). Pada hal latar belakang yang sebenarnya adalah untuk kepentingan kaum importir dan kaum industri. 2) Sebagai pelaksanaan dari politik tersebut, maka pada tahun 1907, pemerintah Belanda mengambil dua tindakan penting yaitu :

- a. Memberi corak dan sifat keblanda-blandaannya pada sekolah-sekolah kelas I. Bahasa Belanda dimasukkan sebagai mata pelajaran. Pada tahun 1914 Sekolah Kelas I itu dijadikan HIS (**Hollands Inlandse School**) dan menjadi suatu bagian pengajaran rendah Barat HIS diperuntukkan bagi anak-anak kaum bangsawan dan orang-orang terkemuka.
- b. Mendirikan sekolah-sekolah desa pada tahun 1907 di samping sekolah kelas II yang ada. Segala sesuatu mengenai sekolah ini ditanggung oleh desa sendiri. Pada hakekatnya sekolah-sekolah ini hanya memberantas buta huruf belaka. Pendidikan dalam arti yang sesungguhnya tidak diberikan, kecuali membaca, menulis, dan berhitung; lamanya belajar 3 tahun.
- c. Langkah selanjutnya diambil pada tahun 1915 dengan mendirikan sekolah-sekolah **Vervolg**, sebagai lanjutan dari Sekolah Desa dan lamanya belajar adalah 2 tahun.

Dengan demikian dapatlah dicatat adanya tiga susunan pengajaran rendah bagi anak-anak Bumiputra :

- a. Sekolah Desa, bagi anak-anak rakyat biasa.
 - b. Sekolah Kelas II, yang kemudian diubah menjadi Sekolah **Vervolg**, bagi anak-anak yang telah lebih banyak berkenalan dengan unsur-unsur kebudayaan Barat.
 - c. Sekolah Kelas I, yang sejak tahun 1914 dijadikan HIS bagi anak-anak bangsawan dan kaum terkemuka.
- a. **Pendidikan Dasar** yang demikian ini memecah dunia anak Indonesia, sehingga golongan yang satu merasa lebih tinggi dari golongan yang lain.

b. **Pengadaan Guru**

Karena adanya beberapa jenis sekolah rendah ini, maka pendidikan gurunya pun bermacam-macam pula. Untuk mendapat guru-guru bagi sekolah desa diadakanlah sistem **magang**, dan C.V.O. (**Cursus Volks-Onderwijzer**). Sistem magang ini diadakan di sekolah-sekolah kelas II (**Vervolg**) dan dipimpin kepala sekolah. Yang dijadikan magang itu adalah mereka yang telah menamatkan sekolah kelas II atau **Vervolg**. Sistem ini diakui dengan ujian yang dinamakan ujian P.O. (**Premie Opleiding**). Yang diuji terutama sekali praktek mengajar dan yang mengujinya ialah **Schoolopziener** (penilik sekolah). Ujian dilak

dengan ketat dan keras. Yang lulus diangkat sebagai guru bantu Sekolah Desa dengan surat keputusan Bupati 3). Sistem ini berakhir tahun 1921. Pendidikan pada C.V.O. yang merupakan kursus menerima murid-muridnya dari sekolah **Vervolg** atau sekolah kelas II. Lama belajar 2 tahun. Tamatan C.V.O. bekerja sebagai guru bantu di sekolah desa. Semua guru sekolah desa ini bukanlah pegawai negeri.

Selanjutnya untuk sekolah **Vervolg** (kelas II), guru-gurunya didapat melalui sistem magang, **Normaalcursus** 2 tahun, **Normaalschool** (N.S.) dan **Kweek-school** (K.S.). Sistem magang diadakan pada sekolah **Vervolg** (kelas II) juga dan calon diambil juga dari sekolah tersebut. Sistem ini diakhiri dengan mengambil ujian untuk mencapai ijazah G.B. (Guru bantu biasa). Yang mengujinya ialah inspektur dan tekanan diberikan pada praktek mengajar. Dengan memiliki ijazah G.B. para magang berubah kedudukannya. Mereka menjadi pegawai negeri dan berwenang untuk mengajar sampai kelas IV. Pada Normal Cursus 2 tahun, para peserta adalah para magang. Kursus diberikan pada malam hari. Para pemilik ijazah C.V.O. boleh turut serta juga. Dengan memiliki ijazah kursus normal ini mereka semua menjadi pegawai negeri. 4) Setelah lulus ujian mereka berwenang mengajar sampai kelas IV dan juga disebut Guru Bantu Biasa.

Pada tahun 1914 didirikan **Normaalschool** (NS) yang diterima menjadi murid ialah lulusan sekolah **Vervolg** atau sekolah kelas II. Lamanya belajar 4 tahun. Di N.S. diberikan pula bahasa Belanda. Lulusan N.S. mempunyai wewenang untuk mengajar sampai kelas tertinggi.

Pendidikan pada **Kweekschool** (K.S.) menerima murid-muridnya dari H.I.S. dan yang sederajat. Lamanya belajar mula-mula 6 tahun, kemudian 5 tahun dan akhirnya 4 tahun. Bahasa pengantarnya ialah bahasa Belanda. 5) Tamatan K.S. berwenang mengajar sampai kelas tertinggi.

Untuk H.I.S., guru-gurunya didapat dari: N.S., K.S., **Hogere Kweekschool** (H.K.S.) dan kursus **Hoofdacte**. Mula-mula H.K.S. menerima lulusan K.S. kemudian diberikan kesempatan kepada lulusan MULO. Lama belajar 3 tahun. Bahasa pengantar adalah bahasa Belanda. Sekolah ini didirikan pada tahun 1914 dan berakhir tahun 1932. H.I.K. menerima murid-muridnya dari H.I.S. untuk bagian rendah dan dari MULO untuk bagian atas. Lama belajar 6 tahun sesudah HIS yang terdiri dari: 3 tahun di bahagian rendah dan 3 tahun di bahagian atas. Bahasa pengantar adalah bahasa Belanda. H.I.K. mulai dibuka pada tahun 1927 dan merupakan perubahan rencana pelajaran H.K.S. Selanjutnya tamatan H.K.S. dan H.I.K. dapat mengikuti **Cursus Hoofdacte**; lama belajar 2 tahun. Pemilik ijazah **Hoofdacte** adalah calon kepala H.I.S. Perlu dicatat bahwa sampai pada lembaga pendidikan guru yang tertinggi ini masih terlihat politik rasial dan kolot dari pemerintah Belanda. Kursus **Hoofdacte** ini masih dibagi lagi menjadi dua macam: yaitu **Europese Hoofdacte** dan **Indische Hoofdacte**. Beda antara kedua **Hoofdacte** ini terletak pada soal bahasa Belanda dan ilmu mendidik. Pada **Europese Hoofdacte** kedua ma-

cam mata pelajaran tersebut lebih diperberat syarat-syaratnya. Tidak mengherankan apabila penilaiannya pun tidak sama. **Europese Hoofdacte** lebih tinggi penghargaannya dari pada **Indische Hoofdacte**. 6)

Mengenai pendidikan **menengah umum** dapat dicatat perkembangannya sebagai berikut:

Sebagai lanjutan dari H.I.S. didirikan **MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs)** pada tahun 1914. Sejak zaman Jepang sampai sekarang bernama S.M.P. yaitu Sekolah Menengah Pertama. Sebenarnya sejak tahun 1903 pada beberapa sekolah rendah Belanda telah dibuka kursus MULO yang memberi pengajaran lanjutan. Lama belajar mula-mula ditetapkan 2 tahun, kemudian diubah menjadi 3 tahun. Sekolah ini hanya dapat dikunjungi anak-anak Belanda saja. Setelah diadakan reorganisasi pada tahun 1914 menjadi sekolah MULO yang berdiri sendiri lepas dari sekolah rendah Belanda, barulah anak-anak Indonesia yang telah menamatkan H.I.S. dapat pula memasukinya. Sekolah MULO ini menjadi **onderbouw** atau dasar dari pengajaran menengah.

Untuk memberi kemungkinan pada pemuda-pemuda Indonesia melanjutkan pelajaran yang lebih tinggi, maka dikirimkanlah suatu sekolah tingkatan menengah yang diberi nama **A.M.S. (Algemene Middelbare School)**. Pada zaman Jepang bernama Sekolah Menengah Tinggi dan sekarang terkenal sebagai Sekolah Menengah Atas. Sekolah baru ini dapat membawa pemuda-pemuda kita ke perguruan tinggi. Lama belajar 3 tahun. AMS ini dibagi menjadi dua bahagian yaitu: Bagian A untuk Ilmu Pengetahuan Kebudayaan dan Bahagian B untuk Ilmu Pengetahuan Kealaman. Bahagian A dipecah lagi menjadi dua bahagian yaitu bahagian AI untuk Kesasteraan Timur dan bahagian A II untuk Kesasteraan klasik Barat. AMS bagian B sederajat dengan **HBS 5 tahun (Hogere Burger School)**. HBS ini adalah sekolah yang pada mulanya memberikan pengajaran menengah khusus pada anak-anak Belanda saja. 7)

Mengenai pendidikan **kejuruan**, maka pemerintah Belanda juga menaruh perhatian. Secara singkat perkembangan pendidikan kejuruan ini dapat dicatat sebagai berikut: Untuk mempertinggi segi ekonomi rakyat pada umumnya dirasa perlu segera mengadakan pengajaran praktis. Kerajinan rakyat sangat diperlukan dan dapat dimulai dengan pengajaran **pertukangan**.

Untuk itu dibuka sekolah-sekolah pertukangan atau **Ambachtschool**. Sekolah ini mempunyai tujuan untuk membentuk tukang-tukang yang biasa dan tukang-tukang yang dapat mengisi jabatan-jabatan rendah dan yang mempunyai tugas mengawasi seperti masinis, montir dan sebagainya. Lama belajar 2 tahun dan dibagi dalam 2 jurusan, yaitu jurusan kayu dan jurusan besi. Sekolah ini kemudian dijadikan 3 tahun bagi mereka yang telah mengikuti pengajaran rendah Barat sampai tamat. Sekarang sekolah pertukangan ini bernama Sekolah Teknik Pertama. 8) Pada permulaan abad ke-20 perusahaan-perusahaan teknik dan industri makin diperluas. Akibatnya sekolah-sekolah pertukangan ditingkatkan menjadi sekolah-sekolah teknik seperti **Koningin Wilhelmina School (KWS)** yang didirikan tahun 1906 di Jakarta

dan **Koningin Emma School** di Surabaya tahun 1912. Lamanya bersekolah 5 tahun dan sederajat dengan H.B.S. Sekolah ini mempunyai jurusan-jurusan: Ilmu bangunan, ilmu pesawat dan teknik listrik. Sekarang sekolah ini bernama Sekolah Teknik Menengah. (S.T.M.)

Sama halnya dengan pengajaran teknik, maka pengajaran **Perniagaan** pun disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan-perusahaan yang ada. Jenis sekolah yang didirikan untuk bidang ini sangat terbatas dan umumnya di Jawa saja. Sekolah tersebut ialah **Sekolah Dagang Rendah** di Semarang (1922) dan di Surabaya (1928) dan Sekolah Dagang Menengah tahun 1935. Jenis yang pertama menerima murid dari H.I.S. dan ELS, Sekolah ini sekarang nama SMEP Jenis kedua menerima muridnya dari tamatan MULO. Sekarang disebut sebagai SMEA.

Pengajaran **Pertanian** juga mendapat perhatian namun tidak tersebar dengan luas. Ini juga merupakan suatu keanehan karena Indonnesia merupakan negara agraris. Semua sekolah-sekolah tersebut berpusat juga di Jawa seperti : **Cultuurschool** di -Bogor (1911), Sukabumi dan Malang (1918). Lama belajar 3 tahun. Sekolah ini mempunyai jurusan-jurusan pertanian dan kehutanan yang menerima murid-muridnya tamatan sekolah rendah Barat. Sedangkan untuk pengajaran pertanian menengah didirikan di Bogor **Middelbare Landbouw School** (Sekolah Menengah Pertanian Atas (1911). Sekolah ini di masuki tamatan MULO dan H.B.S. 3 tahun 9)

Demikianlah perkembangan pengajaran kejuruan yang timbul sebagai pelaksana an politik etika di lapangan pendidikan. Karenasemua murid-murid tidak mendapat pendidikan untuk berdiri sendiri, maka tamatan sekolah-sekolah tersebut di atas tidak ada yang sanggup untuk mendirikan perusahaan sendiri atau memperbaiki keadaan hidupnya terutama di desa, sehingga akhirnya semuanya lalu mencari pekerjaan pada perusahaan-perusahaan orang Eropa. 10).

c. Pengajaran Tinggi

Sampai tahun 1920 selalu timbul pertanyaan, apakah di Indonesia dapat didirikan sekolah-sekolah tinggi, sebab ada anggapan bahwa orang Indonesia belum matang untuk menerima pengajaran tinggi. Telah dijelaskan di atas bahwa sebelum AMS didirikan pada tahun 1919, hanya H.B.S. 5 tahun yang memberikan pengajaran menengah jumlahnya terbatas. Murid-murid yang ditamatkannya pun sedikit dan itu pun terdiri dari anak-anak Belanda. Jadi pada waktu itu tidak ada sekolah-sekolah menengah lainnya bagi bangsa Indonesia.

Akan tetapi karena terdesak akan kebutuhan tenaga ahli dan pemimpin untuk membantu pemerintah Belanda dalam menangani perkembangan politik kolonialnya, maka akhirnya didirikan juga beberapa sekolah tinggi yang semuanya berpusat di Jawa. Sekolah-sekolah tinggi tersebut antara lain Sekolah Teknik Tinggi yang diberi nama **Technische Hogeschool** (THS) di Bandung ; Sekolah Hakim Tinggi yang dinamai **Rechtskundige Hogeschool** (RHS) di Jakarta (1924); Sekolah Tabib Tinggi atau **Geneeskundige Hogeschool** (G.H.S.) di Jakarta (1927).

T.H.S. adalah sekolah tinggi yang pertama di Indonesia. Lama belajar 5 tahun. Sebelum **R.H.S.** dibuka, sudah ada sebuah sekolah yang mendidik anak-anak Indonesia untuk menjadi ahli-ahli hukum. Sekolah ini dinamai **Recht School** (Sekolah Hakim) dan didirikan tahun 1909 di Jakarta. Pendidikan lamanya 3 tahun. Murid-murid dari **E.L.S.** Tamatan sekolah ini dijadikan jaksa atau hakim pada pengadilan. Tetapi mereka ini belum bergelar **Mr** (SH). Setelah di buka **R.H.S** maka sekolah ini ditutup. Lamanya belajar pada **R.H.S** 5 tahun. **G.H.S.** mempunyai sejarah yang sedikit panjang. Perkembangannya dimulai dari sekolah mantri cacar yang dibuka sejak tahun 1851. Lamanya belajar mula-mula 1 tahun kemudian ditingkatkan menjadi 2 tahun dan 3 tahun. Yang lulus dari ujian mendapat gelar **Dokter Jawa**. Sekolah itu kemudian disebut **Sekolah Dokter Jawa**. Pada tahun 1825 diadakan reorganisasi. Di buka bagian persiapan yang lamanya 2 tahun atau 3 tahun dan bahasa Belandanya digembleng. Yang berijazah **E.L.S.** dapat melampaui bagian persiapan ini. Pada tahun 1902 nama sekolah Dokter Jawa dirobah menjadi **STOVIA (School tot Opleiding van Indische Artsen)**. Kini sekolah tersebut mendidik calon-calon **Indische Art** atau dokter bumi putra. Lamanya belajar 5 atau 6 tahun. Sekolah semacam ini didirikan di Surabaya tahun 1913 dengan nama **NIAS (Nederlandsch Indische Artsen School)**. Sejak tahun 1914 diterima tamatan dari **MULO**. Setelah diubah menjadi **GHS** tahun 1927 maka yang diterima adalah lulusan **A.M.S** dan **H.B.S** 5 tahun, dengan lama belajar selama 7 tahun. Sejak itu **GHS** Jakarta menghasilkan **Artsen** dan Nias di Surabaya menghasilkan **Indische Artsen**. Jadi terlihat pula di sini politik dualisme pemerintah Belanda. Dari gambaran tersebut di atas dapat dilihat bahwa pada zaman pemerintahan penjajahan Belanda di Indonesia ada dua jalan menuju ke sekolah tinggi :

- a. Bagi golongan kecil bangsa Indonesia yang mampu jalan ke sekolah tinggi itu melalui **F.I.S.-MULO- A.M.S. -Sekolah Tinggi**.
- b. Bagi golongan bangsa Eropa (Belanda) jalan itu melalui **E.L.S.- H.B.S. 5 tahun- Sekolah Tinggi**.

Jadi bagi golongan terbesar bangsa Indonesia yang menerima pengajaran rendah bumiputra tidak ada kesempatan sama sekali untuk melanjutkan pelajarannya ke sekolah-sekolah yang memberikan pengajaran Barat. Barulah pada tahun 1921 kepada anak-anak dari sekolah bumiputra itu diberi kesempatan untuk meneruskan pengajarannya ke **MULO**, dan selanjutnya. Kesempatan itu ada setelah dibuka jenis sekolah baru yang diberi nama sekolah **Schakel (SCHAKEL School)**.

Sekolah ini berfungsi menghubungkan pengajaran Bumiputra dengan pengajaran Barat. Sesudah 3 tahun di sekolah kelas II atau setelah menamatkan sekolah Desa, maka anak-anak Indonesia dapat melanjutkan pelajarannya ke sekolah-sekolah itu. Lamanya belajar 5 tahun. Sekolah itu akan membawa murid-muridnya ke tingkatan yang sama dengan **H.I.S.** Guru-gurunya pun berpendidikan yang sama dengan guru-guru **H.I.S.** 11) Untuk jelasnya mengenai susunan pengajaran di Indonesia pada akhir masa penjajahan Belanda dapat dilihat pada bagan sesuai lampiran (lampiran 4).

2. Politik dan penyelenggaraan Pendidikan di Maluku

Masalah pendidikan pada masa pemerintahan Hindia Belanda yang digambarkan di atas merupakan suatu masalah yang mempunyai pengaruh atas strata-strata sosial masyarakat Maluku juga. Pemerintah Belanda telah menciptakan sekolah bagi rakyat Maluku dengan melihatnya dari segi suku, kelas-kelas masyarakat dan kekayaan serta dari kepentingan-kepentingan Belanda sendiri.

Di samping sekolah-sekolah yang dibangun oleh pemerintah (Sekolah Gubernemen), terdapat pula sekolah-sekolah milik swasta terutama gereja Katolik dan gereja Protestan Maluku yang membangun sekolahnya di desa-desa atau di pedalaman-pedalaman untuk mendidik rakyat biasa akan pengenalan huruf. Dan seiring dengan pembukaan sekolah di desa-desa (pedalaman) dijalankan pula penyiaran-penyiaran agama. Dengan demikian seorang pendeta merangkap juga sebagai guru yang melayani tiga kelas. Karena keterbatasan guru maka sekolah-sekolah dasar berbahasa Melayu dibangun oleh pihak swasta sendiri hanya terbatas pada tiga kelas dan dilayani oleh satu orang guru atau paling banyak dua orang guru. 12).

Apabila pendidikan dan kesempatan belajar antara orang-orang di desa dan di kota diperbandingkan, maka dapat dikatakan bahwa pendidikan di kota dan kesempatan belajar serta peralatan sekolah di kota jauh lebih baik dari di desa-desa, baik di pesisir maupun di pedalaman. Makin jauh ke pedalaman dan makin jauh dari pusat kota (Ambon, Ternate, Tual dan lain-lain) makin jarang sekolah-sekolah didirikan, sampai akhirnya satu sekolah akan melayani pendidikan untuk puluhan kampung.

tu (kota dan sekitarnya) maka nampaknya pada permulaan abad ke-20 sampai menjelang Perang Dunia II di banyak desa yang terpencil hampir tidak ada sekolah. Terlebih di negeri-negeri (desa-desa) Islam hampir-hampir tidak ada sekolah. Pendidikan di situ sejak dahulu di tangani oleh langgar-langgar dan pengajaran ber sifat keagamaan. Pengajaran Barat tidak dikenal dengan baik dan dapat dikatakan hampir sebahagian besar dari masyarakat Islam ini buta huruf (Latin). Hal ini berhubungan erat dengan badan-badan yang menangani pendidikan waktu itu.

Selain itu ada anggapan bahwa menerima pengajaran Barat berarti akan dikristenkan dan bahasa serta adat istiadat akan hilang nanti 13) Oleh karena pemerintah Hindia Belanda sendiri tidak berminat mengembangkan pendidikan di daerah-daerah terpencil, maka itu sebahagian besar pendidikan di desa-desa ditangani oleh pihak swasta. Dan karena pendidikan di luar kota atau desa-desa terpencil itu harus ditangani oleh pihak swasta dan pada waktu itu pihak swasta yang menangani pendidikan di Maluku hanyalah dari pihak gereja Protestan (Zending) dan Katolik (Misi), maka dengan sendirinya badan-badan swasta ini hanya mementingkan dan memprioritaskan pendirian sekolah di desa-desa atau negeri-negeri yang penduduknya beragama Kristen. Pada masa itu hanya ada dua sekolah di negeri Islam ialah yang didirikan di negeri Asilulu dan Iha. Sekolah ini pun milik Gereja Protestan Maluku. 14) Nanti pada masa kemerdekaan barulah muncul dan bergerak beberapa organisasi persekolahan yang mulai merintis pembukaan sekolah-sekolah pa-

da negeri-negeri Islam yang belum mempunyai sekolah dengan baik.

Sampai pada masa menjelang Perang Dunia II, maka menurut jenisnya sekolah-sekolah di Maluku terbagi atas dua jenis sekolah yang besar yaitu :

- a. Sekolah yang berbahasa Belanda
- b. Sekolah yang berbahasa Melayu

Disamping kedua jenis sekolah tersebut masih terdapat pula sekolah yang bersifat nasioanal (semacam Taman-Siswa) yang diberi nama Sekolah Balai Pendidikan. Sekolah ini merupakan hasil dari pergerakan nasional di daerah Maluku.

Sekolah Yang Berbahasa Belanda.

Di Maluku sekolah yang berbahasa Belanda (sebagai pengantar) menjelang Perang Dunia II hanya terdapat di kota-kota besar pada waktu itu yaitu di kota Ambon, Ternate dan Saparua. Sekolah-sekolah ini antara lain **Hollands Inlandse School (HIS)**, **Ambonsche Lagere School**, **Kweekschool**, **Hollands Inlandse Kweek-school**, **Mulo**, **Europese Kweekschool** dan **Ambonsche Burgers School**.¹⁵⁾ Sekolah-sekolah ini biasaya dikhususkan bagi anak-anak golongan atas, orang-orang kaya, anak-anak pegawai negeri, anak-anak dari keturunan **borgor**, anak-anak yang mempunyai (memakai) nama keluarga Belanda, anak-anak dari orang **gelljkgesteld** dan anak-anak Cina dan Arab. Pada masa ini golongan Cina dan Arab disediakan oleh pemerintah Belanda sekolah **Tweede** dan **Derde Europese Lagere School**. Pada sekolah ini uang sekolah tidak dipungut dan murid-murid diberi minum dan makan roti pada jam-jam istirahat. Sekolah ini juga disediakan untuk anak-anak dari keluarga-keluarga yang ber-fam (nama keluarga) Belanda dan keluarga-keluarga **gelljkgesteld**. Karena di sekolah ini uang sekolah tidak dipungut, maka orang Ambon yang tidak mampu membayar uang sekolah berusaha meminta **gelljkstelling** (persamaan kedudukan hukum dengan bangsa Belanda) dengan tujuan agar anak-anaknya dapat masuk sekolah ini. Sedangkan **Eerste Euroepse Lagere School** disediakan bagi anak-anak Belanda totok dan anak-anak **ambtenaar**. Pada sekolah ini uang sekolah dipungut dari murid-murid.

Pada masa ini bersekolah pada **Europese Lagere School** merupakan suatu kebanggaan bagi orang-orang tua dan anak-anak mereka. Sebab pada sekolah ini dididik anak-anak dari masyarakat terpendang dalam masyarakat. Terpendangnya mereka ini disebabkan karena kondisi masyarakat yang telah di kotak-kotakkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Sekolah inilah yang telah membedakan masyarakat satu dengan lainnya.

Untuk anak-anak raja dan anak-anak orang **borgor** disediakan **Ambonsche Burgers School** dan **HIS**. Sekolah ini adalah sekolah yang dihadiahkan oleh keluarga **Oranje**. (keluarga Raja Belanda). Sedangkan bagi anak-anak wanitanya disediakan **Frobel Kweek School (FKS)**.¹⁶⁾ Mereka yang akan bersekolah di sini harus be-

rangkat ke Bandung. Semuanya itu merupakan suatu taktik Belanda untuk mengambil hati para raja di Maluku. Anak-anak raja ini biar bodoh tetap dapat diterima di sekolah-sekolah yang mereka ingin masuk. Untuk mereka yang belajar di FKS setelah selesai studi akan menjadi guru dan mengajar di kelas 0.

Gaji mereka lebih besar dari gaji guru-guru tamatan HIK. Walaupun kesempatan bersekolah diberikan sebesar-besarnya kepada anak-anak raja, tetapi sebagian besar dari mereka tidak pernah memanfaatkan kesempatan ini. Mereka lebih senang tinggal di rumah untuk bersenang-senang. Kondisi masyarakat pada masa itu memang menciptakan untuk seorang anak raja hidup senang karena ia dikelilingi banyak harta, para pembantu (**orang kwarto**) dan pembantu rumah tangga.

Untuk anak-anak guru, anak-anak pegawai pemerintah, anak-anak militer dan anak-anak yang mempunyai hubungan baik dengan orang Belanda, diberi kesempatan juga untuk masuk sekolah-sekolah yang berbahasa Belanda. Tapi bagi mereka ini harus ditest dahulu. Kalau mereka misalnya berasal dari sekolah lain di luar **Europese Lagere School**, maka untuk pindah ke sekolah ini harus melalui suatu permohonan dengan surat permohonan. Setiap permohonan belum tentu diterima, mungkin harus beberapa kali proses permohonan baru dapat diterima.

Pada masa ini semua kepala sekolah pada sekolah yang berbahasa Belanda adalah orang-orang Belanda. Barulah pada menjelang pecahnya Perang Dunia II ada seorang putra Ambon Evert Malihollo yang memimpin sekolah berbahasa Belanda. Seorang guru Belanda dalam pangkat dan golongan yang sama dengan seorang guru pribumi, tidak akan menerima gaji yang sama sebab guru Belanda akan mempunyai gaji yang lebih besar. Demikian pun dengan guru-guru **Europese Lagere School** biasanya menerima gaji dua kali lebih besar dari guru-guru yang sederajat dengan mereka.

b. Sekolah Melayu.

Sekolah Melayu pada dasarnya mempunyai status lebih rendah dari sekolah-sekolah berbahasa Belanda yang sederajat. Hal ini dapat dilihat dalam anggapan-anggapan pemerintah Hindia Belanda pada tamatan sekolah ini. Mereka yang lulus sekolah Melayu tidak dapat semuanya melanjutkan ke sekolah **Middelbare School**. Dari mereka hanya diambil dua atau tiga orang yang terpandai, sedangkan yang lainnya kalau ingin menjadi guru harus mengikuti kursus-kursus guru bantu di Saparua atau di Ambon. Mereka yang mengikuti kursus-kursus ini pun haruslah orang-orang yang pandai sebab mereka yang kurang pandai tidak akan diterima.

Yang menjadi kepala sekolah pada sekolah-sekolah Melayu adalah mereka-mereka yang lulus kursus guru bantu. Sekolah Melayu ada yang terdiri dari tiga kelas dan bagi sekolah yang telah maju ada yang terdiri dari lima kelas. Guru-guru sekolah Melayu mendapat gaji lebih kecil bila dibandingkan dengan guru-guru yang sederajat dengan mereka yang mengajar pada sekolah-sekolah yang berbahasa Belanda. 17)

Yang masuk sekolah Melayu biasanya anak-anak rakyat biasa di desa-desa atau negeri-negeri. Di sekolah ini bahasa Melayu merupakan bahasa pengantar, yang di pergunakan dalam mengajar, sedangkan bahasa Belanda merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan untuk wajib belajar. Anak-anak yang terpandai yang lulus dari sekolah ini biasanya oleh **Ambonsche Studie Fonds** diberi bantuan untuk dapat melanjutkan sekolah mereka ke Jawa. Sebahagian besar dari mereka ini berhasil mencapai (menamatkan) sekolah tinggi. Pada masa ini sebahagian besar dari murid-murid lulusan sekolah Melayu tidak mampu meneruskan sekolahnya karena orang tua mereka tidak lagi mampu membayar uang sekolah mereka. Waktu itu untuk setiap anak pertama yang bersekolah dikenakan uang sekolah 4,75 gulden, sedangkan untuk anak ke II 3 gulden, anak ke III 2 gulden. Beban ini merupakan suatu beban yang berat sekali bagi seorang rakyat kecil.

Pada masa ini guru-guru sekolah (guru bantu) pribumi mempunyai suatu perkumpulan untuk dapat mengurus perbaikan nasib mereka. Sebenarnya perkumpulan atau organisasi guru-guru ini mempunyai pengaruh yang kuat dalam masa pergerakan nasional di Maluku juga. Namun sering mereka ditipu dan dipengaruhi oleh pemerintah Belanda untuk memukul organisasi-organisasi yang radikal anti Belanda. 18) Mungkin karena ketertiban kerja mereka dengan pemerintah Belanda menyebabkan organisasi-organisasi guru-guru telah merupakan alat pemerintah Belanda. Mereka biasanya mengikuti garis-garis politik Pemerintah Hindia Belanda. Meskipun begitu tidak dapat disangkal, bahwa ada segelintir kecil orang dalam organisasi-organisasi ini yang telah menyumbangkan pikiran dan tenaga bagi pergerakan nasional Indonesia. Para guru yang berjiwa nasional sering juga berpartisipasi dan ikut mengambil bahagian dalam kegiatan-kegiatan pergerakan nasional di Maluku yang disponsori oleh tokoh-tokoh pergerakan nasional yang tergabung dalam **Partai Sarekat Ambon**.

Seperti telah diketahui bahwa pada masa ini di Maluku terutama di kota Ambon bergolak juga perjuangan kemerdekaan. 19) Partai Sarekat Ambon memegang peranan penting dan menjadi wadah perjuangan dari putera-putera anak daerah yang menentang Belanda. Sarekat Ambon cabang Ambon dipimpin oleh seorang tokoh pergerakan nasional ialah E.U.Pupella, salah seorang bekas murid Taman Siswa di Jogjakarta. Selain politik sebagai alat perjuangan, ia dan kawan-kawannya juga memaknai pendidikan sebagai alat vital. Mereka lalu mendirikan suatu sekolah yang bercorak nasional yang kemudian diberi nama "**Balai Pendidikan.**"

B. PENDIDIKAN PERGERAKAN NASIONAL.

1. Pendahuluan

Politik Kolonial Belanda dalam bidang pendidikan membawa akibat-akibat bagi masyarakat Indonesia dan terhadap segi-seginya yang negatif timbul reaksi-reaksi terutama pada masa pergerakan nasional. Pertama-tama dapat dikemukakan bahwa sistem pendidikan kolonial menimbulkan disharmoni dalam dunia pendidikan Indonesia. Perkembangan intelek sangat dipentingkn sedang aspek kejiwaan lain-

nya diabaikan. Ki Hadjar Dewantara mengatakan bahwa intelek seolah-olah menjadi penguasa mutlak dalam kerajaan jiwa manusia.²⁰) Dapat dikatakan bahwa tujuan pendidikan kolonial adalah membentuk manusia-manusia intelektualistis dan pegawai-pegawai yang taat kepada Belanda. Akibatnya terciptalah kelas-kelas dalam masyarakat dan yang menonjol adalah mereka yang telah menjadi priyayi dan pegawai administrasi Belanda. Menjadi pegawai pemerintah merupakan suatu cita-cita masyarakat waktu itu. Dikalangan masyarakat penilaian terhadap pekerjaan-pekerjaan manual dianggap rendah. Pengajaran Barat membawa pengaruh pula dalam segi-segi kehidupan kultural dari pada masyarakat. Penilaian masyarakat terhadap hal-hal yang bercorak Barat atau yang datangnya dari Barat adalah sangat tinggi dengan predikat modern, sedang apa yang tumbuh dan hidup dalam masyarakat Indonesia sendiri dianggap rendah dan diberi predikat kolot.

Hal lain yang tak dapat disangsikan pula ialah bahwa keadaan dan sistem pengajaran Bumiputra yang sedang berlaku sama sekali tidak memenuhi kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Sekolah desa dalam kenyataannya tidak lain dari pada pemberantasan buta huruf.

Terhadap kesemuanya itu timbul kecaman-kecaman dan kritik-kritik yang dilancarkan oleh golongan pergerakan nasional. Timbul pula perjuangan menentang sistem pendidikan kolonial tersebut yang dipelopori oleh Ki Hajar Dewantara dengan persekolahan Taman Siswa. Tujuan pendidikan yang hendak dicapai sekarang ialah manusia yang harmonis dan memiliki perasaan kebangsaan yang kuat serta menghargai kebudayaan nasional. ²¹) Pengaruh persekolahan dan pendidikan dari Taman Siswa ini tersebar juga ke seluruh daerah di Indonesia dan dibawa pula ke daerah Maluku.

2. Sekolah Balai Pendidikan

Pada tahun 1934 di kota Ambon didirikan sebuah sekolah yang bercorak Taman Siswa oleh salah seorang bekas murid Taman Siswa E.U.Pupella. Sekolah ini diberi nama **Balai Pendidikan**. Pemberian nama Balai Pendidikan dan bukan sekolah Taman Siswa karena menurut penilaian pendirinya penamaan Taman Siswa adalah kurang cocok untuk kondisi daerah. Sebab menurut mereka yang perlu disini bukan apa nama sekolah itu, tetapi tujuan dan pendirian sekolah itu dan ini nanti tercermin dalam pendidikan yang diterapkan pada anak-anak tersebut yang dapat dikatakan sama dengan pendidikan di Taman Siswa. ²²) Sekolah Balai Pendidikan mempunyai lima dasar :

a. Dasar Umum

Anak-anak harus dapat berkembang atas tenaga sendiri. Tugas pendidikan bukanlah memelopori tetapi memberi pimpinan jika ternyata perlu.

b. Dasar Kemerdekaan

Anak-anak harus diberi kesempatan untuk berkembang dengan bebas. Ia harus menjadi orang yang merdeka dalam hal berpikir dan bertindak atas tanggungjawab sendiri.

c. **Dasar Kebudayaan**

Supaya anak-anak kelak jangan merasa asing terhadap bangsanya, pendidikan harus diberikan berdasarkan kebudayaan bersama.

d. **Dasar Kebangsaan**

Pendidikan harus diberikan kepada seluruh rakyat.

e. **Dasar Kemanusiaan**

Pendidikan harus membimbing anak-anak menjadi manusia yang mempunyai pengetahuan, yang dicarinya atas usaha sendiri untuk diamalkannya sendiri dalam pergaulan.

Selain dasar-dasar ini, maka Balai Pendidikan mempunyai sifat dan corak pendidikan Nasional yang bertujuan : mendidik anak-anak menjadi pendukung cita-cita kebangsaan dengan menyempurnakan dirinya sebagai seorang nasionalis yang mengutamakan kepentingan bangsa dan pencinta bangsa. Berpatokan pada dasar dan tujuan inilah Sekolah Balai Pendidikan telah dijalankan.

Dengan demikian dapat dikatakan adanya perbedaan yang begitu menyolok dalam cara pendidikan yang diberikan oleh Balai Pendidikan jika dibandingkan dengan kedua jenis pendidikan yang terdahulu.

Pada tahun permulaan sekolah Balai Pendidikan didirikan, sekolah ini berputar dengan 12 orang murid dan dengan tiga kelas. Gedungnya yang terletak di kampung Soa Bali sekarang disewa dari keluarga Basalam. Kemudian sekolah ini berkembang menjadi 6 kelas. Pada mulanya Balai Pendidikan berputar dengan dua orang guru yaitu: E.U.Pupella dan istri. Kedua mereka ini adalah murid-murid Taman Siswa. Kemudian sesudah itu tambah lagi seorang guru Taman Siswa yang datang untuk membantu Pupella yaitu **Tjokro**. Ia adalah seorang guru yang terkenal sangat baik pada masa itu, masa Jepang, masa sekitar Proklamasi Kemerdekaan, dan masa pergolakan RMS. Kepopuleran Tjokro begitu menonjol sehingga ia bersama-sama dengan Pupella berhasil dipilih dan duduk dalam Dewan Maluku Selatan. 23)

Dalam waktu yang singkat guru-guru pada Balai Pendidikan mulai bertambah. Mereka membantu membangun sekolah ini bukan karena motif mencari keuntungan, akan tetapi karena setuju dengan dasar dan tujuan sekolah ini, yaitu mendidik anak-anak untuk mengenal diri sendiri, berkembang sendiri dan mengutamakan bangsa Indonesia. Balai Pendidikan di Ambon dalam pergolakan-pergolakan politik mempunyai corak yang lain dari Taman Siswa. Kalau dalam Taman Siswa para gurunya tidak terlihat dalam soal-soal politik dan hanya berkecimpung dalam soal-soal sosial, sebaliknya pada Balai Pendidikan, baik masalah politik maupun masalah sosial diperlakukan sama.

Karena itulah hanya tokoh-tokoh Balai Pendidikan dalam pergerakan nasional di Maluku terjun langsung masuk ke dalam organisasi-organisasi yang memperjuangkan Indonesia merdeka seperti Sarekat Ambon. Sebahagian dari mereka bahkan

duduk dan memimpin Sarekat Ambon atau mewakili organisasi ini dalam **Ambon Raad**.

Meskipun tokoh-tokoh Balai Pendidikan terlibat dalam masalah-masalah politik dan untuk ini mereka harus sering berurusan dengan Pemerintah Hindia Belanda, tetapi bagi anak didik mereka dijaga begitu rupa sehingga mereka tidak terlibat langsung dalam soal-soal politik. Karena terlibatnya para tokoh Balai Pendidikan dalam masalah-masalah politik, maka Pemerintah Hindia Belanda sering melakukan inspeksi-inspeksi terhadap sekolah ini. Semuanya itu dilakukan dengan maksud agar supaya kegiatan Sekolah Balai Pendidikan dapat dilihat dari dekat dan diketahui apa-apa saja yang dikerjakan dalam sekolah tersebut. 24) Mengenai kepengurusan Balai Pendidikan diatur sebagai berikut:

- a. Ketua Majelis cabang, bertugas mencari dana dan mencari murid untuk sekolah di Balai Pendidikan.
- b. Ketua Majelis Pendidikan, bertugas mengurus masalah-masalah pendidikan anak-anak, masalah tenaga pengajar dan lain-lain yang berhubungan dengan pengembangan pendidikan.
- c. Orang tua murid (POM) yang dipimpin oleh salah seorang ketua POM.

Dana atau keuangan yang diterima adalah dari uang sekolah para murid dan bantuan-bantuan lainnya. Pada masa itu banyak sekali para simpatisan yang membantu Balai Pendidikan. Diantara mereka adalah pemuka-pemuka masyarakat, para cendekiawan, beberapa orang Cina, dan pedagang pribumi seperti Abu Kasim, Abdulalie dan Raden Panji. Dari uang sekolah dan bantuan-bantuan tersebut gaji guru guru dibayar, peralatan pendidikan dibeli dan sewa gedung sekolah. Pembagian penggunaan anggaran adalah sebagai berikut: 75% untuk gaji guru dan 25% untuk keperluan lainnya. Apabila pendapatan guru-guru Balai Pendidikan dibandingkan dengan pendapatan guru-guru sekolah lainnya maka pendapatan guru-guru Balai Pendidikan sangat kecil. Namun demikian mereka tidak menarik diri dalam membantu Balai Pendidikan dan mereka juga tidak merasa kekurangan disebabkan mereka secara individual selalu mendapat bantuan dari masyarakat simpatisan Balai Pendidikan atau dari orang tua murid, misalnya berupa pakaian, sepatu dan lain2. 25).

Mengenai mata pelajaran yang diberikan dapat dikatakan hampir sama dengan mata pelajaran yang diberikan di sekolah-sekolah lainnya, yaitu mata pelajaran : pengetahuan umum, berhitung, bahasa Belanda, bahasa Inggris (diberikan di kelas 4). Yang berbeda hanyalah dalam mata pelajaran sejarah. Pada sekolah-sekolah lain, mata pelajaran sejarah terbagi atas dua bagian yaitu:

- a. **Algemene Geschiedenis** (Sejarah Dunia)
- b. **Vaderlandsche Geschiedenis** (Sejarah Tanah Air).

Pemberian mata pelajaran sejarah pada Balai Pendidikan didasarkan pada pandangan nasional Indonesia. Oleh sebab itu mata pelajaran sejarah Tanah Air yang diajarkan adalah para pahlawan Indonesia yaitu mereka-mereka yang berjuang melawan Pemerintah Hindia Belanda seperti Kapitan Pattimura, Diponegoro dan lain-

lain. Di samping itu diajarkan pula untuk menghargai kebudayaan sendiri yang derajatnya tidak kalah dengan bangsa lain. Juga dididik untuk menghargai bahasa nasional dan bahasa daerah serta menghargai pula akan pakaian daerah. Pada sekolah-sekolah lainnya, mata pelajaran sejarah tentang pahlawan-pahlawan tanah air seperti Pattimura dan Diponegoro itu dianggap sebagai pemberontak-pemberontak. Pemupukan perasaan nasional melewati kebudayaan bahasa dan pakaian sama sekali tidak diperhatikan dalam sekolah-sekolah pemerintah.

Di Balai Pendidikan para guru dianjurkan untuk tidak membayar loon belasting kepada pemerintah Hindia Belanda. Karena adanya anjuran ini maka guru-guru di Balai Pendidikan tidak pernah membayar loon belasting (pajak pendapatan) tersebut. Akibatnya para guru Balai Pendidikan ini pernah ditangkap dan ditahan pihak Belanda. Untuk itu maka ketua bidang pendidikan juga ditahan karena umumnya penahanan ini dilanjutkan dengan diadilinya orang tersebut di pengadilan. Mereka selalu dinyatakan bersalah dan didenda sebanyak 7.50 gulden. Denda tersebut harus dibayar oleh Balai Pendidikan guna menebus guru atau anggotanya yang ditahan itu. Jika tidak ia akan dipenjarakan. Bagi Balai Pendidikan pengorbanan ini harus terus dijalankan demi tercapainya sasaran perjuangan yang dicita-citakan, yaitu dihapusnya belasting tersebut bagi guru-guru.

Selain aksi tersebut, Balai Pendidikan juga telah menginstruksikan pada murid-muridnya agar tidak usah mengikuti perayaan 31 Agustus. Perayaan 31 Agustus adalah perayaan hari ulang tahun Ratu Wilhelmina (Raja Belanda), yang biasanya di Ambon dirayakan secara besar-besaran oleh seluruh masyarakat. Mengenai hal ini pemimpin Balai Pendidikan beranggapan bahwa tindaklah tepat bahwa orang yang masih hidup diagung-agungkan dengan perayaan-perayaan yang besar dan meriah. Tindakan tersebut menyebabkan Pemerintah Hindia Belanda menuduh Balai Pendidikan sebagai anti kekuasaan pemerintah. Pemimpin Balai Pendidikan E.U Pupella dipanggil untuk mempertanggungjawabkan tindakannya itu oleh Residen. Akan tetapi dengan bentuk pembelaan seperti tersebut di atas, maka pemerintah akhirnya tidak mempunyai alasan yang kuat untuk memenjarakan ketua Balai Pendidikan atau menutup sekolah tersebut.

Perjuangan terhadap politik pendidikan Pemerintah Hindia Belanda ini telah menunjukkan kepada kita betapa besar peranan Balai Pendidikan dalam mendorong, menanamkan dan mengembangkan perasaan nasional anak-anak asuhannya serta guru-gurunya meskipun tidak secara langsung. Dapat dikatakan bahwa Balai Pendidikan Ambon banyak mempunyai andil dalam pergerakan nasional di Maluku baik dalam pencetakan kader-kadernya maupun sebagai lambang berjuang ke arah itu. Balai Pendidikan telah menanam perasaan kebangsaan menuju Indonesia merdeka. Dalam sekolahnya tanpa ragu-ragu, sementara sekolah-sekolah lainnya belum memikirkan hal itu.

Setelah bangsa Indonesia merdeka dan pengakuan kedaulatan tahun 1950, cita-cita lembaga pendidikan ini telah terwujud. Setelah pemerintah Indonesia mengatur sistem pendidikan nasional dan menyaturagakan semua sistem pendidikan yang ada, maka pada tahun 1953 Balai Pendidikan mengintegrasikan sekolah-sekolahnya ke sekolah pemerintah.

BAB V PENDIDIKAN ZAMAN JEPANG

A. PENDAHULUAN

Pada tanggal 8 Maret 1942 Belanda menyerah kalah tanpa syarat kepada Jepang. Zaman kejayaan dan keemasannya hilang dari Indonesia untuk selama-lamanya. Bangsa Indonesia mengalami penjajahan dan penderitaan baru karena cita-cita Jepang ialah memeras tanah air kita yang kaya raya dengan bahan-bahan baku dan tenaga manusia untuk kepentingan perangnya di Pasifik sebagai perwujudan dari cita-cita ekspansinya.

Untuk itu pemerasaan segera dimulai. Namun supaya hal ini tidak terasa oleh bangsa Indonesia, maka segera dipropagandakan dan ditanam ideologi baru, yakni ideologi **Hakko Ichu** 1) atau ideologi kemakmuran bersama di Asia Timur Raya. Di tegaskan bahwa Jepang berjuang mati-matian, melakukan perang suci untuk kepentingan dan kebahagiaan bangsa-bangsa Asia Timur. Dikerahkanlah **Sendenbu** yakni barisan propaganda Jepang dengan tugas menanamkan ideologi baru itu. Ideologi itu harus menghancurkan ideologi Indonesia Raya. Dan salah satu adat atau wadah yang penting ialah melalui pendidikan dan pengajaran.

B. PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN.

Usaha penanaman ideologi Jepang melalui sekolah dimulai dengan mengadakan latihan guru-guru. Mereka diberi tugas sebagai penyebar ideologi tersebut kepada anak didik maupun masyarakat pada umumnya. Mereka digembleng langsung oleh Jepang. Segera sesudah itu diadakan perubahan-perubahan besar dan penting dalam dunia pendidikan dan pengajaran yang membawa akibat-akibat penting di kemudian hari. Pertama-tama dihapusnya dualisme dalam pengajaran. Berbagai-bagai jenis sekolah rendah atau sekolah dasar yang ada pada zaman pemerintah Belanda dihapus sama sekali. Tidak ada lagi jenis pengajaran/sekolah Bumiputera dan pengajaran/sekolah Barat. Yang ada hanya satu jenis sekolah rendah bagi semua lapisan masyarakat. 2) Dengan bahasa Jepang disebut **Kokumin Gakkoo** dan lamanya belajar direncanakan 6 tahun. Sekolah-sekolah desa yang ada di tempat-tempat yang terpencil masih tetap ada dan namanya diganti menjadi sekolah pertama. Pendidikan menengah juga disederhanakan. Dengan demikian susunan persekolahan pada zaman Jepang ini adalah sebagai berikut :

1. Sekolah Rakyat (termasuk sekolah pertama)
2. Sekolah Menengah tiga tahun (SMP)
3. Sekolah Menengah Tinggi tiga tahun (SMA).

Bahasa Indonesia dipakai sebagai bahasa resmi dan bahasa pengantar. Bahasa Belanda dilarang sama sekali.

Selain sebagai alat politik, sekolah-sekolah sekaligus dipakai pula sebagai alat memperkenalkan kebudayaan Jepang kepada rakyat. Bahasa Jepang dijadikan mata pelajaran wajib dan adat kebiasaan Jepang harus pula ditaati. Sekolah juga pada waktu itu dieksploitasi guna kepentingan perang Jepang. Murid-murid seringkali diwajibkan melakukan **Kinrohooshi**, yaitu kerja bakti misalnya membersihkan bengkel-bengkel, asrama-asrama, mengumpulkan bahan-bahan untuk membuat pertahanan dan sebagainya. Untuk melipatgandakan hasil bumi dan bahan makanan, murid-murid diwajibkan setiap saat menanam pekarangan-pekarangan sekolahnya dengan tanaman-tanaman yang dibutuhkan. Latihan-latihan jasmani yang berupa latihan-latihan kemiliteran, mengisi sebahagian besar dari pada aktivitas murid-murid setiap hari. Untuk menanamkan semangat Jepang, maka tiap-tiap hari murid-murid harus mengucapkan sumpah pelajar dalam bahasa Jepang. Mereka diwajibkan menguasai bahasa Jepang dan nyanyian-nyanyian Jepang. Tiap-tiap pagi diadakan upacara. Pada upacara itu murid-murid harus menghormati pada bendera Jepang dan menyanyikan lagu kebangsaan Jepang **Kimigayo** dan melakukan penghormatan ke arah istana kaisar Jepang di Tokio. Sesudah itu diikuti dengan senam masaal untuk menanamkan **Nippon Seishin** (semangat Jepang).

Untuk mempopulerkan bahasa Jepang, maka diadakan ujian-ujian bahasa secara bertingkat untuk para guru, para pegawai dan umum. Untuk menarik hati para pegawai maka pemilik ijazah bahasa Jepang itu mendapat tambahan upah atau gaji. Kepada para murid sekolah pun diadakan politik yang sama. Perlombaan-perlombaan menyanyi dalam bahasa Jepang disertai dengan hadiah-hadiah yang menarik.

Semua kegiatan dalam bidang pendidikan dan pengajaran tersebut di atas selalu dijalankan dengan penuh disiplin dan ketaatan penuh. Suasana kebebasan dan demokrasi dalam pendidikan di sekolah tidak ada sama sekali. Pendidikan dan sekolah-sekolah yang diasuh oleh badan-badan swasta terutama oleh Gereja dan Zending boleh dikatakan lumpuh sama sekali. Gedung-gedung gereja, mesjid-mesjid dan gedung-gedung sekolah pada saat-saat yang mendesak dijadikan rumah sakit rumah-sakit darurat, gudang maupun asrama militer. Dalam keadaan demikian sudah tentu tidak ada kebaktian-kebaktian dan sekolah ditutup.

Demikianlah suasana pendidikan dan pengajaran di Maluku selama pendudukan militer Jepang yang tidak jauh bedanya dengan daerah-daerah lain di Indonesia.

B A B VI

PENDIDIKAN ZAMAN INDONESIA MERDEKA

A. PENDAHULUAN.

Perjuangan bangsa Indonesia akhirnya mencapai puncaknya pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan diproklamasikannya kemerdekaan bangsa Indonesia. Kemerdekaan yang berabad-abad lamanya dinantikan oleh segenap bangsa Indonesia akhirnya tiba juga. Proklamasi Kemerdekaan menimbulkan hidup baru di segala lapangan. Juga di lapangan pendidikan. Sesudah proklamasi itu dirasa perlu sekali untuk mengubah sistem pendidikan dan menyesuaikannya dengan suasana kemerdekaan.

Sebagai modal dan pedoman pertama bagi rakyat dan pemerintah di lapangan pendidikan, maka dipergunakanlah "Rencana pendidikan/pengajaran" yang telah dipersiapkan pada hari-hari terakhir penjajahan Jepang. 3) Segera Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan (P.P. dan K) yang pertama yaitu Ki Hadjar Dewantara mengeluarkan instruksi umum yang memerintahkan kepada semua kepala

kepala sekolah dan murid-muridnya supaya :

1. Mengibarkan "Sang Merah Putih" tiap-tiap hari di halaman sekolah.
2. Menghentikan pengibaran bendera Jepang dan menghapuskan nyanyian kebangsaan Jepang Kimigayo.
3. Melagukan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
4. Menghapuskan pelajaran bahasa Jepang, serta segala upacara yang berasal dari pemerintah Militer Jepang.
5. Memberi semangat kebangsaan kepada murid.

Selain rencana usaha pendidikan/pengajaran dan instruksi umum tersebut di atas, pemerintah mempergunakan juga Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai pedoman di lapangan pendidikan.

Selanjutnya pemerintah mengusahakan terus langkah-langkah penyempurnaan di bidang pendidikan. Dusahakan untuk membentuk suatu Undang-undang Pokok Pendidikan dan Pengajaran. Untuk itu diadakan beberapa kali kongres pendidikan yang meninjau berbagai masalah pendidikan dan pengajaran antara lain pada tahun 1949 di Yogyakarta. Juga beberapa panitia pendidikan dibentuk oleh pemerintah dengan tugas merencanakan dan merumuskan segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah-masalah pendidikan seperti :

1. Panitia Penyelidik Pendidikan Dan Pengajaran yang diketuai Ki Hadjar Dewantara pada tahun 1946 oleh Menteri P.P. dan K. Mr. Soewandi. Panitia ini bertugas untuk meninjau kembali dasar-dasar, isi susunan dan seluruh usaha pendidikan/pengajaran.
2. Panitia pembentukan rencana undang-undang pokok pendidikan dan pengajaran yang juga diketuai Ki Hadjar Dewantara pada tahun 1948 oleh Menteri P.P. dan K. Mr. Ali Sastroamidjojo. Panitia diberi tugas untuk menyusun rencana Undang-Undang Pokok Pendidikan Dan Pengajaran di sekolah. Dengan usaha yang keras melalui berbagai rintangan akhirnya Undang-undang tentang Dasar-dasar Pendidikan Dan Pengajaran Di Sekolah itu lahir pada tahun 1950 dan terkenal sebagai Undang-Undang No.4 tahun 1950 dengan nama Undang-Undang tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di sekolah (UUPP) dan berlaku di seluruh Indonesia.

Kemudian atas dasar UUPP inilah mulai diadakan perbaikan-perbaikan dan penyempurnaan terhadap semua struktur pendidikan pada zaman lampau yaitu zaman pemerintah kolonial Belanda dan zaman Jepang. Usaha-usaha dimulai dari pendidikan dasar dan kemudian pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Semua sekolah Dasar dijadikan Sekolah Rakyat 6 tahun (SR 6 tahun). Tingkatan dan mutu pendidikan diperbaiki dan menambah jumlah S.R.

B. USAHA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN.

Seperti diketahui di zaman penjajahan di Maluku telah ada Sekolah-sekolah dasar yang berbahasa Melayu dan ada pula yang berbahasa Belanda. Tidak semua

desa mempunyai sekolah. Ada sekolah-sekolah negeri dan ada pula sekolah-sekolah swasta terutama milik gereja Protestan, gereja Katolik dan satu dua badan swasta lainnya. Pendidikan bagi masyarakat Islam kurang mendapat perhatian baik dari pihak pemerintah Belanda maupun dari pihak masyarakat Islam sendiri. Anak-anak hanya mengunjungi langgar-langgar. Pada umumnya di Maluku sebelum perang hanya rakyat Kristenlah yang memperhatikan kemajuan-kemajuan melalui pendidikan. Tetapi pendidikan lanjutan sangat terbatas, sehingga rakyat rata-rata hanya tamat sekolah dasar saja.

Usaha-usaha pengembangan pendidikan baik segi kualitas maupun kuantitas oleh pemerintah kolonial Belanda sangat minim. Di kota Ambon yang menjadi pusat kegiatan pendidikan dan kebudayaan misalnya dapat dicatat keadaan sekolah-sekolah sebagai berikut :

Sampai tahun 1941 hanya terdapat dua SD 6 tahun berbahasa Melayu. Sekolah-sekolah dasar 7 tahun berbahasa Belanda untuk anak Indonesia adalah **Ambonsche Burgerschool**, tiga buah HIS Kristen bersubsidi, HIS Balai Pendidikan, Sekolah Al-hilal untuk anak-anak turunan Arab dan sebuah **Schakelschool**. Khusus untuk anak-anak Belanda dan peranakan serta anak-anak **gelijkgesteld** dan golongan inteligensia disediakan tiga buah ELS. Di samping itu ada beberapa sekolah lanjutan seperti **Kopschool** (Sekolah untuk kerajinan kewanitaan). Sebuah sekolah pertukangan dua tahun, sebuah **Normaalschool**. Di luar kota Ambon tidak ada sekolah-sekolah lanjutan. Satu-satunya sekolah yang tertinggi di seluruh Maluku adalah sebuah MULO 4) yang menerima murid-murid lulusan HIS. Lamanya sekolah tiga tahun, ditambah satu kelas persiapan sehingga menjadi empat tahun, ditambah satu kelas persiapan sehingga menjadi empat tahun. Ada sebuah **Kweekschool** (sekolah guru negeri) bagi pemuda-pemuda dari Indonesia Timur. Sejak tahun 1934 sekolah ini ditutup karena penghematan. Murid-muridnya dialihkan ke Bandung dan Yogyakarta. Selain itu ada dua buah sekolah pendeta kepunyaan gereja protestan, yaitu STOVIL dan Sekolah Guru Jumat.

Keadaan sekolah-sekolah tersebut di atas bertambah parah lagi dengan datangnya zaman Jepang. Semua sekolah yang berbahasa Belanda ditutup. Banyak pula sekolah swasta kepunyaan Gereja dan Zending yang ditutup karena berbagai hal. Selama masa Jepang tidak ada penambahan sekolah. Hanya dibuka beberapa buah sekolah khusus Jepang untuk tempat latihan di kota Ambon.

Sesudah selesai Perang Dunia II, pemerintah Belanda (NICA) kembali ke Maluku dan berkuasa lagi sampai pengakuan kedaulatan kepada Republik Indonesia tahun 1949/1950. Sesudah Perang Dunia II dibuka kembali sekolah dasar berbahasa Indonesia dan Belanda. Di kota Ambon dibuka **Herstel MULO**, yang kemudian diintegrasikan ke dalam **Middelbare School** (MS) tahun 1947. Pada tahun 1946 dibuka sebuah **Algemene Middelbare School** (AMS) dan sebuah Sekolah Menengah (SM-4 tahun). Tahun 1947 dibuka sebuah sekolah guru yang namanya **Kweekschool Nieuwe Stijl**. 5) Pada tahun 1948 dibuka sebuah kursus **Hoofdacte** untuk guru-guru yang akan menjadi guru di HIS. Juga sebuah Sekolah Normal untuk pengadaan

guru-guru bagi sekolah Dasar. Dua buah sekolah kejuruan juga dibuka yaitu sebuah sekolah pertukangan dua tahun dan sebuah sekolah kepandaian puteri.

Di luar kota Ambon ada SM di Saparua, Ternate dan Tual yang dibuka tahun 1947, setelah diintegrasikan dari **Middelbare School (MS)**. Kemudian dibuka pula kursus **Normaalschool** untuk mengatasi kekurangan guru-guru sekolah rakyat.

Demikianlah hasil usaha pemerintah kolonial Belanda di bidang pendidikan di Maluku. Ternyata tidak dibuka perspektif kepada rakyat untuk mengembangkan pendidikannya. Dan untuk mendapat pengetahuan dan pendidikan yang lebih maju terpaksa sebagian murid-murid yang mampu (mendapat beasiswa) meneruskan pelajaran mereka ke luar daerah Maluku. Setamat mereka, tidaklah dapat mereka kembali sebab pemerintah Belanda tidak menciptakan obyek-obyek ekonomi dan obyek-obyek pekerjaan untuk menampung mereka. Selain itu dari desa-desa sejak dahulu para pemuda digembleng untuk menjadi serdadu, polisi dan marinir. Semua kenyataan ini menyebabkan daerah Maluku kehilangan tenaga-tenaga pembangun masyarakat.

Setelah selesai revolusi fisik dan daerah serta rakyat Maluku dibebaskan kembali dari pemberontakan kaum separatis RMS tahun 1950, maka dimulailah pembangunan daerah ini di segala bidang. Segera bidang pendidikan dan pengajaran mulai ditangani Pemerintah Republik Indonesia dan dibantu badan-badan swasta yang berminat dalam pendidikan.

1. Usaha Pemerintah.

Pada akhir tahun 1950 Departemen/Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan (PP dan K) Republik Indonesia, mengambil alih tanggungjawab bidang pendidikan dan kebudayaan di Maluku. Kota Ambon dijadikan pusat kedudukan dan pimpinan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dalam iklim kemerdekaan. Dari kota Ambon diorganisir satu jaringan aktivitas pendidikan dan pengajaran serta pembentukan suatu watak nasional yang berdasarkan Pancasila di seluruh provinsi Maluku.

Organisasi disusun sesuai tuntutan masa. Setiap kali diperluas dan disempurnakan sesuai dengan perkembangan sekolah-sekolah, seperti pembebasan buta huruf pendidikan orang dewasa, pembangunan desa-desa, peningkatan kegiatan olah raga, kesenian dan lain-lain.

Sesudah mengalami berbagai perubahan, maka sampai dengan tahun 1968 instansi-instansi pimpinan pendidikan tersusun sebagai berikut 6).

- a). **Perwakilan Pendidikan Dan Kebudayaan**, yang mewakili Menteri P dan K dan mengkoordinasi empat kantor Daerah Direktorat Jenderal yakni :
 - 1). Kantor Daerah Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar.
 - 2). Kantor Daerah Direktorat Jenderal Kebudayaan
 - 3). Kantor Daerah Direktorat Jenderal Olah Raga.
 - 4) Kantor Daerah Direktorat Jenderal Pemuda dan Pramuka.

Kantor Daerah Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar terdiri dari :

- 1). Inspeksi Pendidikan Dasar/Prasekolah
- 2). Inspeksi Pendidikan Umum, Kejuruan dan Kursus-kursus yang meliputi:
Urusan SMP; Urusan SMA; Urusan Pendidikan Ekonomi; Urusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga; dan Urusan Kursus-kursus Kejuruan.
- 3). Inspeksi Pendidikan Guru
- 4). Inspeksi Pendidikan Teknologi
- 5). Inspeksi Pendidikan Masyarakat.

Kantor-kantor Daerah Direktorat Jenderal mempunyai kantor-kantor di wilayah-wilayah. Semua jenis sekolah dari SD sampai dengan SLTA dan kursus-kursus langsung diurus oleh Kantor Daerah Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dengan Inspeksi-Inspeksi dan urusan-urusan. Sedangkan sesudah tahun 1968, susunan organisasi instansi-instansi Pendidikan dan Kebudayaan keadaannya seperti Kanwil sekarang (1981). Pimpinan Kantor Perwakilan P dan K antara lain: Tamaela, I.O. Nanulaitta dan D.D. Soumokil.

Organisasi pendidikan ini jauh lebih luas dan lebih banyak usaha-usahanya dari pada organisasi pendidikan di zaman penjajahan. Sebabnya karena rencana-rencana ditujukan untuk mempertinggi kecerdasan seluruh rakyat agar tercapailah kesejahteraan spiritual maupun material.

Hasil-hasil usaha pendidikan dalam alam kemerdekaan ternyata sangat mengembirakan dan menakjubkan. Sejak tahun 1951 sampai tahun 1981 yaitu selama tiga dasawarsa terakhir ini telah terjadi kemajuan dan perkembangan yang pesat dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Hal ini disebabkan karena kesadaran kesatuan nasional Indonesia dan kesadaran bernegara Pancasila telah tertanam di dalam jiwa masyarakat, terutama di dalam jiwa generasi muda.

Buta huruf telah dapat diatasi. Perluasan sekolah sekolah baik di kota-kota maupun di desa-desa yang dahulu tidak pernah ada sekolah, berjalan dengan cepat. Keadaan sekolah-sekolah tersebut dapat dilihat dari pada statistik-statistik terlampir. Ibu kota propinsi Ambon dan ibu kota ibu kota Kabupaten Maluku Utara, Tengah dan Tenggara seperti Ternate, Masohi, Tual dan kota-kota Kecamatan lainnya di propinsi Maluku telah sangat padat dengan murid-murid yang berjumlah puluhan sampai ratusan ribu banyaknya belum terhitung jumlah mahasiswa. Kota Ambon dan kota Ternate benar-benar telah berkembang menjadi kota pelajar dan mahasiswa.

Akibat dari perkembangan pendidikan yang sangat cepat itu, timbul kekurangan gedung dan bilik-bilik sekolah, alat-alat pelajaran guru-guru, buku dan biaya. Orang tua murid dalam organisasi POM dan BP3 turut membantu pemerintah membiayai sekolah-sekolah dan kegiatan-kegiatan ekstra kurikuler dari murid-murid. Di samping pemerintah yayasan-yayasan pendidikan milik gereja-gereja Protestan, Roma Katolik, organisasi-organisasi Islam, ABRI, organisasi-organisasi wanita membantu pemerintah dengan jalan membuka sekolah-sekolah swasta un-

tuk menampung murid-murid yang setiap tahun bertambah jumlahnya (lihat lampiran).

Guru-guru untuk sekolah dasar dididik di sekolah-sekolah guru yang ada. Untuk guru sekolah-sekolah lanjutan dididik pada PGSLP dan IKIP Ambon Cabang Jakarta, kemudian baru dilanjutkan pada FK dan FIP Universitas Pattimura. Ada juga yang datang dari IKIP-IKIP di pulau Jawa dan Ujung Pandang dan lain-lainnya. Kekurangan guru masih sangat besar sampai sekarang.

Di samping sekolah-sekolah yang diasuh oleh Departemen P dan K, ada pula sekolah-sekolah yang dibuka oleh departemen lain, misalnya Sekolah Bidan/Perawat di kota Ambon oleh Departemen Kesehatan, sebuah sekolah Perikanan Laut dan sebuah Sekolah Pertanian Menengah Atas (SPMA) milik Departemen Pertanian dan Sekolah Menengah Pelayaran didirikan oleh Departemen Perhubungan Laut.

b. Perkembangan Olah Raga Dan Kesenian.

Dalam bidang Olah Raga dan kesenian terdapat pula perkembangan-perkembangan yang pesat. Di antara para pelajar cabang olah raga atletik mendapat perhatian besar. Nomor-nomor lari merupakan keistimewaan dari anak-anak Maluku dalam pertandingan-pertandingan nasional. Suatu panghalang yang utama dalam cabang olah raga ini ialah tidak adanya lapangan atletik di kota Ambon. Lain cabang olah raga kegemaran pemuda-pemuda dan pelajar-pelajar ialah bulu tangkis, bola basket, tinju dan yudo. Tennis belum mencapai tingkat yang tinggi.

Salah satu olah raga kegemaran rakyat adalah sepak bola. Di kota Ambon dan Ternate terdapat perkumpulan-perkumpulan sepak bola. Namun tahun-tahun terakhir ini mengalami kemunduran, sehingga tidak dapat mencapai tingkat final nasional. Ada beberapa sebab antara lain kekurangan lapangan.

Pelabuhan Ambon dan pelabuhan-pelabuhan lainnya sangat cocok bagi olah raga parahu layar dan ski air. Tetapi belum mendapat perhatian masyarakat. Berenang belum mencapai tingkat tinggi, walaupun rata-rata semua orang bisa berenang karena hidup dekat laut. Sarana kolam renang belum ada yang memenuhi syarat.

Usaha-usaha olah raga diusahakan dan dikoordinasi oleh Kantor Daerah Direktorat Jenderal Olah Raga. Guru olah raga diperoleh dari Sekolah Menengah Olah Raga (SMOA) di Ambon.

Kesenian sangat digemari rakyat dan yang mendapat tempat di kalangan para pelajar adalah seni musik, seni suara dan seni tari. Penduduk gemar sekali akan musik, menyanyi dan menari. Seni tari belum mendapat tingkat modernisasi yang diinginkan. Seni suara merata sampai kepada rakyat biasa. Tua dan muda bergabung dalam perkumpulan-perkumpulan seni suara.

Band-band musik mengembangkan seni musik yang digemari oleh muda-mudi, sesuai dengan perkembangan zaman. Rekreasi bagi penduduk kota Ambon dan Ternate sudah mulai mendapat perhatian. Tempat-tempat rekreasi seperti gedung-gedung kesenian belum memenuhi syarat. Perkembangan gedung bioskop makin

mencukupi kebutuhan. Kota-kota di Maluku dikelilingi oleh pantai-pantai yang indah, yang merupakan tempat-tempat rekreasi, piknik, berenang dan lain-lain. Kantor Daerah Direktorat Kebudayaan mempunyai tugas menyelidiki segala aspek kebudayaan rakyat Maluku, mengembangkan apa yang berguna bagi masyarakat sekarang ini dan memelihara apa yang hidup di dalam masyarakat bagi kesejahteraan spiritual dan material rakyat. Atas inisiatif kantor daerah Direktorat kebudayaan pernah diadakan Seminar sejarah Maluku di Ambon yang berhasil dengan memuaskan. Pendidikan agama juga mendapat tempat yang utama di sekolah-sekolah dan diawasi oleh Perwakilan P dan K dan Jawatan Agama.

c. Perguruan Tinggi.

Di daerah Maluku Perguruan Tinggi hanya di jumpai di Kota Ambon dan kota Ternate. Di kota-kota tersebut terdapat Perguruan tinggi kepunyaan Pemerintah maupun yang diusahakan oleh pihak swasta. Di kota Ambon dewasa ini terdapat sebuah Universitas negeri yaitu Universitas Pattimura, sebuah Sekolah Tinggi Theologia milik Gereja Protestan Maluku dan Akademi Pemerintahan Dalam Negeri. (APDN) yang diusahakan oleh Departemen Dalam Negeri. Departemen P dan K cq Perwakilan Propinsi Maluku pernah membuka pula sebuah Akademi Administrasi Niaga (AAN) yang kemudian ditutup pada tahun 1974. Di kota Ternate Maluku Utara terdapat hanya sebuah Perguruan Tinggi swasta yaitu Universitas Sultan Hairun. Di kota Ambon pada tahun 1963 dibuka cabang dari IKIP Ambon. Pada tahun 1970 IKIP Ambon diintegrasikan ke dalam Universitas Pattimura. Di kota Tual Maluku Tenggara pada tahun 1971 oleh Pemerintah Daerah dibuka sebuah IKIP swasta. Namun baru berjalan dua semester sudah ditutup.

1). UNIVERSITAS PATTIMURA.

a). Sejarah Perkembangan.

Universitas Pattimura didirikan pada tanggal 3 Oktober 1956 oleh sebuah yayasan swasta yang bernama "Yayasan Perguruan Tinggi Maluku" yang dibentuk pada tanggal 20 Juli 1955. Pada tanggal 3 Nopember 1961 yayasan ini diubah namanya menjadi "Yayasan Perguruan Tinggi Maluku Dan Irian Barat" dan diketuai oleh Dr.M.Haulussy. Yayasan ini dibentuk atas prakarsa beberapa tokoh dan pemuka masyarakat di daerah ini yang nama-namanya tidak lepas dari sejarah pendirian Universitas Pattimura yaitu : Cor Loppies, E.J.Pupella, F.M. Pupella, H.Hamid bin Hamid, Tim Sahertian, Ais Kainama, H.J.K.Corputty, D. Tahitu S.H., Mohamad Syah Kamarullah, Z.M.Sitanala, M.H. de Quelju, Abdul Basir Latuconsina dan D.Renyaan. Beberapa tokoh lainnya yang mempunyai jasa yang besar dalam membantu terbentuknya Universitas Pattimura ialah Letnan Kolonel Herman Pietersz yang pada waktu itu menjabat sebagai Panglima Kodam Maluku dan Irian Barat bersama Kepala Stafnya berturut Mayor Leo Lopulissa dan Mayor Mingus Nanlohy.

Universitas Pattimura dimulai dengan satu Fakultas sulungnya, yaitu Fakultas Hukum dipimpin oleh Dekannya yang pertama yaitu Mr. Chris Soplanit dengan jumlah mahasiswa yang pertama sebanyak 60 orang. Gedung Fakultas Hukum merupakan gedung pertama dari Universitas Pattimura yang peletakan batu pertamanya dilakukan oleh almarhum Dr. J.B. Sitanala seorang sarjana tertua pada waktu itu di Ambon, gedung mana kini dijadikan Kantor Pusat Universitas Pattimura.

Pendirian Universitas Pattimura pada tanggal 2 Oktober 1956 itu pada hakekatnya adalah perwujudan aspirasi seluruh rakyat di Maluku untuk ikut secara nyata dalam pembangunan bangsa dan negara. Pendirian Universitas Pattimura merupakan salah satu tonggak sejarah yang sangat penting di daerah ini dan merupakan suatu momentum kebangunan rakyat daerah Maluku untuk ikut serta mengikuti dan mengisi cita-cita kemerdekaan Indonesia. Melihat kepada situasi dan kondisi pada waktu itu rasanya pendirian Universitas Pattimura pada waktu masih belum mungkin terwujud kalau tidak didukung oleh cita-cita luhur semangat dan tekad yang kuat dari putera-putera terbaik di daerah ini dengan dukungan sepenuhnya dari seluruh masyarakat.

Pada tanggal 6 Oktober 1959 dibuka Fakultas Sosial Politik, menyusul pembukaan fakultas-fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) pada bulan September 1961.

Pada tanggal 1 Agustus 1962 dengan Surat Keputusan Menteri PTIP No.99 tahun 1962, tanggal 8 Agustus 1962, Universitas Pattimura ditetapkan sebagai Universitas Negeri.

Dengan Surat Keputusan Presiden R.I. No.66 tahun 1963 tanggal 23 April 1963 dengan daya surut terhitung mulai 1 Agustus 1962 nama Universitas Pattimura dikukuhkan/disahkan sebagai Universitas Pattimura.

Untuk rakyat Maluku khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya nama Universitas Pattimura ini mempunyai pengertian yang khas. Nama Universitas ini diambil dari nama seorang pahlawan nasional bangsa Indonesia yang dalam tahun 1817 berjuang dengan hebat melawan penjajahan Belanda. Dipilihnya nama Pattimura untuk Universitas ini tentu saja mempunyai pengertian yang khusus. Semangat berjoang, semangat berkorban dan kecintaan serta pengabdian kepada tanah air yang telah dirintis oleh para pahlawan dalam perang Pattimura, diharapkan akan menjiwai setiap mereka yang menuntut ilmu pada almamater Universitas Pattimura.

Pada waktu penergian Universitas Pattimura, kepemimpinan Universitas berbentuk Presidium dengan ketuanya yang pertama Soetrisno Hamidjojo SH dan beranggotakan Kolonel Boesiri/Pangdam XV Pattimura, Muhamad Padang Gu-bernur Maluku, Drs. Soehardjo/Pangdak XX Maluku dan Dr. M. Haulussy.

Pada tanggal 1 September 1964 dibuka lagi dua buah Fakultas masing-masing Fakultas Pertanian/Kehutanan dan Fakultas Peternakan, menyusul pembukaan

Fakultas Ekonomi pada tanggal 15 September 1964. Pada tanggal 8 Agustus 1964 FKIP Universitas Pattimura beralih statusnya menjadi IKIP Jakarta-Cabang Ambon. Namun pada tanggal 16 September 1969 IKIP Jakarta Cabang Ambon diintegrasikan kembali ke dalam Universitas Pattimura sebagai dua fakultas, yaitu Fakultas Keguruan dan Fakultas Ilmu Pendidikan. Pada tanggal 1 Januari 1970 dibuka Fakultas Teknik dalam rangka pengintegrasian kembali ke dalam Universitas Pattimura dari ex Proyek Institut Teknologi Ambon.

Pada tahun 1974 Fakultas Peternakan dilengkapi/ditambah dengan jurusan perikanan sehingga menjadi Fakultas Peternakan/Perikanan. Dengan demikian sampai saat ini Universitas Pattimura mempunyai delapan buah fakultas, masing-masing Fakultas Hukum, Fakultas Sosial Politik, Fakultas Pertanian/Kehutanan, Fakultas Peternakan/Perikanan, Fakultas Ekonomi, Fakultas Keguruan, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Fakultas Teknik.

b). Proses Perkembangan.

Melihat proses pembentukan Universitas Pattimura sebagai yang dikemukakan di atas jelas bahwa pembukaan berbagai fakultas terjadi pada waktu yang berbeda-beda namun dilakukan dalam situasi dan kondisi persyaratan yang hampir sama dengan yang dialami pada waktu pembentukan Universitas Pattimura sendiri.

Dari tahun 1956-1962 Universitas Pattimura masih berstatus swasta dan dari tahun 1962 - 1971 Universitas Pattimura berstatus negeri dipimpin oleh sebuah Presidium yang sering berganti-ganti sedang anggota pimpinan dan anggota presidium sebagian besar terdiri dari pejabat anggota Muspida Tingkat I Maluku yang karena tugas pokoknya yang sudah cukup berat tidak dapat melaksanakan pembinaan akademi secara intensif dan terarah. Baru pada tahun 1971, Universitas Pattimura untuk pertama kalinya mempunyai seorang rektor yang pertama ialah Ir.L.Nanlohy. Dengan demikian maka Universitas sampai saat ini telah mengalami tiga fase perkembangan yaitu :

- Fase 1. Tahun 1956-1962, Universitas Pattimura berstatus swasta dan diasuh oleh Yayasan Perguruan Tinggi Maluku dan Irian Barat.
- Fase 2. Tahun 1962-1971, Universitas Pattimura berstatus negeri dan dipimpin oleh sebuah presidium.
- Fase 3. Tahun 1971 - sekarang, Universitas Pattimura dipimpin oleh seorang rektor.

Tiap fase perkembangan sudah tentu mempunyai/menghadapi problema masing-masing dan mempunyai rencana kerja yang berbeda sesuai dengan kondisi dan situasi yang dihadapinya. Dengan tetap menghormati semua usaha dan kemauan baik yang telah diperlihatkan oleh kepemimpinan Universitas pada waktu itu, namun pada dasarnya dapat dikatakan kondisi dan situasi seperti yang terdapat pada fase perkembangan pertama dan kedua itu tidak banyak membawa perubahan yang berarti. Pada waktu itu masih terdapat banyak masalah yang be-

lum terpecahkan, banyak hal yang belum dilihat dan banyak cara yang belum diterapkan dan belum terdapat banyak tenaga staf yang bisa mendukung semua usaha pembinaan. Pada waktu itu pikiran dan segala usaha lebih banyak tenaga staf yang bisa mendukung semua usaha pembinaan. Pada waktu itu pikiran dan segala usaha lebih banyak diletakkan pada bagaimana mempertahankan kelangsungan hidup Universitas dari pada bagaimana Universitas seharusnya dikembangkan. Landasan bagi perkembangan Universitas Pattimura secara terarah boleh dikatakan baru mulai dapat dikatakan sejak diangkatnya rektor yang pertama.

Dari gambaran sepintas tersebut di atas jelaslah bahwa dalam kurun waktu 15 tahun pertama dari perkembangan Universitas Pattimura yaitu antara tahun 1956 - 1971 tidak banyak yang telah dan dapat dilakukan untuk mengembangkan dirinya dengan sebaik-baiknya. Peletakkan dasar perkembangan yang sesungguhnya baru terjadi delapan tahun yang lalu di bawah Rektor Ir.L.Nanlohy dan diteruskan oleh Moh.R.Lestaluhu S.H.

c). **Tingkat Perkembangan Unpatti sampai saat ini.**

(1). **Kelembagaan**

Universitas Pattimura terdiri atas unit-unit sebagai berikut:

1. Kantor Pusat
2. Fakultas-Fakultas
 - a. Hukum
 - b. Sosial Politik
 - c. Peternakan/Perikanan
 - d. Pertanian/Kehutanan
 - e. Ekonomi
 - f. Keguruan
 - g. Ilmu Pendidikan
 - h. Teknik
3. Perpustakaan Universitas
4. Badan/Lembaga
 - a. Badan Perencanaan dan Pengendalian Pengembangan
 - b. Management
 - c. Penelitian dan Pengabdian masyarakat
 - d. Demografi
 - e. Studi Kependidikan
 - f. Anthropologi/Bahasa
 - g. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kelautan
5. Laboratorium Universitas
 - a. Fisika
 - b. Kimia
 - c. Biologi
 - d. Bahasa

Pada tingkat Fakultas terdapat unit-unit sebagai berikut :

1. Perpustakaan Fakultas

- a. Pada Fakultas Pertanian/Kehutanan: Laboratorium tanah, (Lab. Meteorologi, Hama Tanaman, Teknologi kayu (dalam rencana).
- b. Pada Fakultas Peternakan/Perikanan: Laboratorium Makanan Ternak (Lab. Mikrobiologi dalam rencana).
- c. Pada Fakultas Teknik: Laboratorium Teknologi terdiri dari Ilmu Logam, Kekuatan Material, Listrik Kapal/Umum, Hidrolika, Teknologi Mekanika, Mesin (Termodinamika, Motor bakar, Motor bantu, dan Turbin).

(2) Jurusan dan Jenjang Pendidikan

Keadaan jurusan dan jenjang pendidikan sebagai berikut :

A. Fakultas/Jurusan	Jenjang Pendidikan	Keterangan
1. Hukum Dagang	Sarjana	Spesialisasi
2. Hukum Tata Negara	s.d.a.	mulai Tingkat IV
3. Hukum Perdata	s.d.a.	
4. Hukum Adat	s.d.a.	
5. Hukum Internasional	s.d.a.	
B. Fakultas Sos-Pol		
6. Administrasi Negara	s.d.a.	mulai tahun 1977
7. Sosiologi	s.d.a.	mulai tahun 1979
C. Fakultas Pertanian/Kehutanan		
8. Pertanian	s.d.a.	mulai tahun 1968
9. Kehutanan	s.d.a.	mulai tahun 1968
D. Fakultas Peternakan/Perikanan		
10. Peternakan	s.d.a.	mulai tahun 1968
11. Perikanan	s.d.a.	mulai tahun 1976
E. Fakultas Ekonomi		
12. Ekonomi Umum	s.d.a.	mulai tahun 1979
13. Ekonomi Perusahaan	s.d.a.	mulai tahun 1979
F. Fakultas Keguruan		
14. Matematika	s.d.a.	mulai tahun 1979
15. Biologi	s.d.a.	mulai tahun 1979
16. P.M.P. dan Hukum	s.d.a.	mulai tahun 1977
17. Sejarah	s.d.a.	mulai tahun 1979

18. Geografi	s.d.a.	mulai tahun 1977
19. Ekonomi	s.d.a.	mulai tahun 1977
20. Bahasa Indonesia	s.d.a.	mulai tahun 1979
21. Bahasa Inggris	s.d.a.	mulai tahun 1977
22. Bahasa Jerman	s.d.a.	mulai tahun 1979

G. Fakultas Ilmu Pendidikan

23. Pendidikan Sosial	s.d.a.	mulai tahun 1979
24. Bimbingan Dan Penyuluhan	s.d.a.	mulai tahun 1977
25. Didaktik dan Kurikulum	s.d.a.	mulai tahun 1977
26. Administrasi Pendidikan	s.d.a.	mulai tahun 1977

(2) Tenaga Edukatif dan Mahasiswa

Keadaan Tenaga pengajar dan mahasiswa pada tahun pengajaran 1980 adalah sebagai berikut :

A. Dosen/Asisten Tetap

1. Fakultas Hukum	16 orang
2. Fakultas Sosial Politik	27 orang
3. Fakultas Pertanian/Kehutanan	29 orang
4. Fakultas Perikanan/Peternakan	13 orang
5. Fakultas Ekonomi	21 orang
6. Fakultas Keguruan	62 orang
7. Fakultas Ilmu Pendidikan	19 orang
8. Fakultas Teknik	18 orang
Jumlah	205 orang

B. Jumlah Mahasiswa

1. Fakultas Hukum	676 orang
2. Fakultas Sos-Pol	558 orang
3. Pertanian/Kehutanan	269 orang
4. Peternakan/Perikanan	235 orang
5. Fakultas Ekonomi	443 orang
6. Fakultas Keguruan	676 orang
7. Fakultas Ilmu Pendidikan	279 orang
8. Fakultas Teknik	225 orang
9. Program D1 D2 D3	420 orang
Jumlah	3811 orang

(4) Tantangan Dan Masa Depan

Dengan bertumpu pada dasar-dasar yang telah ditetapkan Universitas Pattimura berusaha untuk mengembangkan dirinya dengan sebaik-baiknya. Dalam menyongsong masa depan banyak tantangan dan masalah

yang akan dihadapi baik masalah-masalah intern maupun ekstern. Masalah-masalah pokok yang dihadapi pendidikan tinggi di Indonesia dialami Universitas Pattimura yang juga antara lain :

- Produktivitas yang rendah
- Keterbatasan daya tampung
- Kemampuan berkembang yang rendah
- Keterbatasan kemampuan melaksanakan penelitian
- Belum mantapnya pembinaan terhadap mahasiswa
- Penampungan calon mahasiswa
- Organisasi manajemen yang belum baik.

Masalah-masalah tersebut di atas berkaitan dengan faktor hambatan/keterbatasan antara lain : keterbatasan dana dan sarana, serta keterbatasan tenaga staf secara kualitas dan kuantitas.

Selain masalah-masalah intern tersebut di atas, Universitas Pattimura juga dihadapkan dengan masalah-masalah ekstern yang mempengaruhi perkembangannya seperti: masalah Unpatti dengan lingkungannya, Unpatti di tengah-tengah pergolakan dunia yang ditandai oleh adanya berbagai perubahan dan tantangan dan di dalam suasana perjuangan bangsa Indonesia menegakkan dan mengisi kemerdekaannya. Selanjutnya dalam masalah Pembangunan Pendidikan Tinggi di Indonesia di masa mendatang, Universitas Pattimura harus juga memikirkan identitas dan peranannya.

d). Unpatti dan Pola Ilmiah Pokoknya.

Pada bulan September 1974 Menteri P dan K dalam sambutannya pada Lokakarya **Oceanologie** (Ilmu-ilmu Kelautan) di Perguruan Tinggi yang diselenggarakan di Ujung Pandang menganjurkan agar setiap Universitas mengembangkan suatu pola ilmiah pokok yang akan mewarnai atau menjadi identitas Universitas tersebut. anjuran Menteri P dan K tersebut segera mendapat respons yang positif di kalangan Universitas Pattimura dan pada rapat senat terbuka Unpatti pada tanggal 21 Oktober 1974 dalam rangka merayakan **Dies Natalis** yang ke-18 Unpatti, Rektor mengumumkan ketetapan dan tekad Unpatti untuk mengembangkan Ilmu-ilmu Kelautan sebagai Pola Ilmiah Pokok. Tekad Unpatti ternyata mendapat dukungan sepenuhnya dari masyarakat dan pemerintah daerah Maluku.

Pada saat yang hampir bersamaan dengan Rapat Rektor seluruh Indonesia di Jakarta pada bulan Pebruari, di mana Menteri P dan K memajukan sebuah dokumen yang sangat penting yang kemudian ditetapkan sebagai Kebijakan Pengembangan Pendidikan Tinggi, yang di dalamnya memuat gagasan tentang Pola Ilmiah Pokok (PIP), UNPATTI telah mengadakan suatu simposium berjudul "Universitas Pattimura dan Pengembangan Maritim" antara bulan Januari - Maret 1975. Dalam simposium ini telah diletakan dasar-dasar pikiran tentang cita-cita Unpatti untuk memilih dan menjadikan pengembangan Ilmu-ilmu Kelautan sebagai pola ilmiah pokoknya.

Setelah diselenggarakannya Simposium "Universitas dan Pengembangan Maritim tersebut menyusul kegiatan-kegiatan lainnya yang berhubungan dengan pengembangan ilmu-ilmu kelautan antara lain :

- (1) Pada bulan Juni 1975 diselenggarakan Lokakarya oleh UNPATTI tentang "Pengembangan Kurikulum Unpatti" di mana selain membicarakan tentang perbaikan dan penyempurnaan kurikulum yang ada, dipikirkan kemungkinan bagi dimasukkannya aspek-aspek kelautan ke dalam kurikulum tiap fakultas sebagai salah satu langkah untuk mewarnai PIP UNPATTI.
- (2) Pada bulan Pebruari 1976 di bawah koordinasi Ditjen Pendidikan Tinggi di selenggarakan suatu Rapat Kerja bernama "Pertemuan Pengembangan Pendidikan Tinggi Teknologi Perkapalan" di Ambon yang dihadiri oleh berbagai Universitas/Institut di mana UNPATTI terlibat secara aktif dalam pertemuan tersebut.
- (3) Pada bulan Oktober 1976 dalam memperingati **Dies Natalis** UNPATTI yang ke-20, maka seluruh tema kegiatan Dies Natalis berkisar pada Pengembangan Ilmu-ilmu Kelautan sebagai PIP UNPATTI. Pada **Dies Natalis** tersebut telah diajukan sebuah **orasi dies** oleh Ir.L.Nanlohy, berjudul "Universitas Pattimura dan Pengembangan Pembangunan Bidang Maritim, suatu Pendekatan Menuju Penunjang Pembangunan Daerah dan Pembangunan Nasional"
- (4) Pada bulan Desember 1976 UNPATTI ikut serta dalam seminar "Pengembangan Pendidikan Tinggi Teknologi Perkapalan dan Industri Maritim" yang diselenggarakan di Pandaan.
- (5) Pada tanggal 14 Mei 1977 secara resmi Rektor menetapkan Pengembangan Ilmu-ilmu Kelautan sebagai Pola Ilmiah Pokok Universitas Pattimura dan dituangkan dalam S.K. Rektor Universitas Pattimura No. 20 Tahun 1977. Keputusan Rektor ini selain memperhatikan cita-cita dan tekad yang hidup di kalangan Universitas dan masyarakat, juga merupakan realisasi dari Statuta Universitas Pattimura yang disahkan oleh Menteri P dan K dengan S.K Menteri P dan K No.0298/U/1977, tanggal 27 Juli 1977, yang antara lain mencantumkan bahwa pembinaan dan pengembangan Universitas Pattimura diarahkan kepada keserasian ekosistem Daerah Maluku dalam rangkaian kesatuan ekosistem Indonesia.
- (6) Pada bulan Desember 1977 di bawah koordinasi Ditjen Pendidikan Tinggi diselenggarakan Seminar tentang **Marine Sciences and Ocean Engineering** di Ambon. Seminar ini dihadiri antara lain oleh wakil-wakil dari Departemen P dan K dan Ditjen Pendidikan Tinggi, Konsorsia Teknologi dan pertanian, Departemen Pertanian, Utusan Menteri Negara Riset, LON-LIPPI, HIDROSAL, Pemda Maluku, Universitas Pattimura, Universitas Hassanuddin, U.I., I.T.B., UNIP dan unsur swasta. Sifat seminar ini sangat penting karena di sini diputuskan pembagian kerja/pembidangan antara beberapa Universitas/Institut yang berorientasi kepada Ilmu-ilmu Kelautan, terutama antara Universitas Pattimura, Universitas Hassanuddin dan Institut Teknologi Surabaya (ITS).

Dalam rangka mengembangkan bidang-bidang tertentu sehubungan dengan pengembangan kelautan ini, maka pada tahun 1978 telah ditandatangani Perse-tujuan kerja sama dalam rangka Pengembangan Sumber Daya Akuatik (**Aquatic Resources**) antara Universitas Pattimura, LON - LIPPI dan US - AID.

Kontrak pelaksanaan kerja sama antara **University of Washington** dengan Universitas Pattimura dan LON-LIPPI melalui US - AID telah ditandatangani pada tanggal 1 Nopember 1979 dan kini sudah mulai direalisasikan dengan datangnya para ekspert.

- (7) **Penjajakan kerjasama Indonesia dan Perancis** dalam bidang Pengembangan Ke-lautan, telah dilakukan atas prakarsa Badan Pengkajian dan Penerapan Teknolo-gi pada pertengahan tahun 1979, di mana utusan dari Universitas Pattimura, Ir. M.J.Nanlohy diikutsertakan dalam delegasi ke Perancis.
- (8) Dalam rangka kunjungan kerjanya ke Maluku pada bulan Nopember 1979, Menteri Riset dan Teknologi Prof.Dr.Habibie yang disertai oleh para Duta Besar Amerika, Jerman Barat dan Perancis telah pula memberikan ceramah di depan seluruh **Civitas Academica** Universitas Pattimura. Dalam ceramah tersebut anta-ra lain disarankan agar skenario pendidikan di Universitas Pattimura diubah dan disesuaikan dengan pengembangan Ilmu-ilmu Kelautan yang sudah menjadi PIP Universitas Pattimura. Karena tenaga-tenaga sarjana di bidang ini sangat langka sedang laut Maluku sangat luas dan mempunyai potensi yang besar.

Respons Pemerintah Daerah Maluku dalam hal ini besar dan telah memberik-an bantuan bagi pengembangan kelautan di Universitas Pattimura dan LON - LIPPI. Pentingnya pengembangan kelautan di daerah Maluku telah pula dicantumkan dalam Pola Dasar Pembangunan Maluku 1978 yang menyatakan bahwa: "Di bidang pendidikan tinggi, kebijaksanaan ditujukan untuk menjadikan Pendidikan Tinggi sebagai pusat pengembangan Ilmu pengetahuan guna menunjang pembangunan pada umumnya dan pembangunan maritim khususnya."

Sebenarnya cita-cita dan keinginan adanya pendidikan tinggi kelautan di Maluku telah ada 20 tahun yang lalu, di mana pada tahun 1960 direncanakan terdiri dari dua fakultas masing-masing :

- (1) **Fakultas Oseanologi dengan jurusan-jurusan Industrial Fishing dan Tech-nology of Fish Production.**
- (2) **Fakultas Perkapalan dengan jurusan Bangunan kapal dan mesin kapal.**

Sebagai akibat dari perkembangan politik dalam negeri sehubungan dengan peristiwa G 30 S/PKI pada tahun 1965, kegiatan proyek yang dibiayai dengan kredit dari USSR ini terhenti. Pada tahun 1970 Proyek ini diintegrasikan ke dalam Universitas Pattimura sekaligus dengan mendirikan Fakultas Teknik Perkapalan. Peralatan penelitian laut yang direncanakan semula bagi Fakultas Oseanologi sudah tersedia tetapi belum dimanfaatkan/digunakan. Untuk itu

perlu ada penanganan bersama dengan pimpinan Departemen P dan K cq. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Demikianlah gambaran singkat tentang langkah-langkah yang telah ditempuh selama ini sehubungan dengan usaha Universitas Pattimura untuk menjadikan pengembangan ilmu-ilmu kelautan sebagai pola ilmiah pokoknya.

Untuk mengembangkan dirinya secara wajar, maka dewasa ini Universitas Pattimura sedang menempuh kebijaksanaan pembangunan secara bertahap bergilir 7) dengan mottonya: "HOTUMESE" artinya berkembang dalam tantangan."

2). INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN AMBON.

a) Sejarah Singkat.

Sejarah Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Ambon (IKIP- Ambon) dimulai dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau disingkat FKIP di dalam lingkungan Universitas Pattimura dalam tahun 1962. Pada waktu itu FKIP terdiri dari tiga Jurusan Ilmu Sosial masing-masing Jurusan Ilmu Bumi, Jurusan Sejarah, dan Jurusan Ekonomi. Pengintegrasian Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Pertama (PGSLP) dan B1 Bahasa Inggris menambahkan satu Jurusan Bahasa dan Sastra Inggris. Pada tahun 1963 dengan adanya penambahan tenaga dosen tetap, maka dibuka Jurusan Teori dan Sejarah Pendidikan dan Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan.

Dengan kerja sama dosen-dosen Fakultas Pertanian dan Kehutanan serta Staf Pengajar Fakultas Peternakan Universitas Pattimura, maka suatu Jurusan Ilmu Hayat dibuka pada akhir tahun kuliah 1963/1964. Tahun kuliah 1964/1965 dimulai dengan pembukaan tiga Jurusan baru pula, masing-masing Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Jurusan Bahasa, dan Sastra Jerman, dan Jurusan Civics Hukum, oleh karena ada penambahan tenaga-tenaga tetap untuk jurusan-jurusan tersebut. Kemudian dalam tahun yang sama, dengan kesediaan mengajar dari beberapa orang tenaga insinyur dari Proyek Fakultas Teknologi Ambon di Poka, Jurusan Ilmu Pasti dibuka.

Sebelumnya itu sesuai dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 1, tertanggal 3 Januari 1963 FKIP Universitas Pattimura dijadikan cabang dari Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Jakarta sebagai induk, dan kemudian dikenal sebagai Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jakarta cabang Ambon (IKIP Jakarta-cabang Ambon) dengan pimpinan antara lain : H.A. Risakotta M.A., Drs.F. F.H. Matrutty. Maka di samping Universitas, IKIP Jakarta cabang Ambon merupakan lembaga perguruan tinggi negeri yang kedua di kota Ambon, yang pada hakekatnya mengurus kepentingan-kepentingan sendiri. Pada waktu itu IKIP Jakarta cabang Ambon memiliki empat buah fakultas dengan jurusan masing-masing :

I. Fakultas Ilmu Pendidikan dengan jurusan-jurusan:

1. Teori dan Sejarah Pendidikan
2. Bimbingan dan Penyuluhan

II. Fakultas Keguruan Pengetahuan Sosial dengan Jurusan-jurusan:

1. Ilmu Bumi
2. Sejarah Budaya
3. Ekonomi
4. Civics dan Hukum

III. Fakultas Keguruan Sastera Seni dengan jurusan-jurusan :

1. Bahasa dan Sastera Inggris
2. Bahasa dan Sastera Indonesia
3. Bahasa dan Sastera Jerman

IV Fakultas Keguruan Ilmu Eksakta dengan jurusan-jurusan :

1. Ilmu Hayat
2. Ilmu Pasti

Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Ambon, sejak pemisahannya dengan Universitas Pattimura, banyak mengalami kesulitan dan kekurangan. Selain dalam staf pengajar, juga ruangan kuliah dan lain-lain fasilitas. Lembaga-lembaga yang ada pada IKIP Ambon ialah **Lembaga Penelitian Pendidikan** yang pernah mengadakan penelitian-penelitian di pulau Seram dan juga aktif bergerak dalam penelitian pendidikan pada sekolah-sekolah di Ambon. Lembaga Praktek Keguruan yang besar gunanya dalam mempersiapkan para sarjana Muda, sebelum mereka menempuh ujian akhir dan berhak diangkat sebagai Sarjana Muda Pendidikan pada sekolah-sekolah yang membutuhkan tenaga. Sebuah perpustakaan sekolah yang sebelumnya mendapat perhatian dengan semestinya, kini sudah mulai ramai dikunjungi para mahasiswa. Buku-buku yang masih sangat terasa kekurangannya adalah buku-buku yang diperlukan Jurusan-jurusan Bahasa dan Sastera dan jurusan-jurusan pada Fakultas keguruan Ilmu Eksakta. Dalam hal ini perlu dicatat sumbangan-sumbangan buku dalam jumlah yang tidak kecil dari pihak kedutaan Amerika Serikat di Jakarta. Suatu sumbangan yang berharga pula adalah dari Universitas Pattimura yang meminjamkan laboratoriumnya untuk dipakai oleh para mahasiswa jurusan Ilmu Hayat karena IKIP sendiri belum mempunyainya.

Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Ambon sampai menjelang pengintergrasian kembali dengan Universitas Pattimura Ambon 1969, memiliki kurang lebih 800 mahasiswa. Rata-rata tiap tahun ada pelamaran calon mahasiswa sekitar 200 orang. Sampai dengan tahun tersebut IKIP Ambon telah menghasilkan 65 orang sarjana muda. Pada tahun 1968 telah dibuka studi doktoral untuk jurusan-jurusan Bahasa Inggris dan Ilmu Bumi yang kemudian di seluruh jurusan-jurusan Ekonomi, Sivities Hukum dan Sejarah.

b) Kegunaan IKIP Ambon.

Seperti IKIP-IKIP lain di seluruh Tanah Air, maka Lembaga Pendidikan Tinggi ini dimaksudkan sebagai pusat Pendidikan guru-guru ahli yang sangat dibutuhkan pada sekolah-sekolah lanjutan kita diseluruh propinsi Maluku.

Sesuai kenyataan bahwa sekolah-sekolah kita yang sudah ada di daerah ini, membutuhkan tambahan tenaga guru yang menurut perkiraan tahun 1967 sebagai berikut :

- Untuk sekolah dasar 1292 guru
- Untuk sekolah lanjutan pertama 285 guru
- Untuk sekolah lanjutan atas 195 guru

Sudah tentu pembukaan/penambahan sekolah-sekolah baru yang merupakan suatu urgensi belum dapat di realisasi apabila kekurangan tenaga guru ini belum dapat diatasi. Dengan demikian tugas yang dibebankan pada IKIP Ambon sungguh berat, yaitu untuk mendidik tenaga guru bagi sekolah-sekolah lanjutan. Walaupun lembaga ini penuh dengan kekurangan, namun dengan tenaga dan kemampuan yang ada sedikit demi sedikit harapan masyarakat dapat dipenuhi.

Di samping sebagai wadah produksi tenaga pengajar, IKIP Ambon tidak sedikit memberi bantuan tenaga serta sumbangan pikiran kepada masyarakat sekitar, kepada instansi-instansi pemerintah, badan-badan swasta serta lembaga-lembaga pendidikan lain, apabila diperlukan. Selain dalam tugas-tugas pendidikan dan pengajaran, maka para tenaga dosen IKIP Ambon juga bergerak dalam bidang penelitian, sebagai penasihat, penterjemah maupun juru bahasa apabila diperlukan. Semuanya ini adalah panggilan dari pada tri dharma Perguruan Tinggi yang harus diemban oleh *civitas academica* IKIP Ambon.

Setelah kurang lebih empat tahun berstatus sebagai IKIP Jakarta cabang Ambon maka akhirnya berdasarkan surat keputusan Direktur Jenderal Perguruan Tinggi No. 161/1977 tertanggal 16 September 1967, terhitung mulai tanggal 1 Januari 1968 IKIP Jakarta cabang Ambon diintegrasikan kembali ke dalam Universitas Pattimura Ambon. Dan berdasarkan surat keputusan Presidium Universitas Pattimura No.11 Tahun 1969 bekas IKIP Ambon ini dijadikan dua Fakultas yaitu Fakultas Keguruan dan Fakultas Ilmu Pendidikan.

3) AKADEMI PEMERINTAHAN DALAM NEGERI (APDN) AMBON

a). Sejarah Pembentukannya

Sebagaimana halnya APDN-APDN di daerah lainnya di seluruh Nusantara maka lahirnya APDN Ambon didasarkan pula atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 tahun 1965. Sesuai peraturan ini maka sebenarnya APDN Ambon sudah dapat didirikan dalam tahun 1965 karena telah mendapat persetujuan Bapak Gubernur M. Padang, akan tetapi pelaksanaannya tertunda mengingat fasilitas belum memadai, sehingga para lulusan Kursus Dinas C (K.D.C.) Ambon semuanya dikirim ke Malang untuk melanjutkan studi mereka pada Akademi Pemerintahan Dalam Negeri

di Malang yang dibuka dalam tahun 1956. APDN Malang pada saat itu merupakan satu-satunya Akademi Kedinasan Departemen Dalam Negeri guna memberikan pendidikan dasar bagi tenaga-tenaga Pimpinan Pemerintahan Dalam Negeri.

Akademi ini kemudian ditutup dalam tahun 1967, karena berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 tahun 1965 tersebut di atas, terbentuk APDN di daerah-daerah Tingkat I/Propinsi yang penyelenggaraannya/pembinaannya serta pembiayaannya menjadi tanggungjawab tiap-tiap pemerintah Daerah/Propinsi. Oleh Departemen Dalam Negeri kemudian dibuka Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) di Malang pada tanggal 25 Mei 1967 untuk memberikan kemungkinan bagi lulusan APDN untuk melanjutkan studinya.

Sejalan dengan rencana pemerintah untuk mengembangkan suatu aparatu pemerintahan yang berwibawa, efisien dan cakap, maka Pemerintah Daerah Maluku menganggap urgennya pembukaan sebuah APDN di Maluku, hasrat mana, dapat terealisasi dengan diresmikannya APDN Ambon pada tanggal 2 Mei 1969 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 28 Pebruari 1969 N0. 17 tahun 1969 walaupun dengan fasilitas yang belum memadai. APDN Ambon merupakan suatu lembaga pendidikan yang bertujuan mendidik kader-kader pemerintahan yang **nation wide** guna peningkatan efisiensi dan efektivitas administrasi serta peraturan pemerintah yang dapat membina kemampuan dan efisiensi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Mengingat keadaan geografis di Maluku yang kurang menguntungkan, maka sangat dibutuhkan Administratur Pemerintahan dan Pembangunan yang **qualified** yang dapat memimpin wilayah pemerintahannya sendiri-sendiri dengan baik dan jitu.

Akademi ini juga dimaksudkan untuk menjadi pusat kegiatan penelitian usaha-usaha kemajuan dalam lapangan Ilmu Pemerintahan khususnya dan ilmu pengetahuan umumnya, guna disumbangkan bagi kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan bagi dunia Ilmu Pengetahuan. Akademi ini diharapkan pula dapat tumbuh menjadi suatu Lembaga Pendidikan untuk menciptakan kader-kader Pamong Praja yang mampu mengemban: kode kehormatan dan doktrin "Karya Dharma Praja Mukti". Akademi ini menerima mahasiswa untuk Tingkat I tamatan SMA dan tingkat II dari tamatan kursus Dinas C (KDC) setelah berpraktek kerja sekurang-kurangnya dua tahun di lingkungan Pemerintahan Dalam Negeri. 8)

b) Perkembangannya

Dalam perkembangannya Akademi ini mengalami pertukaran Direktur sebagai berikut :

Direktur APDN Ambon I : adalah Z.M.Sitanala (almarhum)
sejak 1 April 1969 dengan Surat
Keputusan Gubernur KDH Propinsi
Maluku tanggal 22 Mei 1969 No. 389/GMAL/69.

Direktur APDN Ambon II adalah Drs.N.Lailossa (almarhum)
sejak 24 April 1971 dengan Surat

**Keputusan Gubernur KDH Tingkat I
Maluku tertanggal 2 April 1972 No.3/APDN/71.**

Direktur APDN Ambon III adalah Dra.Ny.S.M.Engko-

**Ohinol dengan Surat Keputusan
Gubernur KDH Tingkat I Maluku
tertanggal 14 Oktober 1971 No.271/48.**

Direktur APDN Ambon IV adalah Drs.J.F.Maukar dengan

**Surat Keputusan Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Maluku tertang-
gal 9 Agustus 1979 No.232/UP.**

Mengenai susunan organisasi akademi dapat dicatat sebagai berikut :

Akademi ini dipimpin oleh seorang direktur. Direktur memimpin dan bertanggungjawab atas tercapainya tujuan lembaga/akademi dalam melaksanakan tugas serta usaha perkembangan akademi, maka direktur dibantu oleh Dewan Disen, untuk urusan-urusan yang menyangkut seluruh akademi sebagai suatu akademi kedinasaan dan lembaga ilmiah.

Kepala-kepala Bagian

- Kepala Bagian Perencanaan
- Kepala Bagian Pengajaran
- Kepala Bagian Kemahasiswaan dan Alumni
- Kepala Bagian Laboratoria dan Pendidikan Lapangan
- Kepala Bagian Sekretariat.

Kepala Bagian Perencanaan bertugas dan berkewajiban membantu Direktur dalam bidang perencanaan demi pengembangan dan perkembangan Lembaga Pendidikan ini serta mengkoordinasi beberapa bidang operatif, bidang program dan bidang rencana kerja.

Kepala Bagian Pengajaran bertugas dan berkewajiban membantu Direktur dalam pengurusan yang berhubungan dengan pendidikan/pengajaran serta mengkoordinasi tiga bidang operative yaitu : Bidang Pengajaran Pendidikan, Bidang Penelitian Skripsi dan Bidang Pelaksanaan Ujian.

Kepala Bagian Kemahasiswaan dan Alumni bertugas dan berkewajiban membantu Direktur dalam bidang yang berhubungan dengan Kemahasiswaan dan Alumni serta mengkoordinasi tiga bidang yaitu : Bidang Prosensi Evaluasi, Bidang Rekreasi, dan Bidang Pembinaan Alumni.

Kepala Bagian Laboratoria dan Pendidikan Lapangan bertugas dan berkewajiban membantu Direktur dalam pengurusan yang berhubungan dengan pembinaan penelitian lembaga, Mahasiswa Proyek Desa Kerja dan Pengabdian Masyarakat serta

mengkoordinasi tiga bidang operatif yaitu : Bidang Penelitian Lembaga, Bidang Dokumentasi dan Bidang Hubungan Masyarakat.

Kepala Bagian Sekretariat bertugas dan berkewajiban membantu Direktur dalam pengurusan yang berhubungan dengan pelaksanaan semua kegiatan-kegiatan tata usaha, kepegawaian dan keuangan serta mengkoordinasi beberapa sub bagian yaitu : Sub Bagian Umum, sub bagian kepegawaian, sub bagian keuangan dan sub bagian perlengkapan.

Sejak pembukaannya sampai dengan tahun kuliah 1980 yaitu selama delapan angkatan, APDN Ambon telah menghasilkan sebanyak 252 orang Sarjana Muda yang disebarakan ke berbagai pelosok Propinsi Maluku. Mengenai keadaan mahasiswa dan alumni dapat dilihat sesuai lampiran.

5). AKADEMI PELAYARAN NIAGA MALUKU

Akademi Pelayaran Niaga Maluku didirikan pada tanggal 1 Januari 1977 berdasarkan Rekomendasi Kepala Kantor Wilayah VIII Direktorat Jenderal Perhubungan Laut No. W.VIII 91/2/8 tertanggal 16 Mei 1977. Akademi ini mempunyai dua jurusan yaitu :

- a).Jurusan Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga(KPN)
- b).Jurusan Telekomunikasi Pelayaran Niaga (Telkom).

Untuk menunjang APNM ini maka didirikan pula :

- a). Sekolah Pelayaran Menengah (SPM) Ambon pada tanggal 1 Januari 1978 dengan rekomendasi Kepala Kantor Wilayah VIII Direktorat Jenderal Perhubungan Laut No.W.VIII.91 2/8 tertanggal 16 Mei 1977.SPM Ambon ini mempunyai tiga jurusan yaitu : Jurusan Nantika, Tehnika dan Telekomunikasi.

Berdirinya Sekolah Pelayaran Menengah (SPM) Ambon ini atas usul Yayasan Maritim Maluku yang diketuai oleh K.Halattu dengan sekretaris Drs. Frans Hitipeuw (waktu itu sekretaris Perwakilan P dan K Propinsi Maluku).

b). Lembaga Pendidikan Markonis Kapal (LPMK)

Dengan rekomendasi Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi No. 3286/Dittel/K/29/77 tertanggal 18 Mei 1977. Para lulusan diharapkan dapat mengabdikan pada kapal-kapal dagang domestik maupun asing.

Adapun yang menjadi latar belakang pemikiran pendirian lembaga-lembaga pendidikan kemaritiman ini ialah letak geografis daerah Maluku yang begitu luas dengan berbagai masalah maritim yang menyangkut pelayaran, perdagangan laut dan pendidikan kelautan yang perlu diatasi demi kemajuan pembangunan daerah Maluku yang hendak dicapai ialah :

- a). Menanamkan cinta laut, yaitu menggugah para pemuda Maluku untuk cinta laut sesuai dengan alam geografisnya dan rencana pembangunan daerah Maluku.

- b). **Peningkatan skill**, yaitu penyempurnaan pengetahuan kecakapan dari tenaga-tenaga pelaut yang sudah ada (pemberian sertifikasi kelautan yang layak).
- c). Mencukupi tenaga pelaut, yaitu menghasilkan tenaga-tenaga pelaut yang merupakan tenaga-tenaga ahli yang terdidik dan trampil untuk mencukupi kebutuhan perwira-perwira kapal nasional. APNM, SPM-Ambon dan LPMK ini mula-mula dikelola oleh Yayasan Pendidikan Maritim Maluku (YPMM), kemudian dilanjutkan oleh "Yayasan Pendidikan Pelayaran Niaga Maluku" (YPPNM) yang berakta notaris No. 14 tertanggal 8 Nopember 1976 dan dibina oleh Pusdiklat Perhubungan Laut Jakarta.

Sebagai kampus sementara, APNM, SPM ambon dan LPMK mempergunakan sekolah dasar negeri Tawiri Ambon. Kampus yang permanen sedang dalam perencanaan. Tenaga dosen diperoleh dari tenaga-tenaga Kantor Wilayah Departemen Perhubungan Laut, tenaga-tenaga berketrampilan khusus (MPB III), tenaga-tenaga yang berpengalaman di bidang teknika, tenaga PK, para sarjana yang berminat di bidang kemaritiman/elektro pelayaran niaga dan tenaga-tenaga PHB dari Kodam XV Pattimura Ambon.

Suatu perpustakaan yang memenuhi syarat sedang dirintis. Mengenai praktek para siswa telah dapat dilaksanakan dengan baik, Praktek darat (Prada) untuk jurusan KPN pada tahap pertama sudah berjalan dengan lancar dan di antara para tamatan sudah ada yang menjadi tenaga permanen pada perusahaan tersebut. Prada dijalankan di Propinsi Maluku, Irian Jaya dan Sulawesi Tenggara. Masalah Praktek Laut (Prala) pada mulanya berjalan lancar pada P.T.Dok Wayana Ambon, kemudian atas usaha Direktur Pertamanya bernama Yusuf, diberikan latihan pada kapal-kapal yang berlayar ke dalam maupun ke luar daerah Maluku selama setahun, dan barulah boleh menempuh ujian SPM Ambon. Jadi masalah Prala ini sudah disetujui dan dalam waktu dekat para taruna sudah dapat berprala pada kapal-kapal dagang domestik. Dengan STBP NO. DPL.902/1/9 tertanggal 24 Januari 1978 oleh Dit.Jen.Perhubungan Laut, maka APNM akan ikuti ujian bulan Juni 1981. 9)

2. Usaha Swasta

Sebagai akibat dari perkembangan pendidikan yang sangat cepat, timbul kekurangan gedung dan bilik-bilik sekolah, alat-alat pelajaran, buku-buku, guru-guru dan biaya. Pemerintah sendiri tidak dapat menangani semua masalah pendidikan tersebut. Oleh karena itu di samping pemerintah yayasan pendidikan milik gereja-gereja Protestan, Roma Katolik, Organisasi-organisasi Islam, ABRI, organisasi-organisasi wanita, membantu pemerintah dengan jalan membuka sekolah-sekolah dan perguruan tinggi untuk menampung murid-murid dan calon mahasiswa yang setiap tahun bertambah jumlahnya.

Adapun pendidikan dan pengajaran yang diusahakan oleh pihak swasta dapat dicatat sebagai berikut :

a). **Pendidikan Dasar Dan Menengah**

1). **Pendidikan/Persekolahan yang diusahakan oleh G.P.M.**

Pendidikan dan persekolahan yang diselenggarakan oleh Gereja Protestan Maluku (GPM) dewasa ini dapat dikatakan mempunyai sejarah yang terpanjang dan tertua di daerah Maluku. Sejarah pertumbuhannya secara singkat dapat dicatat dalam beberapa fase sebagai berikut: 8)

a). **Fase V.O.C..**

Mulanya pendidikan kristen dalam masyarakat Maluku pada hakekatnya bersamaan dengan masuknya agama Kristen Protestan. Pendidikan dan persekolahan berada di bawah pengawasan V.O.C. Sekolah-sekolah yang didirikan oleh para zending pada umumnya termasuk dalam pola penyebaran agama Kristen Protestan.

b). **Fase abad ke-18 tahun 1920**

Sekolah-sekolah Kristen yang diasuh oleh para zending tetap berada di bawah pengawasan pemerintah Belanda. Sekolah-sekolah pada fase ini perkembangan yang agak pesat. Sekitar pertengahan abad ke-19 banyak sekolah-sekolah Kristen diambil alih oleh pemerintah. Hampir semua sekolah adalah Sekolah Rakyat 3 tahun yang biasanya disebut **Volk-school**. Meskipun sekolah-sekolah diambil alih pemerintah, namun tanggung jawab penuh masih berada dalam tangan zending yang mendirikan nya.

c). **Fase abad ke-20 (1920 - 1942)**

Sekolah-sekolah tetap diasuh oleh zending meskipun di bawah pengawasan pemerintah. Sekolah-sekolah Kristen di pulau Buru dan Halmahera-Morotai berada dalam urusan **Utrechtse Zendings Vereniging (UZV)** sedangkan di pulau-pulau lainnya di bawah **Nederlands Zendelings Genootschap (NZG)**. Karena Zending di Maluku berada langsung di bawah kekuasaan **Indische Kerk**, maka dengan demikian sekolah-sekolah Kristen di Maluku Tengah dan Tenggara berada di bawah pengawasan pula dari **Indische Kerk**. Keadaan ini berlangsung sampai tahun 1935, di mana zending di Maluku mendapat kebebasan (administrasi). Muncul pula pada tahun ini **Molukse Protestantsche Kerk** (Gereja Protestan Maluku) dengan pimpinan pada badan pekerja **Synode**. Hak pengelolaan sekolah Kristen langsung di bawah badan Pekerja **Synode**. Gaji guru-guru sekolah masih tetap dibayar oleh pemerintah.

Di Irian Barat yang adalah daerah (**ressort**) kerja dari Gereja Protestan Maluku terdapat pula sekolah-sekolah Kristen seperti: resort Fakfak (Kokas, Kaimana) dan ressort Merauke. Banyaknya sekolah-sekolah

Kristen di Irian Barat sekitar tahun 1935 adalah sebagai berikut :

Fakfak	: 12 buah
Kokas	: 10 buah
Kaimana	: 14 buah
Merauke	: 8 buah

Jumlah 45 buah, dengan jumlah murid sekitar 700. Semua sekolah adalah sekolah Rakyat 3 tahun. Untuk menampung anak-anak yang lulus dari S.R. 3 tahun, maka di Fakfak dibuka *Vervolgschool*. Sekolah ini terdapat pula di Ambon dan Tual. Dalam Periode ini telah berkembang beberapa sekolah Rakyat 3 tahun menjadi S.R. 4, 5 dan 6 tahun. Kurikulum di perluas dengan mata pelajaran yang sesuai dengan sekolah pemerintah (gubernemen). Pengajaran agama tetap dijalankan. Pengajaran dan pendidikan berjalan lancar sampai menjelang Perang Dunia II.

d). **Fase Pendudukan Jepang (1942 - 1945)**

Sesudah fase Jepang segera diadakan reorganisasi oleh pemerintah Belanda sekolah-sekolah Kristen diawasi dalam suatu ikatan yang disebut "Pool" di mana ditentukan bahwa sekolah-sekolah tetap diselenggarakan oleh gereja, tetapi biaya di tangan pemerintah. Dan diawasi oleh pemerintah. Dalam fase ini sekolah-sekolah berkembang baik secara kuantitas maupun kualitas. S.R. 3 tahun menjadi 6 tahun. Mata pelajaran disesuaikan dengan kurikulum sekolah pemerintah.

Dalam periode ini taman kanak-kanak Kristen juga dibuka di mana-mana dan diurus oleh badan-badan pendirinya dan diawasi Biro Pendidikan an dari G.P.M.

Sesudah tahun lima puluhan timbul perkembangan di mana masyarakat mengingini tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan maju dari pada sekolah dasar saja. Selain di kota Ambon juga di beberapa wilayah pelayanan G.P.M. dibuka sekolah lanjutan (SMP).

Selain peningkatan perhatian pada Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama, pada waktu ini timbul perhatian pula kepada Sekolah Pendidikan an Guru. Sebabnya karena kebutuhan tenaga guru sangat mendesak sebagai dari perkembangan jumlah sekolah. Seperti diketahui pada tahun 1950, pemerintah telah menyeragamkan semua jenis sekolah pendidikan guru yang ada menjadi satu lembaga saja yaitu apa yang dikenal sebagai S.G.B. (Sekolah Guru B). GPM harus menyesuaikan diri dengan derap langkah perkembangan dan langkah-langkah ke arah itu dapat dicatat sebagai berikut :

Tahun 1951 : GPM membuka sebuah SGB di kota Ambon pimpinan Sdr.S.W.Lohenapessy. Pada tahun 1956 sekolah ini mendapat subsidi pemerintah.

- Tahun 1961 : SGB ditutup sesuai peraturan pemerintah dan diganti dengan SGA (Sekolah Guru Atas). Subsidi SGB dialihkan kepada SGA.
- Tahun 1966 : SGA dibuka di kota Tual (Maluku Tenggara) Thn. 1966 SGA diubah menjadi SPG (Sekolah Pendidikan Guru).
- Tahun 1967 : SPG dibuka di Saumlaki (Maluku Tenggara).

Sampai dengan tahun 1965 semua sekolah-sekolah diatur oleh Pengurus Umum Sekolah-Sekolah GPM di bawah Departemen Pendidikan dari GPM. Pada tahun 1965 terjadi perubahan dalam struktur GPM. Sekolah-sekolah lalu berada di bawah tanggung jawab Departemen Diakonia. Dalam perkembangan selanjutnya disadari bahwa urusan-urusan persekolahan sebaiknya ditangani secara profesional. Dalam sidang Sinode GPM tahun 1976 muncul gagasan untuk membentuk sebuah yayasan yang mengurus dan mengelola sekolah-sekolah GPM. Yayasan tersebut akhirnya dapat diwujudkan dengan terbentuknya suatu yayasan yang disebut "Yayasan Pembinaan Pendidikan Kristen DR.J.B.Sitanala yang disingkat Y.P.P.K. Dr.Y.B.Sitanala" dengan akte notaris No.30 tertanggal 22 Juli 1977. Kemudian dengan Surat Keputusan Badan Pekerja Sinode GPM No.67 tertanggal 29 Mei 1978 dibentuklah badan pengurusnya. Yayasan ini berkedudukan di kota Ambon dan merupakan salah satu badan pembantu utama GPM dalam mengurus sekolah-sekolah GPM. Badan pengurusnya bertanggung jawab kepada GPM. 9)

Adapun susunan organisasi YPPK Dr.Sitanala terdiri dari: Badan Pengawas, Badan Pengurus Pusat, Badan Pengurus Cabang, dan Badan Pengurus Perwakilan. Badan Pengawas ini mewakili GPM sebagai pendiri Yayasan. Badan ini diketuai oleh ketua Sinode GPM dan dibantu dua orang anggota. Badan Pengawas Pusat terdiri dari seorang ketua, wakil ketua, Sekretaris, bendahara dan dibantu para anggota. Dewasa ini ketua B.P.P. adalah Sdr. F.P.B. Litaay Wakil Ketua C.Loppies, Sekretaris I pendeta S.Ospara S.TH dan bendahara L.A.Tahalele. Badan Pengurus Cabang terdapat di Ternate, Masohi dan Tual, kemudian di setiap Klasis dibentuk cabang yayasan. Badan Pengurus perwakilan terdapat di tempat-tempat di mana ada sekolah dari yayasan. Keuangan yayasan diperoleh melalui subsidi dari GPM yang diatur melalui Ketua-ketua Klasis; bantuan pemerintah terutama berupa guru, sarana dan prasarana; SPP sekolah dan sumbangan-sumbangan lainnya.

Semua sekolah dasar telah mendapat subsidi penuh dari pemerintah. Para guru S.D. adalah guru-guru pemerintah yang diperbantukan dan guru-guru yayasan yang diusulkan menjadi guru pemerintah. Sekolah Taman Kanak-Kanak juga diasuh oleh guru dengan status yang sama

dengan S.D. Pada Sekolah Lanjutan Pertama dan Lanjutan Atas para gurunya adalah semua guru-guru pemerintah. SMP mendapat subsidi berbantuan yang umumnya berupa biaya operasional. Sejak tahun 1961 SPG Kristen Ambon telah mendapat subsidi penuh. Sesuai dengan kebijaksanaan pendidikan dari Departemen P dan K beberapa sekolah yang diusahakan oleh pengurus-pengurus setempat supaya diintegrasikan dengan yayasan-yayasan sekolah yang berbadan hukum. Dalam rangka itu maka SMP swasta negeri Alang (pulau Ambon) dan SMP Lamdesar Timur (pulau Tanimbar) telah diintegrasikan ke dalam YPPK Dr. Y.B. Sitanala.¹⁰ Mengenai perkembangan sekolah-sekolah YPPK Dr. Y.B. Sitanala ini dapat dilihat pada lampiran.

2). Pendidikan/Persekolahan Yang Diusahakan Perkumpulan Persekolahan Kristen Protestan Maluku (P.P.K.P.M.)

Selain sekolah-sekolah Kristen yang diasuh oleh YPPK Dr. Y.B. Sitanala, maka apa pula sekolah-sekolah yang diasuh oleh suatu yayasan yang bernama "Perkumpulan Persekolahan Kristen Protestan Maluku" yang disingkat "PPKPM". PPKPM adalah penjelmaan dari **Molukse Christelijke School Vereniging** yang disingkat MCSV yang didirikan pada tahun 1918 dengan anggaran dasar yang disahkan dengan beslit Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 28 Juli 1934. No.25 dan berkedudukan di ibu kota Ambon. Perubahan nama dari MCSV ke PPKPM terjadi pada tanggal 24 Januari 1952 dalam suatu rapat Badan Pengurus. ¹¹)

Sejarah pertumbuhannya secara singkat dapat dicatat dalam beberapa fase sebagai berikut :

a). Fase sebelum Perang Dunia II

Dimulai dengan sebuah **Christelijke Hollands Inlandse School** (Chr.H. I.S.) yang berlokasi di kompleks persekolahan Urimessing sekarang ini. Karena perkembangan yang pesat dibuka lagi sebuah H.I.S. di Belakang Soya dan sebuah lagi di komplek Urimessing. Ketiga sekolah ini terletak di kota Ambon. Kemudian di kota Saparua dibuka dua buah H.I.S. lagi masing-masing di kota Saparua dan Tieuw (Saparua). Di Piru (Seram Barat) sebuah H.I.S. negeri diambil alih oleh MCSV. Di kota Tual (Ket) didirikan sebuah H.I.S. yang namanya sekolah Marthin Luther.

Murid-murid berasal dari segala lapisan masyarakat yang beragama Kristen. Yang dari agama lain tidak ditolak. ¹²) Sekolah-sekolah dipimpin oleh kepala sekolah orang Belanda yang berijazah **Hoofdacte**. Mereka dibantu oleh satu dua guru-guru orang Indonesia yang berijazah H.K.S., H.I.K., **Kweekschool**, F.K.S. dan **Normaal School**. Bekas guru-guru Belanda (kepala sekolah) yang berjasa dan tidak terlupakan oleh bekas murid-murid mereka adalah Baljet dan van Weerden di Ambon dan P.J. Haan serta van Son di Saparua.

S., H.I.K., **Kweekschool**, F.K.S. dan **Normaal School**. Bekas guru-guru Belanda (kepala sekolah) yang berjasa dan tidak terlupakan oleh bekas murid-murid mereka adalah Baljet dan van Weerden di Ambond an P.J. Haan serta van Son di Saparua.

b). **Fase Pendudukan Jepang**

Sekolah-sekolah berubah nama menjadi Sekolah Rakyat Sempurna. Sekolah-sekolah M.C.S.V. tidak dibuka, karena gedung-gedung sekolahnya dijadikan obyek penguasa Jepang. Kompleks persekolahan Urimesing dijadikan rumah sakit pembantu. Namun sampai kapitulasi Jepang gedung-gedung sekolah MCSV tidak mengalami kerusakan yang berat.

c). **Fase Penyerahan Jepang - Tahun 1950**

Sekolah-sekolah MCSV dibuka kembali dengan nama **Christelljke Herstel Lagere School** dengan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar, di bawah **Departement van Onderwijs Kunsten en Wetenschap** (Dep.O.K. W.)

d). **Fase Pemerintahan Republik Indonesia**

Sejak tahun 1951 Lagere School diubah menjadi Sekolah Rakyat 6 tahun berbahasa Indonesia. Dalam waktu singkat sekolah-sekolah berkembang dengan pesat sehingga pada kompleks-kompleks persekolahan di Urimesing dan Belakang Soya dapat dicatat sekolah-sekolah sebagai berikut :

Kompleks Urimesing :

S.R. Kristen AI, AII, AIII

S.R. Kristen BI, BII, BIII.

Belakang Soya :

S.R. Kristen AI, AII.

S.R. Kristen BI, BII.

Karena kekurangan tempat, maka sekolah-sekolah berutar bergiliran pagi dan siang. Karena kekurangan tempat, maka SR Kristen AI dan BI dipindahkan ke Batu gantung dan berganti nama menjadi SR Rehoboth I dan II, yang kemudian diasuh oleh Pengurus Umum Sekolah-sekolah GP M dan dijadikan SR Latihan untuk S.P.G. Kristen. Di kota Saparua dibuka pula S.R.Kristen I dan II. Kemudian pula di kota Piru (Seram Barat) dan Tual. Mulaitahun1966 sistem pendidikan berubah menjadi Pendidikan Dasar, Menengah dan Tinggi. Maka Sekolah Rakyat diganti nama menjadi sekolah Dasar.

Yayasan PPKPM juga mempunyai sejumlah Sekolah Taman Kanak-Kanak. Guru-guru S.D. semuanya adalah guru-guru pemerintah. Guru-guru pembantu masih berstatus swasta dan dibiayai oleh PPKPM. Guru-guru SPM semuanya juga guru-guru pemerintah yang berijazah PGSLP, Sarjana Muda Pendidikan dan Sarjana Pendidikan. Pada tahun 1956 dibuka sebuah SMA dengan guru tetap sekarang sebanyak 5 orang yang

masih berstatus swasta. Mereka dibantu oleh tenaga honorer eks alumni SMA Kristen ini.

Pada kompleks sekolah Urimessing terdapat pula sebuah laboratorium yang dipakai SMP dan SMA. Direncanakan kompleks persekolahan Urimessing akan dibenah menjadi sebuah kampus yang baik.

Mengenai perkembangan dari pada sekolah-sekolah yang diasuh ya-
yasan PPKPM ini dapat dilihat pada lampiran.

3) Pendidikan Yang Diusahakan Oleh Yayasan Alhilaal

a). Sejarah Pembentukan dan Pertumbuhan.

Sesudah Kapitulasi Jepang nampaknya suasana masyarakat Islam teru-
tama di kota Ambon tidak begitu stabil. Terutama di kalangan pemuda
dan pemudi terdapat hal yang memprihatinkan pada bidang pendidikan.
Untuk menyelamatkan keadaan, maka pemuka-pemuka Islam keturunan
Arah mengambil inisiatif untuk menghimpun dan membimbing generasi
muda Islam antara lain saudara-saudara Abdullah Zein Basalamah dan
Ali Bahasoan. Salah satu cara yang paling mudah untuk mengumpulkan
para pemuda ialah melalui kegiatan olah raga. Pemikiran ini kemudian di
wujudkan dan dimulai membentuk pusat-pusat perkumpulan olah raga.
Setelah semua pemuda dan pemudi terkumpul dalam wadah-wadah olah
raga itu maka dimulai dengan langkah-langkah dakwah dan pemberan-
tasan buta huruf. 13) Kemudian melangkah dengan membentuk organi-
sasi sosial religius yaitu **Persatuan Islam Alhilaal**.

Pada tahun 1950 pecah pemberontakan R.M.S. dan susunan masyara-
kat sangat kacau. Sesudah R.M.S. tahun 1950 dimulai dengan rehabilita-
si dan pemukiman kembali organisasi yang telah ada itu. Bantuan dana
diminta ke Yayasan Sosial-Islam di Jakarta di bawah pimpinan Mr. Assat.
Sesudah pengakuan kedaulatan, dana sosial dari pusat dikirim juga un-
tuk Ambon. Bantuan diminta pula Gubernur Latuharhary. Pada tahun
1952 dengan dana yang tersedia itu dibelikan sebidang tanah dan diusa-
hakan menjadi pusat pendidikan dan persekolahan. Kompleks ini kemu-
dian diresmikan dan dinamai **Balai Perguruan Alhilaal**. Sejak tahun 1952
dimulailah dengan usaha-usaha dalam bidang persekolahan dan pembi-
naan.

b). Usaha-Usaha Di Bidang Pendidikan dan Persekolahan.

Usaha pertama dimulai dengan membuka sebuah Sekolah Rakyat dan
sebuah Madrasah Ibtidaiyah. Dalam perkembangan selanjutnya dibutuh-
kan suatu organisasi profesional untuk mengurus sekolah-sekolah lebih
baik. Maka pada tahun 1963 organisasi Persatuan Islam Alhilaal diubah
menjadi suatu badan hukum yang bernama Yayasan Alhilaal dengan ak-
te notaris No.14 tertanggal 21 Oktober 1963. Yayasan ini berkedudukan
di kota Ambon. Yayasan berasaskan Islam dan tujuannya ialah:

(1). Mengembangkan pendidikan, pengajaran dan kebudayaan yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam.

(2). Memperkuat Dakwah Islam serta menggerakkan amal kebajikan.

Langkah-langkah ke arah tujuan tersebut di atas ialah :

(1). Mendirikan, memelihara dan menyempurnakan perguruan-perguruan yang berdasarkan Islam seperti madrasah, pesantren, sekolah dan lain-lain.

(2). Menyediakan beasiswa untuk membantu pelajar-pelajar yang tidak/kurang mampu.

Modal yaysan diperoleh dari zakat, sokongan (donasi) pemberian-pemberian, tunjangan (subsidi) dan lain-lain usaha yang halal.

Yayasan ini dipimpin dan diselenggarakan oleh Dewan Pengurus yang terdiri dari seorang Ketua, Wakil Ketua, seorang sekretaris dan bendahara. Susunan badan pengurus yang ada sekarang ialah :

Ketua : Abdullah Zein Basalamah

Wakil Ketua : Mahmud Alastri

Sekretaris : Abdulkarim Sangadji

Bendahara : Sagaf bin Smith

Dalam waktu yang singkat yayasan ini sudah mempunyai empat buah Sekolah Dasar dan sebuah Taman Kanak-Kanak di kota Ambon. Usaha-usaha di pulau Buru maju dengan pesat dan juga di daerah-daerah lain di Maluku. Mengenai perkembangan sekolah-sekolah Alhilaal ini dapat dilihat pada lampiran.

4). Pendidikan Yang Diusahakan Oleh Perguruan Muhammadiyah

Seperti diketahui, Muhammadiyah adalah sebuah organisasi Islam non politik, didirikan di Yogyakarta pada tahun 1912 oleh Kiyai Haji Ahmad Dahlan. Tujuannya memurnikan ajaran Islam di Indonesia semurni keaslian ajaran tersebut seperti yang disampaikan oleh Nabi Muhammad s.a.w.

Dalam rangka pemantapan ajaran demi mencapai sasaran organisasi yaitu membentuk insan Muslim yang berakhlak mulia, trampil dan berkecerdasan tinggi, Muhammadiyah membentuk beberapa organ perserikatan yang disebut "Majelis" di antaranya Majelis Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.

Kini di seluruh Indonesia telah tersebar perguruan Muhammadiyah yang dikendalikan oleh Majelis Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan tingkat pusat, Wilayah, Daerah Kabupaten dan Kecamatan.

Untuk Propinsi Maluku, Majelis Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan berkedudukan di kota Ambon. Sedangkan Maluku Utara dan Halmahera dikendalikan oleh Majelis Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Daerah Tingkat II.

Jauh sebelum Perserikatan Muhammadiyah berikhtiar mendirikan pergu-

ruannya di Ambon, sebuah yayasan yang bernama **Persatuan Muslimin Indonesia** disingkat PERMI pada tahun 1948 telah mendirikan sebuah Madrasah Ibtidaiyah di Ambon. 14) Yayasan ini yang dipelopori oleh Osman Sukur H.R. Pandji, Hassannusi, H.H. Bin Hamid, H.A. Soullissa, Ahmad Yusuf, A. Madjid Ambon dan lain-lain telah menetapkan programnya untuk bergerak di bidang pematrasahan mengingat :

- a). Sekolah-sekolah yang bersifat umum telah banyak didirikan, baik oleh pemerintah maupun organisasi-organisasi pendidikan lainnya.
- b). Perlu memelihara kelestarian dan memantapkan ajaran-ajaran Islam kepada generasi muda Islam.
- c). Perlu mencetak calon-calon guru agama yang dapat mengembangkan ajaran-ajaran agama Islam, bahkan dapat bertindak sebagai da'i/mubaligh.

Mengingat jumlah murid madrasah ini sudah cukup banyak maka dirasa perlu membuka madrasah yang baru menjadi madrasah Ibtidaiyah Permi II. Sesudah itu berturut-turut dibuka madrasah-madrasah Ibtidaiyah Permi cabang di 12 tempat.

Iha Luhu (Seram) pada tahun 1965

Tobo (Seram) pada tahun 1966

Tunsai (Seram) pada tahun 1967

Hatuputi di Manipa pada tahun 1967

Amakolo di Amakolo pada tahun 1967

Talaga di Talaga pada tahun 1967

Limboro di Limboro pada tahun 1967

Liaela di Liaela pada tahun 1967

Wailikut di Buru Selatan pada tahun 1970

Kambeli di Kambeli pada tahun 1971

Melati di Melati pada tahun 1977

Madrasah Tsanawiyah Iha Kulur tahun 1973.

Pada tahun 1956 dibuka PGA Permi di Ambon dan berlokasi di jalan Raja Laha dan setelah berjalan selama 6 tahun diambil alih oleh Departemen Agama menjadi PGA Negeri. Sementara itu sebuah yayasan Pendidikan Islam dengan ketuanya Ali Touszy pada tahun 1957, telah membuka SMP Islam berlokasi pada gedung yang sama dengan madrasah Ibtidaiyah Permi I di jalan Raja Laha, setelah PGA Permi beralih ke gedung di jalan Pancasila. Pada tahun 1961 oleh Yayasan Pendidikan Islam dibuka lagi SMA Islam. Setelah PGA Islam memperoleh gedungnya yang baru di Batumerah, maka SMA Islam dialihkan ke jalan Pancasila. Dengan tujuan penghematan tenaga, di mana Ali Touszy sebagai ketua yayasan pendidikan Islam merangkap pula ketua Majelis Pendidikan pada Yayasan Permi, maka SMP Islam dan SMA Islam yang dikelola oleh Yayasan Pendidikan Islam dialihkan menjadi SMP dan SMA Permi. Pada tahun 1967 diserahkan pula

perguruan-perguruan SMP dan SMA Permi kepada Majelis Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Muhammadiyah wilayah Maluku. Pada tahun 1973 madrasah Ibtidaiyah Permi I diserahkan oleh yayasan Permi kepada Majelis untuk dijadikan S.D. Muhammadiyah. Pada tahun 1979 seluruh madrasah Ibtidaiyah/Tsanawiyah Permi di seluruh Maluku Tengah diintegrasikan kepada Muhammadiyah.

Selain Permi, maka seluruh madrasah Nadilulum Ibtidaiyah dan sebuah madrasah Tsanawiyah Nadilulum di Sepa juga dengan pernyataan pengurusnya tanggal 27 Agustus 1979 diintegrasikan kepada Muhammadiyah. Kemudian menyusul sebuah madrasah Ibtidaiyah di Kilwouw Gorom (Seram Timur) pada tanggal 1 Juni 1979

Dengan pengintegrasian ini semua, maka jumlah sekolah madrasah yang kini berada dalam pengurusan Majelis Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Muhammadiyah Wilayah Maluku adalah sebagai berikut :

Di daerah Kotamadya Ambon : sebuah SD, sebuah madrasah Ibtidaiyah, sebuah SMP dan sebuah SMA.

Di Daerah Maluku Tengah : 14 buah Madrasah Ibtidaiyah, dua buah Madrasah Tsanawiyah.

Di Daerah Maluku Utara : dua buah SMP masing-masing di Tobelo dan Ternate, dan sebuah SMA yang baru dibuka bulan Juli 1980 di Ternate.

Mengenai sekolah Taman Kanak-kanak semuanya diasuh oleh **Aisyiyah**, yaitu suatu organisasi otonom dari Muhammadiyah. Sebelumnya sejak tahun 1953 telah didirikan sebuah yayasan dengan nama "Yayasan Taman Kanak-Kanak Islam" yang diketuai oleh Ny.Z.M.Haulussy-Lestahu, yang dibantu oleh Ali Fauzy, Ny.S.Diponegoro dan A.Amakoro.

Dewasa ini sedang diusahakan untuk mendirikan sebuah kampus bagi perguruan Muhammadiyah agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Mengenai perkembangan pendidikan dan pengajaran dari sekolah-sekolah Muhammadiyah dapat dilihat pada lampiran. Majelis Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Tingkat Wilayah Propinsi Maluku yang bertugas mengelola semua perguruan Muhammadiyah terdiri dari :

Ketua : S.A. Haulussy BA

Wakil Ketua : A.K. Ely S.H.

Sekretaris/Bendahara : Ali Fauzy

dan dibantu oleh beberapa orang anggota.

5). **Pendidikan dan Persekolahan yang diusahakan oleh Yayasan Persekolahan Angkasa.**

Yayasan persekolahan Angkasa adalah sebuah yayasan dalam lingkungan TNI Angkatan Udara yang mengurus dan menyelenggarakan pendidikan dan persekolahan umum dan berlokasi pada Lanu Pattimura Ambon.

Seperti diketahui pendidikan umum di lingkungan TNI Angkatan Udara bernaung di bawah Yayasan TNI AU Adi Upaya, yang didirikan dengan akte Notaris No.08 tanggal 2 Maret 1974, berpusat di Jakarta. Untuk pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Kerja Sama Pendidikan Umum yang disingkat BKSP.15)

Tujuan didirikan sekolah-sekolah Angkasa ialah :

- a) Untuk menampung putera-putera anggota TNI-AU khususnya.
- b) Mencapai kemandirian ABRI dan Rakyat.
- c) Sebagai suatu wadah kesejahteraan bagi anggota.

Cabangnya pada Lanu Pattimura maka Badan Pengurus BKSP ini berkedudukan di Laha (Pulau Ambon) yang terdiri dari seorang ketua, sekretaris dan bendahara dan dibantu beberapa orang anggota. Tugasnya mengawasi pelaksanaan pendidikan. Sumber dana BKSP daerah diperoleh dari : bantuan Yayasan TNI-AU Adi Upaya pusat, dan sumbangan lain yang sah dan tidak mengikat. Sedangkan dana BKSP cabang diperoleh dari iuran dan sumbangan pendidikan setiap siswa, bantuan dari yayasan dan sumbangan lainnya. Semuanya dipergunakan untuk pembiayaan pendidikan.

Sekolah-sekolah yang dimiliki Yayasan Angkasa ini ialah sebuah Taman Kanak-Kanak, sebuah SMP dan sebuah SMA. Sebagian besar tenaga guru ialah guru tidak tetap. Sarana pendidikan yang ada dapat dikatakan memenuhi syarat-syarat yang diperlukan.

6). Pendidikan dan Persekolahan yang diusahakan oleh Misi Katolik.

Pendidikan dan persekolahan yang diusahakan oleh Misi Katolik dapat dikatakan bersamaan dengan usaha-usaha penyebaran agama Katolik itu sendiri. Usaha-usaha pendidikan yang bersifat keagamaan sudah diletakkan dan dirintis oleh Misi Katolik dan mencapai kemajuan-kemajuan yang pesat di bawah Misionaris terkenal Fransiscus Xaverius pada pertengahan abad ke-16.

Usaha-usaha Xaverius itu kemudian diteruskan oleh para misionaris yang lain. Dengan berkuasanya orang-orang Belanda yang beragama Kristen Protestan dalam abad ke-17, 18 dan ke-19 ternyata usaha-usaha misi Katolik kurang mendapat ruangan untuk bergerak. Pada akhir abad ke-19 usaha-usaha Misi diperbolehkan bergerak dengan bebas kembali.13) Dengan demikian para misionaris meneruskan usaha-usahanya dan alat serta cara yang terbaik ialah melalui pendidikan. Karena itu mulailah dibuka sekolah-sekolah yang pada mulanya lebih berorientasi kepada pendidikan agama.

Usaha-usaha pendidikan dan pengajaran Katolik itu pada permulaannya diusahakan oleh para biarawan yang berupa pendidikan pada tempat tempat tinggal mereka yaitu di rumah dan kemudian meningkat ke biara-

biara. Untuk pertama kali penduduk setempat diperkenalkan kepada agama Katolik dan ajaran-ajarannya. Sesudah itu mereka diajar dalam usaha-usaha pekerjaan ketrampilan seperti pandai besi, tukang kayu dan lain-lain. Sebagai contoh ialah usaha-usaha dari misionaris Yohannis Dominicus Kausters SY, dan Yakobus Booms SY yang berpusat di Langgur kepulauan Kei. Akibat dari perkembangan-perkembangan dalam bidang pendidikan ini maka dibukalah semacam Sekolah Pendidikan Guru Agama (semacam Seminari kecil) untuk mencukupi tenaga pengajar dan kemudian sekolah-sekolah pertukangan. Dalam perkembangan selanjutnya meningkat kepada pembukaan sekolah-sekolah yang bersifat pendidikan umum.

Karena pertumbuhan dan perkembangan yang pesat sesuai perkembangan dalam masyarakat sendiri, maka dirasa sangat perlu untuk membentuk yayasan-yayasan pendidikan untuk menangani dan mengatur lebih baik sekolah-sekolah yang telah dirintis oleh para misionaris tersebut.14)

Lahirlah yayasan-yayasan yang menangani dan mengurus persekolahan Katolik antara lain :

a) **Yayasan Willibrordus**, didirikan pada tanggal 25 Mei 1924 dan berkedudukan di Langgur (Tual) yang disahkan dengan akte Notaris No.6 tertanggal 18 September 1954.15) Tujuan yayasan ini :

Berusaha dalam lapangan persekolahan dan asrama-asrama untuk pelajar-pelajar serta urusan amal, atas dasar Katolik. Modal yayasan ini diperoleh dari: iuran sukarela, Subsidi Pemerintah, sumbangan dan pendapatan-pendapatan lainnya. Yayasan ini dipimpin oleh suatu Badan Pengurus yang anggota-anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Wali Gereja. Pimpinan yayasan yang pertama adalah sebagai berikut :

Ketua : Philipus Renyaan Seminari di Tual
Wakil Ketua : Andreas Sol, Overste, berkedudukan di Tual
Bendahara : Karel Strater, Sekretaris Vikariat Apostolik Amboina berkedudukan di Tual.

Yayasan Willibrordus termasuk yayasan persekolahan Katolik yang tertua di Maluku. Dewasa ini daerah/wilayah kerjanya ialah Maluku Tenggara dan Maluku Utara.

b). **Yayasan Theresia**, dengan daerah/wilayah kerja di Maluku Tengah dan Kota Madya Ambon. Di Maluku Tengah sekolah-sekolahnya terdapat di pulau Buru, Seram dan pulau Ambon.

c). **Yayasan Sekata**, dengan daerah/wilayah kerja di Dobo pulau-pulau Aru.

d). **Yayasan Melati**, dengan daerah/wilayah kerja khusus di kota Ternate.

Semua yayasan-yayasan persekolahan tersebut di atas berada di bawah koordinator "Persekolahan Nasional Katolik dengan Kantor Pusat Persekolahan Nasional Katolik Keuskupan Amboina di Ambon.

Mengenai perkembangan dan keadaan sekolah-sekolah Katolik di Maluku dapat dilihat pada statistik terlampir.

7). Pendidikan/Persekolahan Persit Kartika Chandra Kirana

Pendidikan dan persekolahan umum yang diusahakan dalam lingkungan Angkatan Darat di bawah organisasi Persit Kartika Chandra Kirana berkedudukan di Jakarta. Pengurus daerahnya terdapat pada tiap-tiap Komando Daerah Militer (KODAM) di Indonesia. Untuk Daerah Maluku Badan Pengurusnya ialah PD XV Pattimura yang berkedudukan di kota Ambon.

Untuk mengelola sekolah-sekolah lebih baik maka perlu suatu badan hukum sesuai dengan kebijaksanaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Maka itu terbentuklah sebuah yayasan yang bernama "Yayasan Jenderal Ahmad Yani" yang didirikan pada tahun 1965.

Sekolah-sekolah yang dimiliki oleh yayasan ini ialah dua buah Taman Kanak-kanak (TK.A. dan TK.B)

- a) Dua buah Sekolah Dasar yang sudah bersubsidi penuh didirikan tahun 1955.
- b) Sebuah SMP yang bersubsidi bantuan yang didirikan tahun 1963.
- c) Sebuah SMA yang bersubsidi berbantuan yang didirikan tahun 1965.

Persekolahan Persit Kartika Chandra Kirana ini menempati sebuah kampus pada jalan Dr.Tamaela Ambon dengan gedung-gedung sekolahnya sendiri. Guru-guru yang dimiliki adalah guru-guru yayasan dan guru guru negeri yang diperbantukan dan tenaga-tenaga guru honorer.

Tujuan didirikan sekolah-sekolah ialah untuk menampung anak-anak dalam lingkungan sendiri dan terbuka juga bagi umum. Dewasa ini sedang diusahakan pengembangan yang menyangkut sarana, prasarana dan tenaga guru.

8). Sekolah-sekolah lainnya.

Selain sekolah-sekolah yang diusahakan oleh yayasan-yayasan pendidikan swasta tersebut di atas yang tergolong agak besar dan kuat, ada beberapa organisasi/yayasan swasta lainnya yang mengusahakan pembukaan sekolah-sekolah juga antara lain :

- a). Organisasi **Bhayangkari** dari Angkatan Kepolisian dan Yalasesnatri dari Angkatan laut dengan beberapa buah sekolah Taman Kanak-Kanak.

- b). Organisasi **Pertiwi** dari Departemen Dalam Negeri dengan "Yayasan Persekolahan Martha Christina Tiahahu" yang mengasuh beberapa sekolah Taman Kanak-kanak dan sekolah SMP.
- c). Organisasi persekolahan dari beberapa Gereja lainnya seperti "Gereja Advent Hari Ketujuh" dengan Taman Kanak-kanak dan sebuah SMA yang berlokasi di kampung Waiyame (pulau Ambon); Gereja **Kalam Kudus** dengan Taman Kanak-Kanak dan sebuah SMP Gereja-Gereja **Bala Keselamatan, Pantekosta, Sidang Jemaat Allah** dengan Sekolah Taman Kanak-kanaknya.

b). Pendidikan Tinggi.

Dalam bidang pendidikan tinggi terdapat pula usaha dari pihak swasta. Di Maluku lembaga-lembaga Pendidikan Tinggi itu terdapat di kota Ambon dan Ternate. Di Ternate dapat dicatat antara lain: Universitas Hairun, Akademi Theologia dari Gereja Masehi Injili Halmahera (GMIH), Akademi Bahasa Asing dan IAIN. Di kota Ambon hanya terdapat sebuah Lembaga Pendidikan Tinggi yaitu Sekolah Tinggi Theologia dari Gereja Protestan Maluku.

1) UNIVERSITAS HAIRUN

Universitas Hairun didirikan pada tahun 1964. Lembaga Pendidikan Tinggi ini diasuh oleh Yayasan Pembina Universitas Hairun di bawah naungan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Utara. Pada mula berdirinya Universitas ini dimulai dengan membuka tiga fakultas masing-masing Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi dan Fakultas Pertanian. Kemudian disusul dengan pembukaan FKIP dengan jurusan-jurusan : Teori dan Sejarah Pendidikan, Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Jurusan Bahasa dan Sastra Inggris, Jurusan Civics dan Hukum, Jurusan Ekonomi dan Jurusan Ilmu Pasti.

Pada mulanya Universitas Hairun bekerja sama dengan Universitas Sam Ratulangi di Manado. Kini mengadakan hubungan dengan KOPERTIS Ujung Pandang.

Universitas ini berstatus Universitas Swasta yang terdaftar. Rektor pertama yang memimpin Universitas ini ialah A.S.Abdulatif B.A. dengan masa jabatan dari tahun 1978-1980. Kini diganti dengan Dr.Saleh Sahib M.P.H.

Universitas ini belum mempunyai kampus yang sesuai dengan persyaratan. Sarana yang ada berupa lima buah gedung milik sendiri, tiga gedung pinjaman dan sebuah lembaga penelitian.

Sampai dengan tahun kuliah 1980 jumlah lulusan Sarjana Muda yang telah dilahirkan sebanyak 184 orang. Pada tahun kuliah 1980 jumlah mahasiswa sebanyak 378 orang dan diasuh oleh 80 orang tenaga dosen/asisten. Kebanyakan dari para dosen berstatus dosen luar biasa.

Dewasa ini Universitas Hairun sedang berusaha untuk mengembangkan dan menyempurnakan dirinya untuk dapat diakui sebagai Universitas Negeri.

2). SEKOLAH TINGGI THEOLOGIA GPM

Pendidikan Theologia dalam Gereja Protestan Maluku tercatat dalam sejarah meliputi tenggang waktu sekitar 160 tahun yaitu :

a). Tahun 1819 - 1833

Fase ini disebut sebagai fase pendidikan theologia yang mula-mula sekali dibuka dan diasuh oleh pendeta Joseff Kam, yang pernah digelar **Rasul Maluku**. Sebagai pengasuh maka Joseff Kam mendidik siswa-siswa untuk menjadi pendeta dan sekaligus Guru Sekolah (**Schoolmeester**) langsung olehnya secara pribadi di rumahnya. Sebahagian besar siswa-siswanya adalah anak semangnya sendiri. Para siswa lulusan lembaga pendidikan Theologia Kam ini disebarkan ke seluruh wilayah Gereja di Maluku malahan sampai ke Timor, Minahasa dan Sangir Talaud. Dengan meninggalnya Kam ini di tahun 1833, maka berakhirlah pula usaha pendidikannya.

b). Tahun 1836 - 1864

Tiga tahun kemudian setelah meninggalnya Kam, maka oleh pendeta Roskott dibuka suatu sekolah untuk mendidik para pendeta, dan sekaligus berfungsi sebagai guru sekolah. Sekolah ini berlangsung kira-kira 28 tahun dan baru berakhir ketika pada tahun 1864 pemerintah Belanda menjadikan sekolah ini sebagai Sekolah Guru Pemerintah.

c). Tahun 1885 - 1949

Fase ini dapat disebutkan sebagai fase STOVIL dan Sekolah Guru Jemaat. Pada tahun 1885 GPM membuka secara resmi suatu Lembaga Pendidikan Theologia yang disebut STOVIL (**School tot opleiding van Inlandse Leeraren**) di Ambon yang dipimpin oleh pendeta Gornfeld sebagai direktur STOVIL yang pertama. Tingkat dan persyaratan pendidikan STOVIL, ini ialah sekurang-kurangnya tamatan **Lagere School** (Sekolah Dasar) ditambah dengan 6 tahun pendidikan Theologia.

Di tahun 1982 dibuka pula sekolah guru jemaat di Ambon dan Tuat karena kebutuhan yang besar akan tenaga-tenaga guru, sehingga para lulusan sekolah guru jemaat dapat berfungsi rangkap, yakni sebagai penghantar Jemaat dan sekaligus sebagai guru sekolah. Hingga tahun 1949 STOVIL sempat menghasilkan 659 orang dan sekolah jemaat 300 orang.

d). Tahun 1949 - 1962 (Fase Sekolah Theologia)

Pada tanggal 1 September 1949 STOVIL dan Sekolah Guru Jemaat berakhir dengan diresmikannya pembukaan Sekolah Theologia Gereja Protestan Maluku oleh Badan Pekerja Synode GPM. Untuk itu Pendeta S. Marantika ditunjuk sebagai direktur pertama lembaga tersebut. Dengan adanya Sekolah Theologia, maka bukan hanya sejarah pendidikan dari zaman kolonial telah berakhir, tetapi sekaligus tingkat dan taraf pendidikan theologia mengalami peningkatan, yaitu lulusan SMP sederajat ditambah dengan pendidikan khusus theologia selama 6 tahun.

Di tahun 1960 dalam sidang Sinode GPM diputuskan untuk segera meningkatkan lagi taraf pendidikan Theologia dari taraf semi akademis menjadi full-akademis demi peningkatan pengabdian GPM kepada Tuhan, bangsa dan Negara. Untuk itu maka sejak tahun 1962 langkah-langkah persiapan telah dijalankan dengan menghentikan/menutup penerimaan calon-calon masuk dari tamatan SLTP dan mulai menerima calon-calon yang berijazah SLTA hingga tahun 1965 dengan dibukanya Institut Theologia GPM sebagai suatu lembaga pendidikan yang Full Akademis.

e). Tahun 1965 - Sekarang.

Nama "Institut" diberikan kepada Lembaga Pendidikan Theologia ini, karena nama Institut inilah yang dirasakan tepat sekali dengan struktur Lembaga Pendidikan Theologia ini. Sebab sesuai pula dengan UU Perguruan Tinggi tahun 1961 pada Bab II pasal 8 mengenai "Nama, Bentuk dan Susunan Perguruan Tinggi" disebutkan bahwa dengan Institut diartikan sebagai suatu Lembaga Pendidikan Tinggi yang mencakup pendidikan-pendidikan sejenis lainnya.

Pada tanggal 7 s/d 10 Pebruari 1973, Lembaga Pendidikan Theologia ini dikunjungi oleh Koordinator Perguruan Tinggi Wilayah VII untuk Indonesia Timur. Berdasarkan hasil penelitian kunjungan di atas, serta sesuai dengan jiwa UU Perguruan Tinggi No.22 tahun 1961, maka oleh Koordinator Perguruan Tinggi Wilayah VII diusulkan untuk menggantikan nama Lembaga Pendidikan ini menjadi Sekolah Tinggi Theologia Gereja Protestan Maluku, sesuai surat tertanggal 5 Maret 1973, No.195/E-III/65/KPT/73.

Di dalam perkembangan selanjutnya berdasarkan Surat Keterangan Terdaftar No.59/DPT/B/1973 dari Direktur Jenderal Pendidikan Departemen Pendidikan Kebudayaan di Jakarta, maka Institut Theologia GPM dinyatakan sebagai Perguruan Tinggi terdaftar dengan nama "Sekolah Tinggi Theologia Gereja Protestan Maluku." Dan meliputi jurusan-jurusan: Theologia dan Pendidikan Agama Kristen.

Untuk pertama kalinya dalam perkembangan sekolah-sekolah Theologia di seluruh Indonesia bahwa Sekolah Tinggi Theologia Gereja Protestan Maluku menyelenggarakan ujian negara di bawah pengawasan KOPERTI Wilayah VII sesuai peraturan yang berlaku. Ujian negara tingkat Sarjana Muda Lengkap diselenggarakan pada tanggal 15 - 17 Januari 1974. Dari 45 peserta ujian, yang dinyatakan lulus 26 orang. Sejak tahun 1967 - 1980 Sekolah Tinggi ini telah menghasilkan 456 orang Sarjana Muda. Pada tahun 1978 mulai dibuka study doktoral untuk Sarjana Lengkap. Perkembangan Lembaga Pendidikan Tinggi ini dapat dilihat pada lampiran.

BAB VII

PENUTUP.

Dari kenyataan sejarah tersebut di atas dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut

1. Sebelum masuknya pengaruh budaya asing, penduduk di kepulauan Maluku telah hidup dalam kesatuan-kesatuan masyarakat yang teratur. Kehidupan masyarakat bersifat tradisional dan feodalistis. Pendidikan dan pengajaran diadakan untuk mempertahankan dan melanjutkan nilai-nilai budaya yang ada dan berlangsung di kalangan keluarganya. Adat kebiasaan memegang peranan penting.
2. Agama Islam masuk di kepulauan Maluku pada kira-kira abad ke-15 mempengaruhi kehidupan masyarakat dan mengembangkannya. Pengaruh Islam kemudian nampak dalam segi agama itu sendiri, dalam kehidupan pemerintahan dan ketatanegaraan dan dalam kehidupan sosial ekonomi. Pada umumnya pendidikan dan pengajaran berlangsung pada langgar-langgar dan madrasah dan bersifat tradisional pula.
3. Pada permulaan abad ke-16 masuk bangsa-bangsa Eropah yang kemudian memperkenalkan peradaban Barat kepada penduduk setempat. Mereka yang berhasil adalah bangsa Portugis dan bangsa Belanda. Cara yang ditempuh untuk menanamkan kekuasaan dan pengaruh mereka selain melalui kekerasan senjata, juga melalui pendidikan dan pengajaran. Pada permulaannya pendidikan dan pengajaran lebih berorientasi kepada pengembangan agama yaitu agama Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Bangsa Portugis berhasil menanamkan agama Katolik dan memperkenalkan segi-segi budaya mereka yang nampak nyata dalam kehidupan masyarakat setempat. Sedangkan bangsa Belanda berhasil menanamkan agama Kristen Protestan dan memperkenalkan segi-segi budaya mereka juga.
Peranan Misi dan Zending sangat besar dalam lapangan pendidikan dan pengajaran di Maluku.
4. Setelah bangsa Belanda berhasil mengusir bangsa Portugis dan berkuasa di Maluku, maka pemerintah Belanda mulai menjalankan suatu sistem pendidikan dan pengajaran yang bersifat Kolonial yang semuanya demi untuk mempertahankan kekuasaan dan kedudukannya. Politik pendidikan yang kolonialistis itu menimbulkan diskriminasi antara bangsa kulit putih dengan orang pribumi. Pada dasarnya pendidikan itu tidak untuk memajukan dan meningkatkan tingkat hidup rakyat Maluku, akan tetapi untuk menunjang politik kolonialnya. Sampai dengan Perang Dunia II sekolah-sekolah yang bersifat umum sangat sedikit didirikan, sedangkan sekolah sekolah kejuruan hampir tidak ada. Akibatnya potensi Daerah Maluku yang begitu besar dalam segi ekonomitidak dapat dikembangkan untuk kemajuan dan kemakmuran rakyat.

5. Berkuasanya bangsa Jepang dalam waktu yang singkat juga membawa tekanan-tekanan yang lebih berat. Pendidikan dan pengajaran diarahkan untuk memenangkan politik Jepang dalam meluaskan imperialismenya. Akibat dari pada politik penjajahan bangsa-bangsa Asing itu timbul reaksi dari bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaannya. Dan salah satu alat perjuangan yang penting ialah memajukan pendidikan dan pengajaran dari bangsa sendiri. Pendidikan Pergerakan Nasional muncul di tanah air dan juga di Maluku yang terkenal dengan pendirian Lembaga Pendidikan "Balai Pendidikan" oleh tokoh-tokoh pergerakan nasional di Maluku. Lembaga Pendidikan mempunyai andil yang besar dalam memupuk jiwa nasional untuk merdeka.
 6. Setelah bangsa Indonesia memperoleh kemerdekaannya dari Belanda, maka sistem pendidikan kolonial tersebut dihapus dan mulai diletakan dasar-dasar baru yang lebih bersifat nasionalistis dan sesuai dengan suasana kemerdekaan. Pendidikan dan pengajaran yang berdasar pada falsafah Pancasila dikembangkan. Dalam waktu yang singkat hampir di semua desa di Maluku sudah mempunyai sekolah dan rakyat pula telah mengecap Pendidikan Tinggi yang sedang dirintis dan disempurnakan. Dewasa ini pembangunan di bidang pendidikan sedang di giatkan untuk mengejar cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
-

DAFTAR CATATAN

BAB I.

1. Drs.J.A.Pattikayhatu, et.al. **Sejarah Daerah Maluku**, Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, Dep.P & K, Tahun 1976/1977, hal. 47 - 50.
2. DR.J.C.Van Leur, **Indonesian Trade and Society**, W.Van Hoeve Ltd-The Hague Bandung, 1955, hal. 142 - 143.
3. DR.F.L.Cooley, **Persentuhan Kebudayaan di Maluku Tengah, 1475 - 1675**, Bunga Rampai Sejarah Maluku I, Lembaga Penelitian Sejarah Maluku Jakarta, 1973, hal. 119 - 121.
4. Prof.DR.Tudjimah, **Masuknya Agama Islam dan Perkembangannya di Kepulauan Maluku**, hasil Seminar Sejarah Maluku I, Ambon, 1972, hal. 138 - 145.
5. Drs.Uka Tjandrasasmita, **Peranan dan Sumbangan Islam dalam Sejarah Maluku**, hasil Seminar Sejarah Maluku I, Ambon 1972, hal 208 - 214.
6. J.A.Pattikayhatu, **Tinjauan terhadap Sejarah Gereja di Maluku**, skripsi Sarjana Pendidikan pada IKIP Kristen Satya Wacana, Salatiga, 1968, hal. 71 - 80.
7. I.O. Nanulaita, **Timbulnya Milliteralisme Ambon**, Bhratara, 1966, Jakarta, hal. 15 - 25.
8. R.Abdurahman, **Peninggalan-peninggalan yang berciri Portugis di Ambon**, Bunga Rampai Sejarah Maluku I, Lembaga Penelitian Sejarah Maluku Jakarta, 1973, hal. 66-74.
9. R.Z.Leirissa, **Kebijaksanaan VOC untuk mendapatkan Monopoli Perdagangan Cengkeh di Maluku Tengah**, Bunga Rampai Sejarah Maluku I, Lembaga Penelitian Sejarah Maluku, Jakarta, 1973, hal. 84 - 112.
10. Drs.J.A.Pattikayhatu, et.al, **Kota Ambon dalam lintasan Sejarah 398 tahun**, Panitia HUT 398 Kota Ambon, 1973, hal. 59 - 61.
11. Keterangan Drs.Frans Hitipeuw, Jakarta, 11 Maret 1981.
12. Keterangan Drs.Frans Hitipeuw, Jakarta, 11 Maret 1981.

BAB. II.

1. Prof.Soegarda Poerbakawatja, **Pendidikan dalam alam Indonesia Merdeka**, Gunung Agung, Jakarta, 1970, hal.13.
2. I.Djumhur dan Danasuparta, **Sejarah Pendidikan**, Penerbit "Tjerdas, Bandung Djakarta, Tjetakan keempat 1969, hal.86.
3. Lihat, Uraian dalam **Sejarah Daerah Maluku**, Proyek Penelitian.
4. Prof.DR.Tudjimah, **Masuknya Agama Islam dan Perkembangannya di Kepulauan Maluku**, Hasil Seminar Sejarah Maluku I, Ambon, 1972, hal. 138 - 145.

5. I.Djumhur dan H.Danasuparta, **op.cit.**, hal. 94.

BAB. III

1. DR.Th.Muller Kruger, **Sejarah Gereja di Indonesia**, Badan Penerbit Kristen, Djakarta, 1959, hl.20.
2. **Ibid.**, hal.21.
3. **Ibid.**, hal.22.
4. I.Djumhur dan Danasuparta, **Sejarah Pendidikan**, Penerbit "Tjerdas", Bandung-Djakarta, Tjetakan Keempat, 1969, hal.97.
5. I.J. Brugmans, **Geschiedenis van het Onderwijs in Ned-Indie**, J.B.Wolters, Groningen, Batavia, 1939, hal.19.
6. C.W.Th.Baron., **de Protestantsche Kerk in Ned-Indie**, Martinus Nyhoff,s' Gravenhage, 1947, hal.114.
7. I.J.Brugmans, **op.cit.**, hal. 31.
8. Sumber dari **Hedendahsche Zending in onze Oost**, oleh Jan Willem Gunning.
9. Pengertiannya ialah bahwa: siapa punya negeri, dia punya agama artinya rakyat mesti memeluk agama rajanya.
10. DR.Th.Muller Kruger, **op.cit.**, hal.68.
11. I.J.Brugmans, **op.cit.**, hal. 68.
12. Politik untuk menyehatkan keuangan negeri Belanda melalui Proyek "Cultuur Stelsel" atau Tanam Paksa oleh Gubernur Jenderal Van den Bosch tahun 1830
13. Drs.T.Paembonan, **Partisipasi Kristen dalam Revolusi di bidang Pendidikan**, Dr W.B.Sidjakat (Redaksi), Partisipasi Kristen dalam Nation Building di Indonesia. Badan Penerbit Kristen, Jakarta, 1968, hal.117.
14. DR.Th.Muller Kruger, **op.cit.**, hal.69.
15. J.A.Pattikayhatu, **Tinjauan terhadap sejarah Gereja di Maluku**, skripsi Sarjana Pendidikan pada IKIP Kristen Satya Wacana, Salatiga, 1968, hal. 98-100.
16. Departemen Diakonia Urusan Pendidikan/Persekolahan GPM, **Sejarah Ringkas Pendidikan Kristen di Maluku**, Ambon, hal.4.

BAB IV.

1. Untuk mengatur dasar-dasar baru bagi pengajaran Bumi Putera dikeluarkan Indisch Staatsblad 1893 No. 125 yang membagi sekolah-sekolah Bumi Putera menjadi 2 bahagian yaitu sekolah kelas satu dan sekolah kelas dua.
2. Lihat politik Etika dalam buku **Sejarah Nasional Indonesia** jilid V oleh Sartono Kartodirdjo et. al.
3. Wawancara dengan Bapak **A.Pattikayhatu**, Guru SD Pensiun, Titawai (Nusaulaut), 30 Oktober 1980.
4. Wawancara dengan Bapak **E.Sahureka**, guru SD Pensiun, Rumah tiga (Ambon), 26 Oktober 1980.
5. Wawancara dengan Bapak **C.Pieter**, bekas Kepala SMA Negeri I Ambon (pensiun), Ambon, 5 Desember 1980.

6. Wawancara dengan Bapak **H.A.Risakotta MA**, bekas Dekan Koordinator IKIP Jakarta-Cabang Ambon, Ambon, 7 Desember 1980.
7. Wawancara dengan Bapak **H.A.Risakotta MA**, Ambon, 8 Desember 1980.
8. Wawancara dengan Bapak **G.Bernard**, Kepala S.T.M. Negeri Tual, Tual 9 Oktober 1980.
9. Wawancara dengan Bapak **M.Ayal**, Bekas Wakil Kepala Inspeksi Pendidikan Masyarakat Kantor Perwakilan Departemen P dan K Propinsi Maluku Ambon, 10 Desember 1980.
10. Lihat riwayat Ki Hajar Dewantoro dalam buku, **Ki Hajar Dewantoro**, Balai Pustaka, Jakarta, 1959.
11. Wawancara dengan Bapak **C.Pieter**, Ambon, 5 Desember 1980.
12. Wawancara dengan Bapak Pendeta **D.Louhenapessy**, Sekretaris II Synode Gereja Protestan Maluku (GPM), Ambon, 12 Nopember 1980.
13. Wawancara dengan Bapak **E.Sahureka**, Rumahtiga (Ambon), 27 Oktober 1980.
14. Wawancara dengan Bapak Pendeta **D.Louhenapessy**, Ambon, 19 Nopember 1980.
15. Wawancara dengan Bapak **H.A.Risakotta MA**, Ambon 7 Desember 1980.
16. Wawancara dengan **Drs.J.H.Leuwol**, Dosen Fakultas Keguruan Universitas Pattimura, Ambon, 2 Nopember 1980.
17. Wawancara dengan Bapak **Chr.Rahanra**, Bekas Kepala Dinas P & K Daerah Tingkat II Mal.Tenggara, Tual, 10 Oktober 1980.
18. R.Z.Leirissa, **Maluku dalam Perjuangan Nasional Indonesia**, Lembaga Sejarah Fakultas Sastera M.I., 1975, hal. 146.
19. Lihat **Sejarah Daerah Tematis Zaman Kebangkitan Nasional di Daerah Maluku (1900-1942)**, oleh Drs.John. Pattikayhatu dan Drs.Mus Huliselan, Proyek PPKD Dep. P dan K thn. 1977/1978.
20. Ki Hajar Dewantoro, **Majelis Luhur Taman Siswa**, Jogjakarta, 1962, hal.53.
21. Ki Hadjar Dewantoro, **op.cit.**, hal.48 - 49.
22. Wawancara dengan Bapak **E.U.Pupella**, Pendiri Persekolahan Balai Pendidikan Ambon, Ambon, 15 Desember 1978.
23. Lihat **Sejarah Daerah Tematis Zaman Kebangkitan Nasional di Daerah Maluku (1900-1942)**, Proyek PPKD tahun 1977/1978.
24. Wawancara dengan Bapak **Tjokro**, bekas guru Balai Pendidikan Ambon (pensiunan), Desember 1978.

BAB V.

1. **Hakko-ichi-u** artinya dunia sebagai satu keluarga, yang mengatakan bahwa Jepang harus menyusun dunia ini sebagai satu kekeluargaan yang besar dan tentu Jepang sebagai Kepala Keluarga.
2. Wawancara dengan Bapak **Sahertian**, Guru Pensiun, Ambon, 5 Desember 1980
3. Disiapkan oleh "**Sub-Panitia Pendidikan dan Pengajaran**" yang diketuai Ki Hadjar Dewantoro, Sub-Panitia ini merupakan bagian dari "**Panitia Persiapan Kemerdekaan**" yang diketuai Ir.Soekarno.

4. Wawancara dengan Bapak **H.A.Risakotta M.A.** Ambon, 8 Desember 1980.
 5. Wawancara dengan Bapak **H.A.Risakotta M.A.** Ambon, 8 Desember 1980.
 6. I.O.Nanulaitta et.al., **Bahan-bahan untuk brosur Persahabatan antar Kota Ambon - Stuttgart**, Ambon 1968.
 7. Untuk pengembangan Perguruan Tinggi, ada 3 unsur pengembangan yang telah digariskan Ditjen. Perguruan Tinggi yaitu: pertumbuhan, pemerataan dan keseimbangan. Kebijakan pengembangan yang memperhatikan ketiga unsur tersebut merupakan perumusan kebijakan **bertahap bergilir**.
 8. Wawancara dengan **Drs.F.F.H.Matrutty**, bekas Dekan Koordinator IKIP Jakarta-Cabang AMbon, Ambon 25 Nopember 1980.
 9. Wawancara dengan **Drs.H.Tuhumury**, Pejabat Sementara Direktur A.P.D.N. Ambon, Ambon 28 Januari 1981.
 10. Wawancara dengan Bapak **F.Amanupunyo S.H.**, Direktur S.P.N.M. dan S.P.M Ambon, Ambon 29 Januari 1981.
 11. Departemen Diakonia Urusan Pendidikan/Persekolahan Gereja Protestan Maluku (GPM), **Sejarah Ringkas Pendidikan Kristen di Maluku**.
 12. Wawancara dengan Bapak Pendeta **J.Ospara**, Sekretaris Yayasan Pembinaan Pendidikan Kristen Dr.J.B.Sitanala, Ambon, 12 Nopember 1980.
 13. Wawancara dengan Bapak **P.Soumokill**, Kepala Bagian Sekretariat J.P.P.K. Dr.J.B.Sitanala, Ambon, 15 Desember 1980.
 14. Wawancara dengan Bapak **J.Soselisa**, Sekretaris P.P.K.P.M. Ambon, 2 Desember 1980.
 15. Para Alumnus tersebut antara lain :
 - Bapak M.Soulisa, bekas Sekda Maluku.
 - Bapak M.Hentihu, Raja Buru.
 - Bapak A.Soulisa, bekas K.D.H. Maluku Tengah
 - Bapak M.Padang, bekas Gubernur Maluku
 - Bapak dr.Marikat dan lain-lain.
 16. Wawancara dengan Bapak **A.Z.Basalama**, Sekretaris Yayasan Persekolahan Al-Hilal, Ambon, 24 Nopember 1980.
 17. Wawancara dengan Bapak **Ely Fauzy**, Sekretaris Yayasan Persekolahan Muhammadiyah, Ambon, 26 Nopember 1980.
 18. Wawancara dengan **M.Mairuhu BA**, Kepala SMA Angkasa Lanu Pattimura Laha (Ambon), Laha, 27 Nopember 1980.
 19. Dr.H.Haripranata, **Ikhtisar Kronologi Sejarah Gereja Katolik di Maluku dan Irian Barat**, Balai Penerbit Yayasan Kanisius, Jogyakarta, 1963, hal. 9 -10.
 20. Wawancara dengan **Pastoor Van de Mode**, bagian Urusan Persekolahan Nasional Katolik, Ambon, 30 Januari 1981.
 21. Wawancara dengan **Pastoor W.Zomer Msc**, Pengurus Perskolahan Nasional Katolik Maluku Tenggara, Langgar (Tual), 10 Oktober 1980.
-

DAFTAR BUKU.

- Abdulrachman R. Paramita et.al., **Bunga Rampal Sejarah Maluku (I)**, Lembaga Penelitian Sejarah Maluku, Jakarta, 1973.
- Abineno J.L. CH., **Sejarah Apostolat di Indonesia**, Jilid I, II/1. BPK, Gunung Mulia Jakarta, 1978.
- Brugmans I.J. **Geschiedenis van het Onderwijs In Nederland Indie**, J.B. Wolters, N.V. Groningen, Batavia, 1938.
- Baron C.W. Th. **De Protestantsche Kerk In Nederland Indie**, Martinus Nijhoff, s'Gravenhage, 1947.
- Beverluis A.J. Gieben A.H.C., **Het Gouvernement Der Moluken**, Weltevreden, 1929.
- BP3K. Pendidikan di Indonesia dari Jaman ke Jaman**, Dep. P dan K, Jakarta 1979.
- Cooley. F.L. **Ambonese Adat A General Description**, Cultural Report Series No.10, 1962.
- Departemen Diakonia Urusan Pendidikan/Persekolahan **GPM Sejarah Ringkas Pendidikan Kristen di Maluku**.
- Djumhur. I. Danasuparta H, **Sejarah Pendidikan**, Penerbit Tjerdas, Bandung, Jakarta, 1969.
- Haripranata H, **Ikhtisar Kronologi Sejarah Gereja Katolik di Maluku dan Irian Barat**, Balai Penerbit Yayasan Kanisius, Yogyakarta, 1963.
- Ki Hadjar Dewantara, **Madjells Luhur Taman Siswa**, Yogyakarta. 1962.
- Keuning J. **Sejarah Ambon Sampai Akhir Abad ke-17**, Bhratara, Jakarta, 1973.
- Koentjaraningrat, **Manusia dan Kebudayaan di Indonesia**, Jambatan, Jakarta 1971
- Leur.J.C. Van, **Indonesian Trade and Society**, The Hague, Bandung, 1955.
- Leirissa R.Z. **Maluku Dalam Perjuangan Nasional Indonesia**, Lembaga Sejarah Fakultas Sastra U.I. Jakarta, 1975.
- Muller Kruger Th. **Sejarah Gereja di Indonesia**, Badan Penerbit Kristen, Jakarta, 1959.
- Nanulaitta I.O., **Timbulnya Militerisme Ambon**, Bhratara, Jakarta, 1966.

Bahan-bahan untuk Brosur Persahabatan Antar Kota

Ambon, Stuttgart, Ambon, 1968.

Pattikayhatu J.A. et.al. **Sejarah Daerah Maluku**, Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, Dep. P dan K, Tahun 1976/1977.

Sejarah Daerah Tematis Zaman Kebangkitan Nasional di Daerah Maluku, Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, Dep. P dan K, Tahun 1977/1978.

Tinjauan terhadap Sejarah Gereja di Maluku, Skripsi Sarjana Pendidikan, IKIP Kristen Stya Wacana, Salatiga, 1968.

Pranata SSP, **Ki Hadjar Dewantara**, Balai Pustaka, Jakarta, 1959.

Soegarda Poerbakawatja, **Pendidikan Dalam Alam Indonesia Merdeka**, Gunung Agung, Jakarta, 1970.

Sartono Kartodirdjo Et.al. **Sejarah Nasional Indonesia**, Jilid V. VI, Balai Pustaka Jakarta, 1977.

Sidjabat W.B., **Partisipasi Kristen Dalam Nation Building di Indonesia**, Badan Penerbit Kristen, Jakarta, 1968.



DAFTAR INFORMAN

No.	N A M A	Umur	Alamat	Pendidikan	Pekerjaan/Pengalaman
1.	H.A.Risakotta, MA	65 thn	Ambon	Hoofdacte Belanda Sarjana Ilmu Perpustakaan.	Bekas Direktur SMA Neg.Ambon Pejabat Dekan Koordinator IKIP Jakarta-Cabang Ambon.
2.	C.Pieter, BA	60 thn	Ambon	H I K Solo Sarjana Muda Pendidikan	Bekas Direktur SMA Neg.I Ambon; Kepala Inspeksi SMA Prop.Maluku
3.	M. A y a l	67 thn	Ambon	Normaalschool 1932 dan SGA thn 1955.	Guru SMP Neg.Saparua; Wakil Kepala Inspeksi Pendidikan Masyarakat Kantor P dan K Propinsi Maluku.
4.	E.Sahuroka	73 thn	Rumahtiga (Ambon)	Normaalschool dan P.G.A.	Guru SD; Wakil Kepala Inspeksi Kebudayaan Kantor P dan K Propinsi Maluku.
5.	A.Pattikayhatu	78 thn	Titawaai (Nusalaut)	Normaalschool	Guru SD; Kepala SR 6 thn.
6.	Ch.Rahanra	61 thn	Tual	Normaalschool	Guru SD; Bekas Kepala Dinas P dan K Daerah Tk.II Maluku Tenggara.
7.	P.P.Renyaaan	72 thn	Tual	Normaalschool	Guru SD, Penilik Kepala Pendidik an Dasar Kantor P dan K Propinsi Maluku.
8.	Sahertian	70 thn	Ambon	Normaalschool SGA dan PGSLP	Guru SD dan Sekolah Menengah
9.	D.Louhenapessy	65 thn	Ambon	STOVIL - Ambon	Pendeta; Sekretaris II Badan Pekerja Synode GPM Ambon.

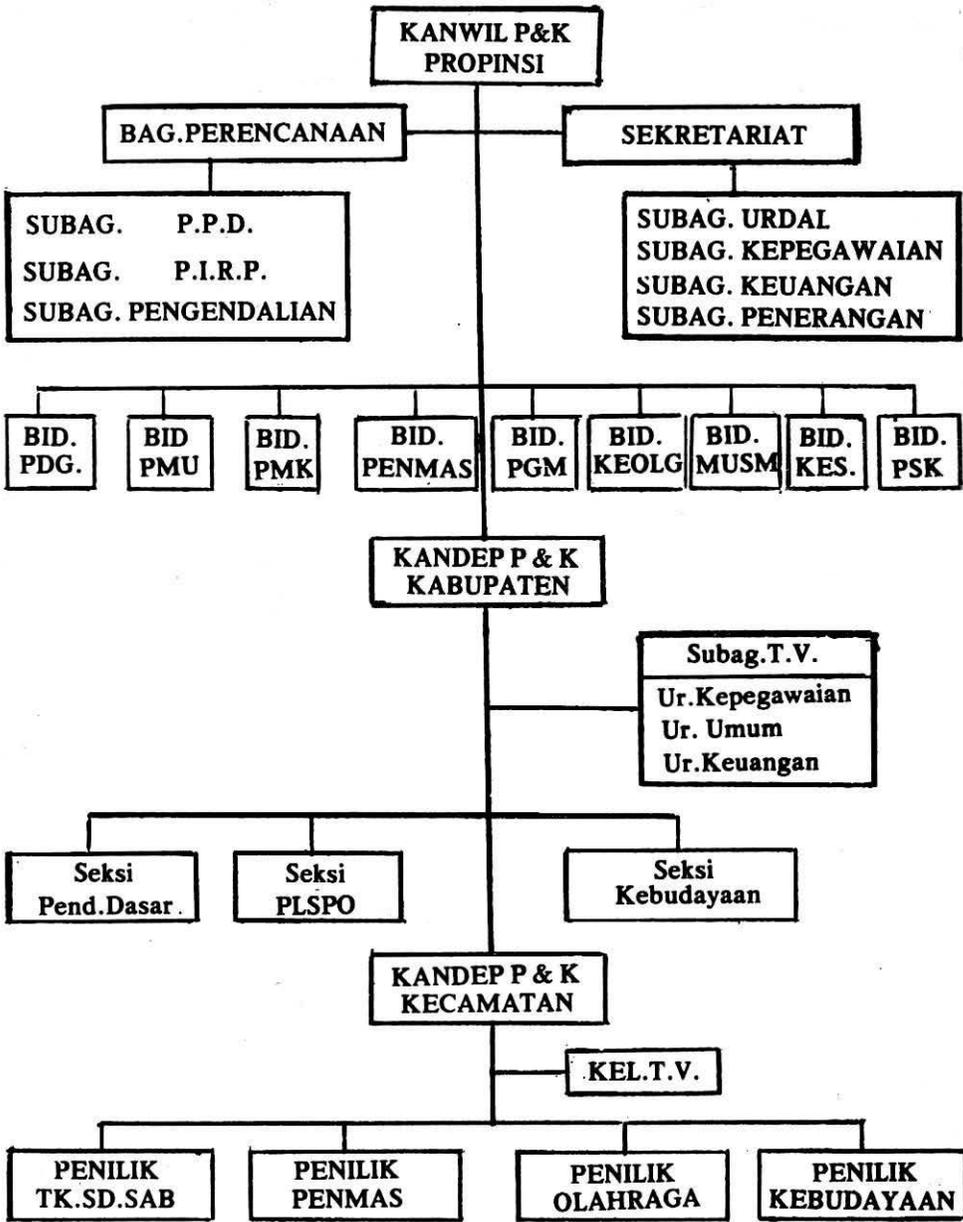
No.	N A M A	Umur	Alamat	Pendidikan	Pekerjaan/Pengalaman
10.	S.O s p a r a	35 thn	Ambon	Sarjana Theologia	Pendeta; Sekretaris Yayasan Persekolahan Kristen dr.Y.B.Sitanala.
11.	J.Sosolissa	75 thn	Ambon	Normaalschool	Guru SD;Sekretris Persekolahan Kristen PPKPM Ambon.
12.	A.Z.Basalama	57 thn	Ambon	M U L O	Wiraswasta; Ketua Yayasan Persekolahan Alhilal Ambon ketua I Majelis Ulama Ambon.
13.	Ely Fauzy	65 thn	Ambon	M U L O	Wiraswasta; Sekretaris Persekolahan Muhammadiyah Ambon.
14.	Pastoor Van de Mode	50 thn	Ambon	Seminari Theologia	Pastoor, Guru Sekolah Lanjutan; Pejabat Ketua Yayasan Persekolahan Katolik "Teresia".
15.	M.Mairuhu, BA	40 thn	Laha (Ambon)	Sarjana Muda Pendidikan	Anggota TNI Angkatan Udara, Kepala SMA "Angkasa".
16.	P.Soumokil	50 thn	Ambon	SGA	Bekas Pegawai Kantor Perwakilan P dan K Prop.Maluku; kepala Sekretariat J.P.P.K. dr.J.B.Sitanala.
17.	A. N o y a	43 thn	Tual	Sarjana Muda Pendidikan	Guru SMA Persit Kartika Chandra Kirana Ambon.
18.	A.Dadiara	30 thn	Ambon	Sarjana Muda Pendidikan	Guru dan Kepala SMEA Tual.

No.	N A M A	Umur	Alamat	Pendidikan	Pekerjaan/pengalaman
19.	E.U.Pupella	66 thn	Ambon	Taman Siswa	Wiraswasta, Bekas Ketua Serikat Ambon-Cabang Ambon; Ketua PIM Anggota Dewan Maluku Selatan; Anggota Parlemen NIT dan RIS; Pemimpin Persekolahan Balai Pendidikan Ambon.
20.	Tjokro	72 thn	Ambon	Taman Siswa	Bekas Pegawai Kantor Perwakilan Pd an K Prop.Mal. Anggota PIM, Guru "balai Pendidikan" Ambon.
21.	Drs.F.F.H.Matrutty	43 thn	Ambon	Sarjana Pendidikan	Dosen, Bekas Dekan Koordinator ikip Jakarta - Cabang Ambon.
22.	Drs.N.Likumahua	37 thn	Ambon	Sarjana Pendidikan	Sekretaris S.T.T. GPM Ambon.
23.	Drs.H.Tuhumuty	40 thn	Ambon	Sarjana Pemerintahan Dalam Neg.	Dosen, Pejabat Direktur APDN Ambon.
24.	F.Amanupunyo S.H.	45 thn	Ambon	Sarjana Hukum	Kepala Sub. Bagian Penerangan Kanwil Dep. P dan K Prop.Maluku; Direktur A.P.N.M. dan SPM Ambon.
25.	Drs.J.E.Sitanala	44 thn	Ambon	Sarjana Pendidikan	Dosen; Bekas Dekan Fakultas Keguruan Unpatti; Ketua BP3 Unpatty.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**STRUKTUR ORGANISASI DEP. P DAN K
DI DAERAH**



Statistik keadaan Tm/SD/Pend.Kejuruan/Pend.Umum/Pend.&Teknologi/ Pen.Guru Negeri-Subsidi-Bantuan dan Swasta dalam Wilayah Daerah Tingkat I Maluku akhir Agustus 1967

No.	Jenis Sekolah	Jumlah Sekolah					Jumlah kelas					Jumlah guru					Jumlah murid				
		Negeri	Swasta			Jumlah	Negeri	Swasta			jumlah	Negeri	Swasta			Jumlah	Negeri	Swasta			Jumlah
			Sub	Bantuan	Swasta			Sub	Bantuan	Swasta			Sub	Bantuan	Swasta			Sub	Bantuan	Swasta	
I.	Taman Kanak-Kanak	-	-	-	107	107	-	-	-	202	202	-	-	-	188	188	-	-	-	5588	5588
II.	Sekolah Dasar	565	-	433	23	1021	3004	-	2340	93	5437	1631	-	1320	45	2996	90146	-	61807	1695	153648
III.	Pendidikan Umum	49	6	13	52	120	318	57	69	107	571	448	75	65	39	627	9415	1853	1779	2110	15157
	1. S.M.P.	41	5	13	41	100	525	47	69	52	420	349	68	65	33	515	7250	1666	1779	1259	11954
	2. S.M.A.	8	1	-	11	20	86	10	-	55	151	99	7	-	6	112	2165	187	-	851	3002
IV.	Pend.Kejuruan	34	1	2	21	58	193	6	6	46	251	253	9	11	17	290	5193	152	190	1091	6417
	1. S.K.K.P.	6	1	2	7	16	23	6	6	12	47	53	9	11	9	82	625	152	190	97	1064
	2. S.K.K.A.	1	-	-	-	1	8	-	-	-	8	5	-	-	-	5	122	-	-	-	122
	3. S.M.E.P.	15	-	-	9	24	76	-	-	21	97	159	-	-	5	164	2132	-	-	246	2478
	4. S.M.E.A.	4	-	-	4	8	37	-	-	11	48	27	-	-	3	30	841	-	-	589	1340
	5. S.H.D.	1	-	-	-	1	16	-	-	-	16	4	-	-	-	-	362	-	-	-	-
	6. S.P.P.N.	1	-	-	-	1	8	-	-	-	8	2	-	-	-	2	164	-	-	-	164
	7. K.P.A.	3	-	-	-	3	7	-	-	-	7	3	-	-	-	3	142	-	-	59	142
	8. K.P.A.A.	2	-	-	4	3	8	-	-	2	10	-	-	-	-	-	326	-	-	-	385
	9. A.A.N.N.	1	-	-	-	1	10	-	-	-	10	-	-	-	-	-	479	-	-	-	479
V.	Pend. Teknologi	9	1	-	-	10	59	4	-	-	63	52	17	-	-	69	1396	162	-	-	1568
	1. S.T.	7	1	-	-	8	44	4	-	-	48	52	17	-	-	69	991	162	-	-	1152
	2. S.T.M.	1	-	-	-	1	13	-	-	-	13	-	-	-	-	-	336	-	-	-	336
	3. S.T.M.I.	1	-	-	-	1	5	-	-	-	5	-	-	-	-	-	69	-	-	-	69
VI.		8	3	-	32	43	31	15	-	48	94	30	20	-	3	53	889	391	-	1205	2495
	1. S.P.G.	2	3	-	2	7	18	15	-	8	41	30	20	-	3	53	359	391	-	151	901
	2. S.P.G./CI	1	-	-	3	4	5	-	-	7	12	-	-	-	-	-	182	-	-	196	378
	3. S.P.G./CII	2	-	-	24	26	2	-	-	26	28	-	-	-	-	-	40	-	-	756	759
	4. K.P.G.	3	-	-	3	6	6	-	-	7	13	-	-	-	-	-	318	-	-	102	420

REKAPITULASI

No.	Jenis Sekolah	Jumlah Sekolah				Jumlah kelas				Jumlah guru				Jumlah murid							
		Negeri	Swasta			Jumlah	Negeri	Swasta			jumlah	Negeri	Swasta			Jumlah	Negeri	Swasta			Jumlah
			Sub	Bantuan	Swasta			Sub	Bantuan	Swasta			Sub	Bantuan	Swasta			Sub	Bantuan	Swasta	
I.	Taman Kanak-Kanak	-	-	-	107	107	-	-	-	202	202	-	-	-	188	188	-	-	-	5588	5588
II.	Sekolah Dasar	565	-	433	23	1021	3000	-	2430	93	5437	1631	-	1320	45	2996	90146	-	61807	1695	153648
III.	Pend. Umum	49	6	13	52	120	338	57	69	107	571	448	75	65	39	627	9415	1853	1779	2110	15157
IV.	Pend. Kejuruan	34	1	2	21	58	193	6	6	251	571	253	9	11	17	290	5193	152	190	1091	6626
V.	Pend. Teknologi	9	1	-	-	10	59	4	-	-	63	52	17	-	-	69	1396	152	-	-	1558
VI.	Pend. Guru	8	3	-	22	43	31	15	-	48	94	30	20	-	3	53	899	391	-	1025	2495
Jumlah:		665	11	448	255	1369	3621	32	2505	496	6618	2414	121	1396	292	4223	107049	2548	63776	11509	185272.

**Statistik keadaan Taman Kanak-kanak/SD/SLTP S.L.T.A./A.A.N. dengan jumlah muridnya
Negeri-Subsidi-Bantuan dan Swasta dalam Kotamadya Ambon sejak tahun
1962 / 1963 / s/d 1966/1967**

No.	Jenis Sekolah	1962/1963					1963/1964					1964/1965					1965/1966					1966/1967				
		Neg	Swasta			Juml.	Neg.	Swasta			Juml.	Neg.	Swasta			Juml.	Neg.	Swasta			Juml.					
			Sub	Ban	Sws			Sub	Ban	Sws.			Sub	Ban	Sws.			Sub	Ban	Sws		Sub	Ban	Sws		
I.	Taman Kanak-kanak	-	-	-	1274	1274	-	-	-	1295	1295	-	-	-	1188	1188	-	-	-	1321	1321	-	-	-	1508	
II.	Sekolah Dasar	4022	4268	-	-	4209	4703	4703	-	-	8912	4220	4754	-	-	8974	4666	4975	-	-	9641	4548	5899	-	-	
III.	Fak.Lan.Tk.Pertama	2159	273	229	158	2819	3017	464	229	298	4008	3248	712	285	28	4273	4840	712	285	56	5893	2983	285	285	-	
	1. S.M.P.	660	273	229	158	1320	1660	464	229	238	2651	1748	712	285	-	2745	3287	12	285	28	4312	1748	285	285	-	
	2. S.T.	527	-	-	-	527	508	-	-	-	508	555	-	-	-	555	551	-	-	-	551	555	-	-	-	
	3 S.K.	37	-	-	-	37	31	-	-	-	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4. S.K.K./S.K.P.	246	-	-	-	246	209	-	-	-	209	286	-	-	-	286	286	-	-	-	286	184	-	-	-	
	5. S.M.E.P.	647	-	-	-	647	510	-	-	-	510	579	-	-	28	607	579	-	-	28	607	354	-	-	-	
	6. K.D.P.	42	-	-	-	42	42	-	-	-	42	42	-	-	-	42	42	-	-	-	42	-	-	-	-	
	7. S.P.G./CII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57	-	-	-	-	57	(1)	-	-	-	
	8. K.P.A.	(1)	-	-	-	(1)	57	-	-	-	57	38	-	-	-	42	42	-	-	-	42	-	-	-	-	
IV.	Sek.Lanj.Tk.Atas.	2002	101	-	370	2573	2263	396	-	52	2711	2711	127	-	231	3068	3071	-	-	306	3377	3375	-	-	1410	
	1. S.M.A.	744	-	-	287	1031	849	279	-	-	1128	1092	-	-	179	1271	1092	-	-	197	1271	950	-	-	1233	
	2. S.T.M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52	-	-	-	52	312	-	-	-	-	312	373	-	-	-	
	3. S.K.K.A./S.G.K.P.	72	-	-	-	72	71	-	-	-	71	90	-	-	-	90	120	-	-	-	120	122	-	-	-	
	4. S.M.E.A.	501	-	-	-	501	445	-	-	-	445	543	-	-	-	543	543	-	-	-	543	678	-	-	-	
	5. S.P.G./S.G.A.	206	101	-	-	307	2167	117	-	-	333	200	127	-	-	327	290	-	-	127	147	272	-	-	188	
	6. S.G.T.K.	-	-	-	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	7. S.H.D.	169	-	-	-	169	255	-	-	-	255	343	-	-	-	343	360	-	-	-	360	362	-	-	-	
	8. S.P.P.N.	49	-	-	-	49	98	-	-	-	98	150	-	-	-	150	164	-	-	-	164	164	-	-	-	
	9. P.G.S.L.P.	108	-	-	-	108	131	-	-	-	131	95	-	-	-	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	10. K.G.A./K.P.G.	31	-	-	-	31	116	-	-	-	116	126	-	-	-	126	127	-	-	-	127	183	-	-	-	
	11. K.P.A.A.	122	-	-	-	122	82	-	-	-	82	72	-	-	-	72	72	-	-	-	72	206	-	-	59	
	12. S.P.G./CI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	½	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65	-	-	-	
V.	Tingkat Akademi																									
	1.A.A.N.N.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	479	-	-	-	
Jumlah :		12435	5016	458	2330	16086	17213	6426	458	1943	23645	16138	6432	570	1706	23614	20201	5699	570	2059	29245	17330	6469	570	4398	

B. Taman Kanak

1.	Kodya Ambon	4	8	205	Kodya Ambon
2.	Pulau Ambon	4	5	170	Mal. Teng.
3.	Saparua	1	1	35	"
4.	Larat	2	2	80	Mal.Tengg.
Jumlah		11	16	490	

Sumber : Kantor Pusat YPPK Dr.J.B.Sitanala Ambon.

Catatan :

- Semua S.D. Berstatus Subsidi
- Semua S.TK berstatus Swasta.

**STATISTIK PERSEKOLAHAN NASIONAL KATHOLIK KEUSKUPAN
AMBOINA DI MALUKU TAHUN 1980.**

No.	Sekolah	Banyaknya	Murid	Guru
1	T.K.	18	1293	28
2	S.D.	133	17424	780
3	S.M.P.	16	2822	159
4	S.M.P. Pertanian	2	146	14
5	SKKP	3	315	22
6	S.T.	1	128	25
7	SMA	4	981	76
8	SPG	2	289	24
9	STM	1	189	19
Jumlah		180	23587	1087

Sumber : Kantor Pusat Persekolahan Naskat Keuskupan Amboina.

**STATISTIK KEADAAN S.TK & SD/MADRASAH/PESANTREN YAYASAN
PENDIDIKAN ALHILAAL DAERAH TINGAT I MALUKU
(SAMPAI AKHIR 1980)**

No.	Kecamatan	Status Sek	Jlh S	Jml M	Jml G	Kodya/Kab.
A. Sek.Dasar/M/P.						
1.	Sirimau	Sw/Sub	2	1145	42	K.Ambon
2.	Baguala	Sub	3	708	33	"
3.	Buru Ut; tim	Sw/Sub	23	2088	56	Mal. Teng.
4.	Buru Ut. Brt	Sub	5	386	10	"
5.	Buru Selatan	Sw/Sub	18	1319	33	"
6.	Seram Barat I	Sw/Sub	4	336	6	"
7.	Seram Utara	Sub	2	121	6	"
8.	Bula	Sub	2	94	4	"
9.	Seram Timur	Sw	11	900	29	"
10.	Werinama	Sw	1	48	4	"
11.	Seram Selatan	Sw	6	591	24	"
12.	Banda	Sw	6	512	36	"
13.	Amahai	Sw	3	210	19	"
14.	Saparua	Sw	3	191	22	"
15.	Sanana	Sw/Sub	8	571	38	Mal.Ut.
16.	Dofa	Sw/Sub	6	297	10	"
17.	Bobong	Sub	5	437	15	"
18.	P.P.Aru	Sw/Sub	10	631	25	Mal.Tengg.
19.	Kei Kecil	Sw/Sub	5	287	19	
Jumlah			123	10872	425	
B. Taman Kanak-Kanak.						
1.	Sirimau	Sw	3	197	6	K.Ambon
2.	Buru Ut.Tmr	Sw	1	27	1	Mal.Teng.
3.	Banda	Sw	1	37	1	Mal.Teng.
4.	Kei Kecil	Sw	1	25	1	Mal.Tengg.
Jumlah			6	286	9	

Sumber : Kantor Pusat Yayasan Alhilaal Ambon.

Catatan :

- | | |
|---|--|
| <p>a. Taman Kanak-kanak (Swasta) 6 buah.</p> <p>b. S.D. (Sub/Swasta) 89 buah.</p> <p>c. Madrasah Ibtidaiyah (Swasta) 22 buah.</p> | <p>d. Madrasah Aliyah (swasta) 2 buah.</p> <p>e. Madrasah Tsnowiyah (swasta) 8 buah.</p> <p>f. SPG 2 buah (subsidi/swasta)</p> <p>g. Pondok Pesantren (swasta) 1 buah.</p> |
|---|--|

**STATISTIK KEADAAN MAHASISWA APDN AMBON TIAP TAHUN
KULIAH SEJAK 1969 - 1981**

No. Urt	Thn Kuliah	Jumlah Per Tkt			Jenis Kel.		Status		Jumlah
		I	II	III	L	P	ID	TB	
1	1969-1970	-	39	-	35	4	-	39	39
2	1970-1971	-	25	38	60	3	-	63	63
3	1971-1972	25	28	24	70	7	-	77	77
4	1972-1973	50	51	25	106	20	-	126	126
5	1973-1974	59	32	44	108	21	-	129	129
6	1974-1975	-	56	32	81	7	-	88	88
7	1975-1976	59	51	26	120	18	-	138	138
8	1976-1977	35	36	45	101	15	10	106	116
9	1977-1978	-	22	39	53	8	7	54	61
10	1978-1979	39	-	18	62	5	17	50	67
11	1979-1980	39	43	18	93	7	7	93	100
12	1980-1981	44	33	44	109	12	25	96	121

Sumber : APDN - Ambon.

**STATISTIK KEADAAN ALUMNI APDN AMBON PER TIAP
ANGKATAN s/d JANUARI 1981**

No. Urt	Angkatan	Jenis Kelain		Jumlah	Keterang
		L	P		
1	I	34	3	37	
2	II	25	-	25	
3	III	20	4	24	
4	IV	35	9	44	
5	V	26	3	29	
6	VI	41	4	45	
7	VII	33	6	39	
8	VIII	8	1	9	
Jumlah seluruh		222	30	252	

Sumber : APDN - Ambon

**STATISTIK KEADAAN S.TK & SD SEKOLAH KRISTEN
YAYASAN PEMBINAAN PENDIDIKAN
KRISTEN (JPPK) DR.J.B. SITANALA
TAHUN 1980**

No	Kecamatan	Jml.Sek.	Jml.G	Jml.M	Kodya/Kab.
A.	Sek.Dasar.				
1.	Kodya Ambon	2	27	725	
2.	P. Ambon	10	59	1861	Mal.Teng.
3.	Saparua	2	8	250	"
4.	Geser	4	7	194	"
5.	Amahai	7	37	887	"
6.	Wahai	8	24	608	"
7.	Tehoru	8	29	861	"
8.	Piru	6	28	525	"
9.	Taniwel	12	52	1108	"
10.	Kairatu	14	38	1283	"
11.	Leksula	14	37	7556	"
12.	Banda	2	10	325	"
13.	Teon Nila Serua	8	32	907	"
14.	Namlea	3	6		"
15.	Serwaru	20	59	2089	Mal.Tengg:
16.	Wonreli	19	64	2227	"
17.	Saumlaki	19	122	2493	"
18.	Elat	24	107	2444	"
19.	Tual	13	65	1662	"
20.	Dobo	53	81	4013	"
21.	Tepa	30	76	3536	"
22.	Larat	32	149	3405	"
23.	Ternate	32	-	267	"
24.	Obi	5	9	368	"
25.	Labuha	2	3	226	"
26.	Sanana	9	10	312	"
Jumlah			1161	32816	

STATISTIK SEKOLAH—SEKOLAH DI MALUKU
(AMBON, LEASE, SERAM, BURU, MANIPA BUANO) Thn. 1821

I

No.	Tempat	Jml.Sek.	Jml.Murid
1	P. Ambon	24	1421
2	P. Haruku	6	478
3	P. Saparua	10	965
4	P. Nusalaut	6	551
5	P. Seram	8	460
6	P. Buru Manipa Buano	3	150
Jumlah :		57	4025
II.			
1	Pp. Banda	4	
2	Ternate	4	
3	Pp. Selatan Daya	4	100
4	Pp. Tenggara	4	± 475
	Sekolah J.Kam	1	
Jumlah		74	4600

Catatan : Jumlah murid dalam tahun 1821 - 1833 di Lease :
Tahun 1821 1994
Tahun 1833 3130

Berkembang dgn 1136

Sumber : Buku J. Kam, Statistik.

**Statistik Keadaan Sekolah Muhammadiyah
Tahun 1980 / 1981**

No.	Nama Sekolah	Tempat	Status	Jumlah murid	Jumlah guru	Keterangan
1	SD Muhammadiyah	Ambon	Subsidi	173	9	Nomor : 6, 20, 21 dan 22 belum diterima data
2	MI Muhammadiyah	Ambon	Swasta	160	10	
3	SMP Muhammadiyah	Ambon	Subsidi	386	23	
4	SMA Muhammadiyah	Ambon	Swasta	318	29	
5	MIM Sepa	Sepa	Swasta	117	6	
6	MIM Iha Luhu	Iha Luhu	Swasta	-	-	
7	MIM Tobo	Tobo	"	60	6	
8	MIM Tunsai	Tunsai	"	66	5	
9	MIM Hutuputi	Hatuputi	"	99	2	
10	MIM Amoholo	Amoholo	"	241	4	
11	MIM Talaga	Talaga	"	156	3	
12	MIM Limbaro	Limbaro	"	193	2	
13	MIM Wailikut	Wailikut	"	64	2	
14	MIM Melati	Melati	"	130	3	
15	MIM Liaela	Liaela	"	145	4	
16	MIM Kombelu	Kombelu	"	189	5	
17	MIM Kilwouw	Kilwouw	"	66	2	
18	MTSM Sepa	Sepa	"	61	4	
19	MTSM Iha Kulur	Iha Kulur	"	62	6	
20	SMPM Tobelo	Tobelo	"	-	-	
21	SMA M Ternate	Ternate	"	-	-	
22	SMA M Ternate	Ternate	"	-	-	

Sumber: Kantor Pusat Persekolahan Muhammadiyah - Ambon.

Keterangan : MIM = Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah
MTSM = Madrasah Tsnowiyah Muhamamdiyah.

OFFSET PERCETAKAN NEGARA R.I.-AMBON



Pe
J